LPM KENTINGAN | SALURAN SEBELAS
Detak Nurani Mahasiswa

LPM KENTINGAN

EDISI KHUSUS

Lapsus 1

Miniatur Pemerintahan yang Retak:
Krisis Student Government UNS

Lapsus 2

Konfigurasi Kuasa Ormek dalam Politik Kampus UNS

Opini 1

BEM: Badan Event Mahasiswa?

Produksi Kuasa Politik Kampus UNS

EDISI KHUSUS XIV/MEI/2026
PRODUKSI KUASA POLITIK KAMPUS UNS

Diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Kentingan UNS

REDAKSI
Gd. Graha UKM UNS Lt. 2
Jl. ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Jebres, Kota Surakarta, 57126

Penerbit: LPM Kentingan UNS
Pelindung: Prof. Dr. dr Hartono, M.Si.
Pembina: Sri Hastjarjo, S.Sos., Ph.D.
Pemimpin Umum: Ilham Nur Arifin
Pemimpin Redaksi: Tiara Nur A'isah
Pemimpin Kesekretariatan: Safnah Setiawati
Pemimpin Pemimpin Perusahaan: Hanifah Rohadhotul Aisy
Pemimpin PSDM: Roseana Agil Safitri
Pemimpin Media: Erlangga Novianto

Redaktur Pelaksana Edisi Khusus: Arulina Firsta Ramadhina, Ghiffara Husna Mabruri
Reporter: Muhammad Aufa Alaudin, Jelita Sekar Nirwana, Maria Daniella, Dzakwan Putra Andrava, Aulia Wulan Ramadhani, Rachel Mutiara Azarine, Safira Jihan Purnomo Putri, Kartika Ragil Maharani, Naira Parahita Nastiti, Wantech Arofiq Huda Firdausyi, Stevani Aqueen Hanyt, Zulfi Khoirunisa, Dzakiya Khairun Nisa, Reva Marantika, Muhammad Raydi Fathi, Usna Ullysabin Rahmadhani, Irawati Febby Ardyanti, Alya Tian Shafara, Jazzika Andini
Riset: Mohamad Nur Rohman, Jihan
Editor Substansi: Arulina Firsta Ramadhina, Tiara Nur A'isah
Editor Ejaan: Muthiara 'Arsy, Fahira Chaerunnisa, Rifda Auliana, Dea Asmara Wardana, Ifni Na'imatunnafs, Natasya Maharani, Novita Dwi Anggraini
PIC Monitoring: Dea Asmara Wardana, Nisa Maftuharturrohmah, Natasya Maharani, Maulana Ilyas, Ifni Na'imatunnafs, Muhammad Hilmi Rosyid Imanuddin, Kharisma Pradewi, Muthiara 'Arsy, Fahira Chaerunnisa
Fotografer: Muhammad Adirama Putra, Editiawan Achmad Pambudi
Ilustrator: Nurul Dyah Anggar Lestari, Fathiya Hafidza, Mecca Ash Shiffasetia Saputra, Toha Elfais
Layouter: Kalila Mulya Martono

“KALAU MEMANG SAUDARA-SAUDARA MERASA TIDAK PERLU SERTAI POLITIK BIARLAH TIDAK USAH BERPOLITIK TETAPI SAUDARA-SAUDARA JANGAN BUTA POLITIK KALAU SAUDARA-SAUDARA BUTA POLITIK, MAKA SAUDARA-SAUDARA AKAN DIMAKAN OLEH POLITIK.”

— MOHAMMAD NATSIR

DAFTAR ISI

07 EDITORIAL
Kampus Sebagai Arena Kontestasi Kuasa

11 LAPORAN KHUSUS I
Miniatur Pemerintahan yang Retak:
Krisis Student Goverment UNS

20 LAPORAN KHUSUS II
Konfigurasi Kuasa ORMEK
dalam Politik Kampus UNS

30 LAPORAN KHUSUS III
Demokrasi Semu dalam Pemilu UNS 2025

42 RISET
Apatisme Mahasiswa UNS
terhadap Politik Mahasiswa Kampus UNS

49 OPINI I

BEM: Badan Event Mahasiswa?

53 OPINI II

Ketika Kritik Tanpa Wajah:
Dilema Akun Anonim di Ruang Kampus

57 RESENSI NOVEL

Kekuasaan, Wacana, dan Apatisme:
Relevansi Politik Kampus dalam Buku 'Animal Farm'
Karya George Orwell (1945)

61 RESENSI MUSIK

Mosi Tidak Percaya:
Dentuman Amarah Melawan Politik Bermasalah

64 WAWANCARA

Rektor UNS: Politik Kampus Sama dengan Politik Negara

71 SOSOK

Komando Ketua KAMMI UNS 2025 dalam Politik Kampus UNS

Ilustrasi: *Nurul Dyah Anggar Lestari*

KAMPUS SEBAGAI ARENA KONTESTASI KUASA

Penulis: Arulina Firsta, Ghiffara Husna Mabruri

Kampus seringkali dianggap sebagai ruang yang netral. Tempat ilmu pengetahuan berdiri di atas segala kepentingan, dan mahasiswa hadir sebagai subjek yang bebas berpikir tanpa intervensi kuasa. Dalam bayangan ideal ini, politik seolah berada di luar pagar akademik, jauh dari ruang kelas, organisasi, dan kehidupan sehari-hari mahasiswa.

Namun, benarkah kampus benar-benar netral?

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Hartono, memandang bahwa politik kampus merupakan serangkaian aktivitas mahasiswa dalam belajar mengelola kekuasaan, mulai dari berorganisasi, menyampaikan aspirasi, hingga memperjuangkan kepentingan (2/3/26). Ia menyatakan, "Politik kampus ini kita maknai istilahnya sebagai suatu serangkaian aktivitas, kegiatan, kemudian juga advokasi di kampus yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pemahaman atau **dengan tujuan belajar mengelola kekuasaan.** Belajar untuk bagaimana mahasiswa itu berorganisasi, menyampaikan aspirasi, kemudian juga bagaimana mahasiswa memperjuangkan kepentingannya, **sama sebenarnya dengan politik negara.** Itu sebenarnya mengelola kekuasaannya untuk tujuan tertentu." Dalam kerangka ini, politik kampus tidak berbeda jauh dengan politik negara. Sama-sama menjadi ruang untuk memahami bagaimana kekuasaan dijalankan dan diarahkan untuk tujuan tertentu.

Lebih jauh, partisipasi dalam politik kampus juga dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan yang lebih luas. Sebagaimana disampaikan oleh Rektor UNS, "Sama dengan ketika bernegara masyarakatnya wajib berpartisipasi aktif dalam perpolitikan kenegaraan, di kampus juga. Bagi saya, bagi kami terutama adalah itu proses pendidikan. Tidak hanya pendidikan berdemokrasi sebenarnya, jadi ini bisa juga digunakan untuk meraih kompetensi yang tidak mudah di bangku kuliah. Ketika kalian belajar, itu sebenarnya yang dituntut adalah kompetensi, *knowledge*, psikomotor, keterampilan, dan *soft skill. Soft skill* itu kemampuan berkomunikasi, memimpin, manajemen, dan mengelola konflik." Namun, pengakuan atas pentingnya politik kampus sebagai ruang belajar tidak serta merta menjadikannya netral.

Realitanya, politik tidak pernah benar-benar absen dari ruang kampus. Ia hadir dalam bentuk yang kerap tidak disadari. Dalam struktur organisasi kemahasiswaan, dalam dinamika pemilihan umum mahasiswa, dalam cara kepemimpinan dibentuk, bahkan dalam keputusan untuk terlibat atau justru menjauh. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum (FH) UNS, Airlangga Surya Nagara (24/2/26), **"Kalau kita bicara organisasi sama politik sebetulnya nggak bisa dilepaskan."** Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa politik kampus tidak pernah berdiri di atas ruang yang homogen. Ia selalu diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan, perbedaan nilai, serta strategi yang dibawa oleh masing-masing aktor. Politik kampus bukan sekadar aksi demonstrasi atau kontestasi elektoral, melainkan keseluruhan proses distribusi kuasa. Siapa yang berbicara, siapa yang didengar, dan siapa yang memilih untuk diam.

Dalam lanskap ini, kampus tidak bisa dipahami hanya sebagai ruang akademik, tetapi juga sebagai **arena kontestasi kuasa.** Politik kampus bukan semata soal benar atau salah, melainkan tentang pertemuan berbagai kepentingan yang saling

bernegosiasi, bersaing, dan terkadang mendominasi. Organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra, badan eksekutif, hingga komunitas-komunitas kecil, semuanya adalah aktor yang bergerak dengan strategi, membawa nilai, dan memperjuangkan pengaruhnya masing-masing. Berbagai kepentingan, nilai, dan strategi berkelindan, membentuk pola-pola kekuasaan yang sering kali berulang dari waktu ke waktu. Pola-pola tersebut berupa dominasi kelompok tertentu, reproduksi kekuasaan dari periode ke periode, serta mekanisme yang secara halus mempertahankan posisi-posisi strategis. Kekuasaan tidak selalu tampil secara kasar, tetapi seringkali bekerja melalui normalisasi. Melalui apa yang dianggap 'biasa', 'sudah seharusnya', atau 'memang dari dulu begitu'.

Dalam konteks yang lebih luas, politik kampus di UNS juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan *student government* sebagai miniatur pemerintahan di tingkat kampus. Secara normatif, sistem ini dirancang sebagai ruang demokrasi 'dari, oleh, dan untuk mahasiswa', yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah organisasi, tetapi juga sebagai instrumen advokasi, representasi, dan kontrol sosial. Namun, berbagai temuan menunjukkan bahwa miniatur tersebut tengah mengalami retakan. Ketimpangan peran antarlembaga, lemahnya fungsi pengawasan dan legislasi, ketiadaan lembaga yudikatif, hingga kaburnya landasan konstitusi menjadi indikasi bahwa sistem yang ada belum berjalan secara utuh. Di tengah meningkatnya kesadaran politik mahasiswa terhadap isu nasional, kondisi ini justru menghadirkan ironi. Ketika mahasiswa aktif mengkritik negara, sistem **"negara kecil"** di dalam kampusnya sendiri masih menyimpan krisis representasi dan legitimasi. Demikian, *student government* tidak lagi hanya dipahami sebagai ruang belajar demokrasi, tetapi juga sebagai arena yang perlu terus dikritisi agar tidak terjebak dalam reproduksi kekuasaan yang sama.

Selain itu, dinamika politik kampus juga tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi mahasiswa ekstra kampus (ormek) yang turut mempengaruhi konfigurasi kekuasaan dalam *student government*. Di satu sisi, ormek memang menjadi ruang pembelajaran politik bagi mahasiswa, khususnya dalam hal kaderisasi, pembentukan karakter kepemimpinan, serta penguatan kemampuan berorganisasi. Di sisi lain, kehadiran ormek juga membawa corak ideologi, nilai, dan strategi politik yang berbeda-beda ke dalam ruang kampus. Dalam praktiknya, hal ini menjadikan politik kampus sebagai arena yang sarat dengan kontestasi kepentingan, bukan sekadar kerja organisasi formal. Sebagaimana disampaikan oleh Airlangga, "Ketika teman-teman berorganisasi minimal secara internal saja teman-teman akan menghadapi yang namanya perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan, baik itu kepentingan misalnya antara orang-orang yang berbeda-beda maupun ada namanya organisasi ekstra kampus. Gerakan-gerakan politik tingkat mahasiswa ada HMI, KAMMI, GMNI, dan PMII. Mereka punya basic ideologi yang berbeda-beda, meskipun semuanya harus meyakini dan tunduk pada Pancasila. Mereka punya basis ajaran yang berbeda-beda, punya doktrinasi yang berbeda-beda, yang detail pernyataannya kan punya perbedaan kepentingan." Dalam konteks ini, kehadiran ormek menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika demokrasi kampus, tetapi tetap perlu dikritisi agar tidak mengarah pada dominasi kelompok tertentu yang berpotensi mempersempit ruang representasi mahasiswa secara lebih luas.

Dalam konteks politik kampus sebagai arena kontestasi kuasa, Pemilu UNS 2025 justru memperlihatkan bagaimana mekanisme demokrasi berjalan secara formal tanpa sepenuhnya menghadirkan pertarungan kekuasaan yang setara. Kehadiran calon tunggal tidak hanya membatasi pilihan, tetapi juga merefleksikan menyempitnya ruang kompetisi dalam perebutan posisi strategis di tingkat mahasiswa. Dalam situasi ini, pemilu tidak lagi sekadar menjadi ruang artikulasi kehendak kolektif, melainkan juga menjadi cermin bagaimana relasi kuasa bekerja. Siapa yang memiliki akses, siapa yang tersisih, dan bagaimana struktur yang ada dapat mereproduksi konfigurasi kekuasaan yang sama dari

waktu ke waktu. Kemunculan kotak kosong hingga rendahnya partisipasi mahasiswa pun dapat dibaca bukan semata sebagai apatisme, melainkan sebagai sinyal adanya ketegangan dalam arena kontestasi tersebut, sehingga sebagian mahasiswa tidak menemukan ruang yang cukup untuk terlibat secara bermakna.

Di sisi lain, fenomena apatisme mahasiswa juga tidak bisa dilihat sebagai sekadar ketidakpedulian individual. Ia adalah bagian dari dinamika politik itu sendiri. Sebuah respons terhadap sistem yang mungkin terasa jauh, tidak representatif, atau bahkan eksklusif. **Dengan kata lain, bahkan ketidakikutsertaan adalah sikap politik.** Memahami politik kampus sebagai arena kontestasi bukan berarti menolaknya. Sebaliknya, ia adalah keniscayaan dalam setiap ruang kolektif. Hal yang menjadi penting adalah bagaimana melihat dan mengkritisinya. Bagaimana kekuasaan direproduksi, bagaimana ia dipertahankan, dan siapa saja yang diuntungkan atau justru tersisihkan dalam proses tersebut.

Di tengah dinamika tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kampus memposisikan mahasiswa. Sebagai subjek kritis atau sekadar objek administratif? Rektor UNS memandang bahwa mahasiswa tidak hanya ditempatkan sebagai objek administrasi, melainkan didorong untuk berkembang melalui organisasi sebagai ruang penguatan *soft skill*. “Saya memandang bahwa mahasiswa tidak hanya objek administrasi tetapi juga kita dorong supaya bisa mengembangkan *soft skill* dengan organisasi sebagai salah satu media. Kami tidak mengekang kalau mereka itu kritis, sudut pandang kami agak berbeda barangkali. Kami menganggap mahasiswa itu sebagai hubungan orang tua-anak, guru-murid, juga mitra. Tugas kami memang mendampingi kalian untuk mencapai kompetensi,” tutur Hartono.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Dosen Hukum Tata Negara FH UNS yang melihat bahwa dalam praktiknya mahasiswa masih cenderung dikelola secara administratif. “Kalau saya lebih cenderung dikelola secara administratif. Tidak hanya di UNS, pendidikan di Indonesia semua itu mengelola mahasiswa sebagai subjek administratif,” jelasnya. Perbedaan perspektif ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas kampus sebagai ruang pembentukan subjek kritis dan realitas tata kelola yang masih bertumpu pada logika administratif, yang pada akhirnya turut memengaruhi bagaimana mahasiswa berpartisipasi dalam arena politik kampus. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar muncul.

Apakah mahasiswa benar-benar menjadi subjek dalam politik kampus, atau justru hanya objek dari dinamika yang berjalan di atas mereka?

Editorial ini tidak bermaksud menempatkan politik kampus sebagai sesuatu yang semata-mata negatif. Sebaliknya, ia adalah keniscayaan. Setiap ruang kolektif termasuk kampus akan selalu diwarnai oleh relasi kuasa. Hal yang menjadi persoalan bukanlah keberadaan politik itu sendiri, melainkan bagaimana ia dijalankan. Apakah ia membuka ruang partisipasi yang bermakna, atau justru menciptakan jarak antara mahasiswa dan proses yang mengatasnamakan mereka?

Edisi Khusus XIV ini hadir sebagai upaya untuk membaca kembali politik kampus secara lebih jernih. Bukan untuk memberikan jawaban tunggal, melainkan untuk membongkar asumsi-asumsi yang selama ini diterima begitu saja; bahwa kampus adalah ruang yang sepenuhnya netral; bahwa demokrasi mahasiswa selalu berjalan sebagaimana mestinya; atau bahwa diam adalah posisi yang bebas dari kepentingan.

Dalam upaya tersebut, berbagai lapisan dalam politik kampus coba dihadirkan secara lebih menyeluruh. Tidak hanya pada panggung yang punya sorotan yang besar, seperti pemilihan umum mahasiswa atau dinamika lembaga kemahasiswaan, tetapi juga pada ruang-ruang yang sering luput dari perhatian yaitu relasi informal, pola kaderisasi, distribusi akses, hingga pengalaman mahasiswa yang berada di luar lingkaran kekuasaan.

Ilustrasi: *Nurul Dyah Anggar Lestari*

MINIATUR PEMERINTAHAN YANG RETAK: KRISIS STUDENT GOVERNMENT UNS

Penulis: Muhammad Aufa Alaudin, Jelita Sekar Nirwana, Maria Daniella Putri Nugroho

Pada era rezim Prabowo–Gibran yang tercatat memberangus 'mahasiswa' menjadi tahanan politik pasca aksi Agustus–September 2025, isu politik kampus di Universitas Sebelas Maret (UNS) menjadi agenda genting pula untuk dievaluasi strukturnya. Mengapa demikian, sebab para pembuat keputusan di jajaran *student government* UNS seharusnya tak tebang pilih, selayaknya orasi yang membara saat aksi-aksi bernegara, bahwa politik yang dalam bahasan ini menyangkut kampus bukanlah wadah keterampilan pribadi semata, melainkan menanggung kemaslahatan mahasiswanya. Munculnya gerakan coblos kotak kosong atas pemilihan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa 2026 menjadi gejolak yang perlu dipertanyakan. Betulkah rendahnya minat mahasiswa sebagai partisipan tidak sama dengan krisis, tetapi justru mahalnya pemahaman politik kampus yang enggan dievaluasi di tengah kegentingan yang menghimpit mahasiswa?

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Pasal 2 menyatakan bahwa *"Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa."* Pasal tersebut mendorong mahasiswa untuk menciptakan lingkungan akademis yang bersifat konstruktif, sinergis, dan demokratis agar dapat memperjuangkan kepentingan mahasiswa itu sendiri. Tuntutan tersebut diwujudkan dalam sebuah sistem lembaga pemerintahan mahasiswa atau *student government* yang memegang prinsip moralitas, intelektualitas, politis, independen, dan sejajar. Kelembagaan ini diharapkan dapat menjadi manifestasi sistem demokrasi di tingkat perguruan tinggi berdasarkan moral dan intelektual yang kuat.

UNS juga memiliki sistem *student government* sebagai upaya mewujudkan miniatur pemerintahan demokratis di lingkungan kampus. Menurut pernyataan Airlangga Surya Nagara selaku Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum (FH) UNS, tujuan *student government* UNS secara internal adalah untuk memberikan advokasi kepada mahasiswa terkait dengan kebijakan kampus, menjadi saluran penyampaian aspirasi mahasiswa ke pihak kampus, serta memberikan kaderisasi politik dan kaderisasi organisasi. Selain itu, terdapat pula tujuan secara eksternal untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat, dan sebagai kontrol terhadap pemimpin. "Secara internal, memberikan advokasi kepada temanteman mahasiswa terkait dengan kebijakan kampus, juga sebagai saluran untuk menyampaikan termasuk pers menyampaikan ke pihak kampus apa aspirasi mahasiswa. Kemudian, secara eksternal, organisasi kemahasiswaan itu mempunyai tujuan-tujuan untuk melakukan pengajian kepada masyarakat. Jadi, harus bisa membenahi masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat, dan sebagai kontrol, itu menurut saya," ujarnya ketika diwawancarai (24/2/2026).

Adapun pernyataan Fauzan Abdillah, Menteri Koordinator Pengetahuan dan Pergerakan BEM UNS 2025, ketika diwawancarai (4/3/2026) mengenai hubungan *student government* UNS dengan birokrasi kampus. "Pertama, hubungan strategis sebagai mitra, nanti butuh apa-apa ya harus ke birokrat. Entah sesimpel mungkin SIK (Surat Izin Kegiatan) atau mungkin nanti pengajuan dan lain sebagainya kan tetap dari internal birokrat. Kedua, terkait dengan kemitraan kritis karena kami terikat fungsi untuk *social control.* Ketika birokrat ini arahnya sudah mulai nggak benar

Foto: *Ilham Nur Arifin*

atau menyeleweng, sudah mulai jauh daripada kesejahteraan mahasiswa, ya perlu kami ingatkan." Pernyataan Fauzan dapat menjadi penanda bahwa posisi *student government* ini cukup strategis dalam mewakili kepentingan mahasiswa. Hubungan kemitraan yang mengikat masih bisa dibarengi dengan fungsi kontrol sosial yang kuat. Dengan demikian, *student government* UNS menunjukkan keberpihakan pada kepentingan mahasiswa dan masyarakat yang tidak berorientasi pada kekuasaan serta tidak dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu.

Namun, jika mengacu pada konsep *trias politica* oleh Montesquieu yang menjadi prinsip fundamental berjalannya demokrasi modern, struktur pemisahan kekuasaan pemerintahan *student government* UNS hanya meliputi dua lembaga, yaitu Dewan Mahasiswa (DEMA) sebagai legislatif dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai eksekutif dengan relasi kekuasaan saling mengawasi. Sementara itu, struktur *student government* UNS pada masa ini belum memiliki lembaga yudikatif atau Mahkamah Mahasiswa yang berdiri sendiri. Hal ini menyebabkan suatu kekosongan lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi yudikatif, menyelesaikan sengketa antarlembaga maha-

siswa, dan menyelesaikan sengketa pemilihan umum (pemilu) mahasiswa.

Beberapa isu lain juga patut menjadi perhatian, yakni kurangnya landasan konstitusi di dalam *student government* UNS. Salah satunya adalah ketiadaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DEMA dan BEM yang lembaga-lembaga tersebut masih menginduk pada AD/ART Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UNS. Isu lain juga terkait dugaan bahwa tidak semua sumber daya manusia di dalamnya memahami landasan konstitusi yang sudah ada serta pelaksanaan program kerja yang lebih dianggap sebagai penggugur kewajiban daripada penyelesaian masalah. Isu-isu tersebut kemudian membentuk suatu pemahaman bahwa keberjalanan *student government* UNS saat ini belum menyentuh kata ideal dan belum berhasil mewujudkan sistem pemerintahan demokratis yang benar-benar hidup. Alangkah baiknya jika dilakukan pembenahan dari segi struktur dan konstitusi serta pemaksimalan fungsi tiap-tiap organ di dalamnya untuk mewujudkan *student government* UNS yang lebih baik di masa depan.

Krisis Representasi dan Legitimasi BEM UNS

Secara bentuk norma, BEM UNS berperan sebagai lembaga eksekutif yang memiliki fungsi utama dalam melaksanakan kebijakan yang disepakati bersama untuk mewakili kepentingan mahasiswa dalam ruang advokasi. Fauzan Abdillah menyampaikan bahwa fungsi BEM dapat dibagi menjadi tiga peran utama, yaitu fungsi advokasi yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi mahasiswa kepada pihak kampus, fungsi sosial yang mencakup pengawasan terhadap kebijakan kampus dan kebijakan nasional yang berdampak pada mahasiswa, serta fungsi pengembangan mahasiswa yang berperan dalam memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa. “Sebenarnya, fungsi BEM secara garis besar sebenarnya mewakili mahasiswa secara umum, cuman kalau bicara terkait dengan segmen. Sebenarnya, segmen yang pertama adalah fungsi advokasi karena mau nggak mau akhirnya penyampaian apa pun secara legal harus diwadahi. Kedua, ada fungsi terkait dengan *social control* yang mana ini lebih kepada fungsi-fungsi pengawasan kebijakan, entah mengawasi kebijakan kampus, mengawasi kebijakan daerah, ataupun mengawasi kebijakan nasional. Terus yang ketiga, fungsi pengembangan karena mau ng-

gak mau wadah eksekutif ini akhirnya juga perlu mewadahi minat, bakat, juga kebutuhan mahasiswa secara umum," jelas Fauzan.

Namun, jika merujuk pada ketentuan formal dalam AD/ART KBM UNS, tugas BEM UNS justru dirumuskan secara lebih sempit dan administratif. Dalam aturan tersebut, BEM UNS memiliki tugas: (1) menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan GBHO BEM UNS serta rekomendasi SU dan/atau SI DEMA UNS, (2) menyampaikan progress report kepada DEMA UNS minimal dua kali dalam satu periode kepengurusan, (3) menjalin kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal UNS, serta (4) memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan/atau masyarakat.

Rumusan tugas tersebut menunjukkan bahwa orientasi kerja BEM secara normatif lebih ditekankan pada pelaksanaan program dan relasi kelembagaan, sementara aspek mekanisme representasi dan pertanggungjawaban publik kepada mahasiswa tidak diatur secara eksplisit. Kekosongan ini menjadi titik krusial dalam membaca krisis representasi yang terjadi. Oleh karena AD/ART KBM UNS hanya mengatur BEM dalam kerangka yang terbatas, kebutuhan untuk menghadirkan AD/ART khusus BEM UNS menjadi semakin mendesak. Tanpa adanya pengaturan internal yang lebih rinci, kejelasan mengenai tugas, fungsi, batas kewenangan, serta mekanisme akuntabilitas BEM akan terus berada dalam wilayah abu-abu.

Dampak paling buruknya tentu menimbulkan kekaburan kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi eksekutif. Tanpa pedoman yang jelas, batasan kewenangan, dan mekanisme kerja BEM dinilai kurang terstruktur secara formal. Fauzan Abdillah menyebutkan bahwa sampai saat ini BEM UNS tidak memiliki forum formal untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan kepada mahasiswa. Pada umumnya, pertanggungjawaban hanya disampaikan kepada internal dan DEMA sebagai lembaga legislatif. Jika kondisi tersebut tidak diseriusi untuk evaluasi, hal ini berpotensi mematikan mekanisme kontrol publik terhadap kinerja lembaga eksekutif mahasiswa. Akhirnya, BEM UNS sebagai salah satu lembaga dalam jajaran utama *student government* dapat dengan mudah memoles desain laporan kinerja tanpa adanya transparansi data yang jelas. Kondisi ini turut berimplikasi pada menurunnya partisipasi mahasiswa dalam proses demokrasi kampus.

Di sisi lain, data Pemilihan Umum (Pemilu) UNS 2025, menunjukkan jumlah pemilih eksekutif hanya mencapai 2.406 mahasiswa dari total lebih dari 40.000 mahasiswa UNS, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 4.867 partisipan. Fenomena tersebut menunjukkan rendahnya kepedulian mahasiswa terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa. Lebih lanjut, fenomena rendahnya partisipasi juga dapat dibaca sebagai manifestasi dari apatisme maupun kekecewaan mahasiswa terhadap sistem yang ada. Dalam konteks ini, problem representasi BEM tidak lagi hanya soal kinerja internal, tetapi juga menyentuh persoalan legitimasi di mata mahasiswa. Ketika mahasiswa tidak merasa terwakili, partisipasi akan menurun dan pada akhirnya melemahkan fondasi demokrasi dalam *student government* itu sendiri.

Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan Presiden BEM UNS 2026, M. Kailani Rizqi Pratama, "Cukup banyak organisasi-organisasi yang menjalankan program kerja hanya sebagai penggugur kewajiban saja, bukan sebagai penyelesaian masalah. Kalau melihat secara minat dari organisasi itu sendiri, melihat per hari ini data demografi cukup menunjukkan adanya penurunan minat terhadap *student government* itu sendiri," ungkapnya ketika diwawancarai (5/3/2026). Adanya penurunan minat terhadap partisipasi *student government* di UNS dapat menjadi perhatian serius bagi BEM UNS, salah satunya untuk kembali membuka mata mahasiswa bahwa *student government* adalah bagian dari keberjalanan sebagai seorang mahasiswa. Namun, langkah fundamental seperti fiksasi AD/ART yang menjadi penentu transparansi yang dipertanggungjawabkan juga rupanya tidak dipandang sebagai suatu hal yang mendesak.

Lemahnya Pengawasan dan Fungsi Legislasi DEMA UNS

Secara konsep, DEMA UNS memiliki fungsi sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi untuk membentuk regulasi kemahasiswaan dan pengawasan terhadap kinerja BEM sebagai lembaga eksekutif. M. Naufal Eka Putra selaku Ketua DEMA UNS 2026 (3/3/2026) menyampaikan secara formal bahwa DEMA memiliki fungsi legislatif berupa pengawasan dan kontrol kerja terhadap kebijakan eksekutif. Dalam pelaksanaannya, DEMA sebenarnya telah memiliki desain mekanisme pengawasan, baik yang bersifat terencana maupun insidental. Naufal menjelaskan, "Jadi, di DEMA itu ada beberapa mekanisme pengawasan. Pengawasan yang direncanakan dan juga pengawasan yang sifatnya insidental. Hal yang kami rencanakan itu satu periode dilaksanakan tiga kali idealnya. Jadi nanti sifatnya seperti mereka memaparkan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) ke kami terkait apa yang sudah mereka wacanakan di awal dan yang sudah mereka laksanakan. Untuk pengawasan yang sifatnya insidental, itu ketika ada aduan atau laporan yang masuk ke DEMA UNS, terkait misal masalah yang terjadi di tubuh BEM." Namun demikian, mekanisme ini belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas kontrol, terutama ketika tidak diiringi dengan kewenangan yang kuat.

Ia juga mengakui adanya ketimpangan dalam praktik relasi antarlembaga. "Lembaga mahasiswa yang ada di sini itu eksekutif dan legislatif, tapi dalam keberjalanannya terkadang lembaga eksekutif ini lebih dominan kerjanya daripada legislatif itu sendiri," ungkap Naufal. Secara normatif, Pasal 28 dan Pasal 29 UU KBM No. 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Badan Eksekutif Mahasiswa UNS menyebutkan bahwa DEMA memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada BEM apabila ditemukan pelanggaran. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, pemotongan nilai kinerja BEM UNS, dan/atau pemberhentian Presiden BEM UNS. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan.

M. Zainal Abidin sebagai Anggota DEMA UNS 2026 menyampaikan (6/3/2026), "Kalau memang ada keanehan atau pelanggaran dalam pelaksanaan proker, seharusnya ada mekanisme yang mana kami (DEMA) bisa mengaudit anggaran, tetapi memang karena DEMA dalam kapasitas sekarang masih belum bisa 'melampaui' BEM, itu masih belum terjadi." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat kewenangan secara normatif, implementasi pengawasan DEMA belum berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek pengawasan yang bersifat substantif. Keterbatasan tersebut juga diakui oleh Naufal yang menyoroti aspek otoritas kelembagaan. "Sebenarnya kalau bicara otoritas, apa yang kurasakan kemarin otoritas DEMA sebagai lembaga pengawas itu sebenarnya tidak sebesar itu. Di DEMA pun walaupun memiliki fungsi pengawasan dan fungsi kontrol, ketika ada pelanggaran yang sifatnya tidak diatur dalam AD/ART, kami tidak bisa mengambil langkah lebih lanjut," tuturnya lagi.

Keterbatasan tersebut tidak hanya berdampak pada lemahnya fungsi kontrol, tetapi juga berimplikasi pada relasi kekuasaan antarlembaga dalam *student government*. Airlangga Surya Nagara, menyampaikan bahwa secara teoretis, ketimpangan peran antarlembaga akan memengaruhi distribusi kekuasaan. "Kalau ada salah satu organisasi itu timpang, lebih lemah, tentu satu organisasi yang lain pasti akan lebih mendominasi itu secara teoretis. Jadi, kalau misalnya DEMA kurang aktif, ya tentu BEM akan jauh lebih dominan," ungkapnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya peran legislatif berpotensi menciptakan dominasi eksekutif sehingga prinsip *checks and balances* dalam *student government* tidak berjalan secara seimbang.

Selain fungsi pengawasan, fungsi legislasi DEMA juga dinilai belum berjalan optimal. Naufal mengakui bahwa capaian produk hukum masih terbatas. "Fungsi DEMA ada tiga, yaitu aspirasi, pengawasan, dan legislasi. Kadang kami belum bisa menjalankan semua fungsi itu secara ideal. Contoh, di fungsi legislasi itu produk hukum yang dikeluarkan oleh DEMA UNS itu nggak lebih dari

lima sampai sekarang, yang berlaku. Ada banyak hal yang seharusnya diatur, tapi belum ada regulasi yang mengatur." Sebagai upaya perbaikan, pada awal periode kepemimpinannya, DEMA UNS mengaku mewacanakan agenda legislasi melalui Program Legislasi Kampus (Prolekam). "Nah, aku mencoba untuk awal periode ini menyusun yang terkait UU FORKOM, UU Kaderisasi Mahasiswa, dan ada wacana terkait revisi UU Pemilu. Di periodeku untuk penyusunan Prolekam sementara baru tiga itu. Nanti kami juga bakal ajak pendapat ke mahasiswa terkait UU apa yang seharusnya dikeluarkan oleh DEMA UNS ke depannya," ucap Zainal.

Namun demikian, jumlah dan cakupan produk legislasi tersebut masih dinilai belum memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan regulasi yang terus berkembang dalam dinamika organisasi kemahasiswaan. Keterbatasan ini mengindikasikan bahwa fungsi legislasi DEMA belum mampu merespons kebutuhan secara komprehensif, yang pada akhirnya berpotensi menghambat penguatan sistem kelembagaan ***student government*** di UNS.

Ketiadaan Mahkamah Mahasiswa Sebagai Lembaga Yudikatif

Salah satu kelemahan utama dalam sistem *student government* UNS adalah ketiadaan lembaga yudikatif formal seperti Mahkamah Mahasiswa. Padahal, dalam konsep pemerintahan demokratis, lembaga yudikatif berperan penting dalam menguji peraturan mahasiswa terhadap konstitusi mahasiswa, menyelesaikan sengketa antarlembaga mahasiswa, dan menyelesaikan sengketa pemilu mahasiswa. Fauzan Abdillah menyampaikan bahwa dalam salah satu regulasi yang pernah diterbitkan pada tahun 2013 sempat terdapat ketentuan mengenai Mahkamah Mahasiswa yang memiliki fungsi dalam mekanisme *impeachment*. "Aku coba sambil *flashback* dari peraturan-peraturan yang disahkan oleh DEMA dan dirilis oleh DEMA sebelum-sebelumnya. Sebenarnya di tahun 2013 itu ada. Di salah satu peraturan yang dirilis ada di sana dicantumkan terkait dengan Mahkamah Mahasiswa untuk fungsi impeachment," ujar Fauzan. Namun, ketentuan tersebut tidak lagi diterapkan dalam struktur kelembagaan saat ini.

Di sisi lain, Presiden BEM UNS 2026, Kailani, berpendapat bahwa ketiadaan lembaga yudikatif dalam *student government* tidak menjadi masalah karena beberapa fungsi penyelesaian konflik mahasiswa saat ini ditangani oleh lembaga universitas, seperti penanganan kasus kekerasan yang ditangani oleh Satgas PPKS (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual). "Pandanganku saat ini ya di UNS sendiri kami melihat tidak adanya lembaga yudikatif bukan jadi satu permasalahan, yang menurutku nggak perlu begitu diseriusi karena kami melihat juga stakeholder dari kampus itu juga ada," tutur Kailani saat diwawancarai (5/3/2026). Ia menambahkan, "Memang secara teori rasional kalau dengan adanya lembaga yudikatif itu bisa dibilang dari sisi perspektif etika itu kurang. Pada akhirnya, ya mahasiswa masa menghukum mahasiswa, dan memang banyak *conflict of interest* di sini. Mangkanya, lembaga yudikatifnya mahasiswa kenapa tidak ada, karena memang secara realistis dan secara etis untuk per hari ini, itu memang perlu dipegang oleh *stakeholder* terkait."

Namun demikian, fungsi yang dimaksud oleh Presiden BEM UNS 2026 tersebut berada dalam ranah yang berbeda dan bukanlah peran lembaga yudikatif dalam *student government* yang dimaksud. Mahkamah Mahasiswa secara konseptual tidak ditujukan untuk menangani kasus-kasus administratif atau disipliner seperti kekerasan seksual, melainkan memiliki fungsi dalam menguji kesesuaian peraturan terhadap konstitusi mahasiswa, menyelesaikan sengketa antarlembaga mahasiswa, serta menangani sengketa dalam pemilihan umum mahasiswa. Dengan demikian, keberadaan mekanisme penanganan oleh institusi kampus tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran lembaga yudikatif dalam sistem *student government*. Perbedaan fungsi ini menunjukkan bahwa ketiadaan Mahkamah Mahasiswa tetap menyisakan kekosongan dalam aspek penegakan hukum dan penyelesaian

sengketa kelembagaan di tingkat mahasiswa.

Status Abu-Abu FORKOM UNS

Selain langkah kaki lembaga formal yang menjelajahi dinamika politik mahasiswa, Forum Komunikasi (FORKOM) juga berperan dalam *student government* UNS. Pada awalnya, FORKOM dibentuk sebagai wadah komunikasi mahasiswa tingkat universitas. Memiliki tujuan untuk mempertemukan berbagai komunitas dan organisasi dalam membahas isu-isu kemahasiswaan. FORKOM juga terlibat dalam bentuk kegiatan mahasiswa salah satunya adalah Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Meskipun terlibat penuh atas kegiatan tersebut, status kelembagaan FORKOM masih menjadi pertanyaan. Salah satu kritik utama terhadap FORKOM adalah terkait status abu-abu dan ketiadaan dasar hukum yang jelas di dalam struktur *student government*. Sampai saat ini, belum ada regulasi yang mengatur secara eksplisit kedudukan dan kewenangan FORKOM dalam sistem organisasi mahasiswa. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan konflik karena FORKOM memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan pada kegiatan mahasiswa, tetapi tidak memiliki legitimasi hukum yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga formal seperti BEM dan DEMA.

Hal ini juga diakui oleh M. Naufal Eka Putra yang menyoroti adanya tumpang tindih peran antara FORKOM dan lembaga formal. “Kemarin sempat ada *overlap* dengan FORKOM. Sebenarnya mereka sebagai wadah komunikasi tiap UKM dan ORMAWA tingkat universitas, cuman legal standing-nya masih perlu ditanyakan karena mereka sudah banyak memegang hajat rektorat atau universitas. Contohnya, PKKMB dan mungkin *event-event* lain yang mereka sudah punya andil di situ, tapi mereka secara *legal standing* masih belum ada regulasi yang mengatur,” jelasnya. Di sisi lain, pengaruh yang dimiliki FORKOM tanpa landasan kelembagaan yang tegas juga membuka ruang bagi praktik kekuasaan tanpa mekanisme akuntabilitas yang terstruktur. Ketika suatu aktor memiliki kapasitas untuk memengaruhi keputusan tanpa diikat oleh aturan yang jelas, maka potensi penyalahgunaan wewenang atau setidaknya ketidaktransparanan menjadi semakin besar. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi FORKOM dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika posisinya tidak diatur secara formal dalam struktur *student government.*

Selain itu, minimnya jejak aktivitas publik FORKOM juga menjadi sorotan. Berdasarkan penelusuran, akun Instagram resmi FORKOM UNS terakhir kali aktif pada tahun 2020, yang menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi aktivitas dan transparansi kepada mahasiswa. Namun demikian, keberadaan FORKOM sebagai wadah komunikasi lintas organisasi juga menunjukkan adanya kebutuhan akan ruang koordinasi yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh lembaga formal. Oleh karena itu, kejelasan status dan dasar hukum FORKOM menjadi penting untuk memastikan peran dan kewenangannya berjalan secara akuntabel.

Lembaga Pers Mahasiswa yang Krisis Membaca

Sistem demokrasi mahasiswa yang terjadi saat ini menjadikan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) atau unit kerja mahasiswa jurnalistik di UNS memiliki peran penting sebagai pemberi informasi sekaligus pengawas atau *watchdog* terhadap dinamika kampus UNS, terkhususnya *student government.* Posisi LPM dalam *student government* UNS juga tidak berada dalam lingkaran eksekutif dan legislatif yang menjadikan perannya lebih independen sebagai pengawas.

Realitasnya, yang menyandang sebutan ‘pengawas’ juga tak luput dari adanya krisis di dalam tubuhnya. Pers Mahasiswa di UNS kini, baik di lingkup fakultas maupun universitas semakin menurun performanya. Hal tersebut dibuktikan dari unggahan-unggahan berita yang kurang representatif. Di sisi lain, kemunculan akun-akun anonim yang rentan pertanggungjawabannya justru lebih kritis menjawab problematika mahasiswa. Padahal, pers mahasiswa seharusnya memiliki nilai lebih dalam hal keakuratan

data dibandingkan akun anonim yang rentan akuntabilitasnya.

Pada Desember 2025 lalu, kritik terhadap pers mahasiswa banyak muncul ke permukaan, dominasinya menggiring pembaca mengamini bubarnya pers mahasiswa. Hal tersebut mendapat respons dari pers mahasiswa Pabelan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan artikel berjudul *Jangan Buru-buru Mengaminkan Bubarnya Pers Mahasiswa* yang diunggah di kompasiana.com. Polemik tersebut juga menjadi catatan bagi pers mahasiswa di UNS untuk lebih relevan dan kritis 'membaca' fenomena yang terjadi di kampus, terkhususnya pembahasan terkait krisis *student government* di UNS yang saat ini tengah dibahas.

Menelisik Konstitusi Politik Kampus UNS

Sebagai miniatur pemerintahan di lingkungan kampus, *student government* seharusnya bertumpu pada konstitusi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan mengikat. Konstitusi dalam hal ini bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan fondasi yang mengatur relasi kekuasaan, distribusi kewenangan, serta mekanisme kontrol antarlembaga. Namun, dalam konteks Universitas Sebelas Maret (UNS), persoalan yang muncul tidak lagi sekadar terletak pada kelemahan masing-masing lembaga, melainkan pada tidak berfungsinya konstitusi sebagai sistem pengatur secara menyeluruh.

Dalam perspektif Montesquieu melalui karyanya *De l'esprit des lois*, struktur konstitusi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik masyarakatnya. Artinya, konstitusi tidak dapat berdiri sebagai teks yang kaku, melainkan harus mampu beradaptasi dengan dinamika yang berkembang. Dalam konteks UNS, kerangka konstitusi yang ada tampak belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil mahasiswa. Berbagai dinamika kelembagaan, mulai dari ketimpangan relasi antarlembaga, lemahnya fungsi pengawasan, hingga munculnya aktor nonformal, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain normatif dengan praktik sosial yang berjalan.

Lebih jauh, kondisi ini dapat dibaca melalui pandangan Karl Loewenstein yang menyatakan bahwa konstitusi tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai ***living political reality***. Dalam kerangka tersebut, konstitusi dikatakan efektif apabila benar-benar hidup dan dijalankan dalam praktik politik sehari-hari. Namun, dalam ***student government*** UNS, konstitusi cenderung berhenti pada tataran formalitas. Aturan-aturan yang ada belum sepenuhnya menjadi pedoman utama dalam menjalankan fungsi kelembagaan, sehingga praktik organisasi sering kali berjalan berdasarkan kebiasaan, kebutuhan situasional, atau bahkan dominasi aktor tertentu.

Permasalahan ini semakin diperparah oleh keterbatasan akses terhadap dokumen konstitusi itu sendiri. Berdasarkan penelusuran, mahasiswa tidak dengan mudah memperoleh atau mengakses aturan-aturan seperti UU KBM, AD/ART, atau regulasi lainnya. Kondisi ini menciptakan kesenjangan pengetahuan di antara mahasiswa dan secara langsung melemahkan partisipasi serta kontrol publik. Dalam sistem demokrasi, akses terhadap hukum merupakan prasyarat utama bagi terciptanya akuntabilitas. Ketika aturan tidak dapat diakses, maka kekuasaan berpotensi berjalan tanpa pengawasan yang memadai. Di sisi lain, struktur konstitusi yang ada juga masih menyisakan berbagai kekosongan. Ketiadaan AD/ART khusus bagi lembaga eksekutif, tidak hadirnya lembaga yudikatif yang independen, serta belum adanya regulasi yang mengatur aktor nonformal seperti FORKOM menunjukkan bahwa sistem hukum dalam *student government* UNS belum terbentuk secara utuh. Kekosongan ini menciptakan ruang abu-abu dalam praktik kekuasaan, di mana batas kewenangan menjadi kabur dan

legitimasi keputusan dapat dipertanyakan.

Menanggapi kebutuhan pembenahan sistem tersebut, Airlangga Surya Nagara menekankan pentingnya peran lembaga legislatif dalam reformasi konstitusi. “Untuk konstitusi ada (keperluan reformasi), ya. Makanya kalau mau merombak itu ya harus dengan mengaktifkan lagi DEMA,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penguatan fungsi legislatif menjadi kunci dalam mendorong pembaruan konstitusi, sekaligus menghidupkan kembali peran DEMA sebagai aktor utama dalam pembentukan dan penataan sistem hukum kemahasiswaan. Dengan demikian, persoalan konstitusi dalam *student government* UNS tidak dapat dipahami sebagai masalah teknis semata, melainkan sebagai persoalan struktural yang memengaruhi keseluruhan sistem demokrasi mahasiswa. Pembenahan tidak cukup dilakukan pada level lembaga, tetapi harus dimulai dari penguatan fondasi konstitusional itu sendiri, baik melalui pembentukan regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan aksesibilitas dokumen hukum, maupun penegasan mekanisme penegakan dan pengawasan. Tanpa itu, konstitusi akan terus berada dalam posisi sebagai teks yang ada, tetapi tidak pernah benar-benar hidup.

Mengembalikan Makna ‘Dari, Oleh, dan untuk Mahasiswa’

Pada akhirnya, *student government* UNS sebagai miniatur pemerintahan tidak berhenti pada simbol dan struktur formal semata. Ia dituntut untuk benar-benar menghadirkan praktik demokrasi yang hidup, yaitu representasi berjalan, pengawasan berfungsi, konstitusi menjadi pedoman, dan kekuasaan tidak terpusat pada satu titik. Namun, berbagai temuan dalam laporan ini menunjukkan bahwa sistem yang ada masih jauh dari ideal tersebut. Ketimpangan peran antarlembaga, lemahnya fungsi legislasi dan pengawasan, ketiadaan lembaga yudikatif, hingga kaburnya landasan konstitusi menjadi indikator bahwa demokrasi mahasiswa di UNS belum sepenuhnya berjalan secara utuh. Bahkan, ketika akses terhadap aturan saja masih sulit dijangkau oleh mahasiswa, partisipasi yang bermakna pun menjadi semakin jauh dari kenyataan.

Di tengah meningkatnya kesadaran politik mahasiswa, kondisi ini justru menghadirkan ironi. Mahasiswa aktif mengkritik negara, tetapi pada saat yang sama, sistem “negara kecil” di kampusnya sendiri masih menyimpan banyak persoalan mendasar. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin krisis kepercayaan terhadap *student government* akan semakin dalam. Oleh karena itu, pembenahan tidak bisa lagi ditunda. Penguatan fungsi legislatif DEMA, pembentukan landasan konstitusi yang jelas, kehadiran lembaga yudikatif, serta transparansi akses terhadap regulasi menjadi langkah mendesak yang perlu dilakukan. Lebih dari itu, seluruh elemen mahasiswa perlu kembali merebut makna “dari, oleh, dan untuk mahasiswa” agar *student government* tidak sekadar menjadi struktur kekuasaan, melainkan benar-benar menjadi ruang demokrasi yang hidup, kritis, dan berpihak pada kepentingan bersama.

Sejalan dengan itu, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS mengingatkan pentingnya kembali pada tujuan awal pembentukan organisasi mahasiswa. “Ingatkan lagi tujuan awal pembentukannya, untuk kepentingan mahasiswa sendiri dan untuk kepentingan rakyat. Kita harus sadar tujuan organisasi mahasiswa apa. Untuk kita sendiri, untuk mahasiswa sendiri. Pertama untuk kepentingan dia sebagai mahasiswa dan yang kedua punya tugas mandat dari rakyat untuk kepentingan rakyat. Kita harus kembali ke situ,” ucapnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa *student government* bukan sekadar arena kekuasaan, melainkan ruang pengabdian yang harus tetap berpijak pada kepentingan mahasiswa dan masyarakat luas.

Ilustrasi: *Toha Elfais*

KONFIGURASI KUASA ORMEK DALAM POLITIK KAMPUS UNS

Penulis: Dzakwan Putra Andrava, Rachel Mutiara Azarine, Aulia Wulan Ramadhani

Dalam dinamika politik kampus di Universitas Sebelas Maret (UNS), kontestasi *student government* melalui pemilihan umum (pemilu) mahasiswa tidak pernah berdiri sendiri. Di balik proses elektoral yang tampak formal, terdapat berbagai aktor yang turut memengaruhi arah dan dinamika kekuasaan, baik dari dalam maupun luar struktur resmi kampus. Selain organisasi intra kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Mahasiswa (DEMA) yang memiliki legitimasi formal, organisasi mahasiswa ekstra kampus (ormek) juga hadir sebagai kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Berbeda dengan BEM dan DEMA yang diatur dalam kerangka institusional kampus di bawah Peraturan Rektor UNS Nomor 26 Tahun 2020, ormek bergerak secara independen di luar struktur formal perguruan tinggi. Posisi ini membuat ormek memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel, baik dalam membangun kaderisasi, menyusun strategi, maupun terlibat dalam dinamika politik kampus. Dalam praktiknya,

kehadiran ormek tidak hanya berkaitan dengan aktivitas organisasi, tetapi juga bersinggungan langsung dengan proses kontestasi, distribusi pengaruh, hingga pembentukan kepemimpinan dalam *student government*.

Salah satu fondasi utama pergerakan ormek terletak pada proses kaderisasi, baik melalui jalur terstruktur seperti *open recruitment* maupun pendekatan personal. Selain itu, aktivitas diskusi dan kajian menjadi sarana penting dalam membentuk kapasitas intelektual kader, yang kemudian berperan dalam berbagai ruang, termasuk politik kampus. Di sisi lain, ormek juga menjalankan fungsi advokasi terhadap isu sosial dan kebangsaan, menjadikannya tidak hanya sebagai ruang internal organisasi, tetapi juga sebagai aktor dalam merespons persoalan yang lebih luas. Namun demikian, keterlibatan tersebut tidak selalu dipandang positif oleh mahasiswa. Di tengah menurunnya partisipasi organisasi, ormek kerap diasosiasikan dengan kepentingan politik tertentu, bahkan disamakan dengan "partai politik" dalam konteks pemilu kampus. Persepsi ini menunjukkan adanya jarak antara peran yang dijalankan ormek dan cara mahasiswa memaknainya. Kondisi tersebut menempatkan ormek dalam posisi yang kompleks dalam dinamika politik kampus UNS. Untuk memahami peran dan pengaruhnya secara lebih utuh, penting untuk terlebih dahulu mengenali karakter, latar belakang, serta corak gerakan masing-masing organisasi yang hadir di lingkungan kampus.

Mengenal Ideologi, Sejarah, dan Gerakan Ormek di UNS

Di tengah dinamika organisasi di UNS, ormek hadir sebagai alternatif ruang berorganisasi di luar struktur formal kampus. Masing-masing ormek membawa ideologi, program, dan orientasi gerakan yang berbeda dalam memaknai peran mahasiswa, baik di lingkungan kampus maupun dalam masyarakat luas. Di UNS, sejumlah ormek seperti HMI, GMNI, KAMMI, FMN, PMII, dan IMM menjadi bagian dari lanskap organisasi ekstra mahasiswa kampus yang turut mewarnai dinamika sosial dan politik mahasiswa.

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

HMI didirikan pada 5 Februari 1947 yang dipelopori oleh pahlawan nasional Lafran Pane. HMI menganut ideologi keislaman dan keindonesiaan yang mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tujuan melahirkan kader dengan tingkat intelektual tinggi. Di UNS sendiri, HMI terbagi dalam beberapa komisariat yang tersebar di sejumlah fakultas.

Dilatarbelakangi oleh UU No. 8 Tahun 1985 yang mewajibkan seluruh organisasi memakai asas Pancasila, HMI terpecah menjadi dua kubu, yakni HMI Dipo (Diponegoro) yang berlandaskan Islam-Pancasila dan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) yang tetap mempertahankan ideologi Islam.

2. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) GMNI didirikan pada 23 Maret 1953 sebagai hasil peleburan tiga organisasi marhaenisme. GMNI menganut ideologi

marhaenisme, yakni paham membela rakyat kecil yang tertindas akibat kapitalisme, berlandaskan sosio-nasionalisme yang digagas oleh Ir. Soekarno. Dalam melakukan pergerakan, GMNI berupaya melakukan pembenahan secara sistematis dalam aspek sosial masyarakat. GMNI mengutamakan perjuangan yang terorganisasi, berjuang secara nonkooperatif dengan menggunakan metode membangun dan mengorganisasi massa (*machtsvorming* dan *machtsaanwending*). Di UNS, GMNI terbagi menjadi dua komisariat yaitu GMNI UNS dan GMNI FH UNS.

3. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

KAMMI lahir pada 29 Maret 1998 yang bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1418 H di Kota Malang, Jawa Timur. KAMMI membawa ideologi muslim negarawan, yakni organisasi ini tetap menyesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia, tetapi tetap membawa nilai-nilai keislaman dalam perjalanannya. Gerakan KAMMI terbagi menjadi dua fokus, yaitu Harakatul Tajnid dan Harakatul Amal. Harakatul Tajnid merupakan upaya pengaderan untuk mencetak pemimpin masa depan sesuai nilai-nilai Islam, sedangkan Harakatul Amal merupakan gerakan aksi maupun amal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

4. Front Mahasiswa Nasional (FMN)

FMN merupakan organisasi massa mahasiswa berskala nasional yang lahir pada 18 Mei 2003. Tiga karakteristik FMN yang membedakannya dari ormek lain adalah sebagai organisasi massa, organisasi pemuda-mahasiswa, dan organisasi yang bergaris politik demokratis nasional. FMN memegang prinsip kolektif, di mana semua anggota memiliki kewajiban untuk membangkitkan, mengorganisasi, dan menggerakkan mahasiswa agar aktif dalam perjuangan pergerakan. Dalam konteks pergerakan, FMN aktif menyuarakan hak-hak masyarakat, khususnya buruh dan petani.

5. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

PMII merupakan organisasi mahasiswa yang berdiri pada 17 April 1960 di Surabaya, Jawa Timur, dan menjadikan Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) sebagai landasan ideologi organisasi. Aswaja merupakan paham keislaman yang menekankan sikap moderat, seimbang, dan toleran dalam menjalankan ajaran Islam. Bagi PMII, Aswaja tidak hanya menjadi landasan ideologi, tetapi juga menjadi ciri khas yang membedakan gerakannya dengan organisasi lain. Nilai-nilai Aswaja kemudian dirumuskan dalam Nilai Dasar Pergerakan (NDP) yang mencakup *Habluminallah, Habluminannas,* dan *Hablum minal 'alam.* Gerakan PMII berfokus pada penguatan intelektual dan kesadaran kritis mahasiswa melalui diskusi dan kajian isu.

6. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

IMM merupakan organisasi mahasiswa yang berdiri pada 14 Maret 1964 di Yogyakarta. IMM berlandaskan pada ideologi Muhammadiyah sebagai dasar gerakan yang menekankan nilai-nilai keislaman dan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Ideologi tersebut diwujudkan melalui Trilogi IMM (keagamaan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan) serta Tri Kompetensi IMM (religiusitas, intelektualitas, dan humanitas). Gerakan IMM berfokus pada penguatan internal organisasi dan pembinaan kader untuk membentuk karakter yang berintegritas, kritis, dan memiliki kepedulian sosial.

Membaca Kuasa Ormek dalam Politik Kampus UNS

Dalam dinamika politik kampus UNS, keterlibatan ormek menunjukkan pola yang beragam, mulai dari keterlibatan terbuka hingga strategi yang lebih cair dan tidak selalu tampak di permukaan. Variasi ini tidak hanya mencerminkan perbedaan ideologi, tetapi juga strategi organisasi dalam menjaga pengaruh dan relevansi di ruang *student government.*

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), misalnya, mengakui keterlibatannya dalam politik kampus meskipun tidak selalu terlihat secara eksplisit. Ketua PMII UNS 2026, Ollyvia Cahyaning, menyebut bahwa PMII tetap berperan dalam momentum politik seperti pemilihan Presiden BEM, meskipun tidak selalu disadari oleh publik mahasiswa. “Mungkin nggak begitu terlihat di politik kampus, tapi kami sebenarnya tetap ikut aktif dalam berpolitik. Misalkan, ada pemilihan Presiden BEM, kami turut andil lah dari situ,” ujarnya saat diwawancarai (27/2/2026). Hal ini menunjukkan adanya strategi keterlibatan yang cenderung tidak menonjol secara simbolik, tetapi tetap hadir dalam proses pengambilan keputusan. PMII juga menekankan pentingnya menjaga relasi antar-ormek, yaitu kompetisi tidak lantas menghilangkan ruang kolaborasi. Relasi tersebut dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas dinamika organisasi di kampus. Ia mengatakan, “Ya kami berkolaborasi. Kami menjalin hubungan yang baik. Masalah bersaing, itu kan tujuan masing-masing, ya.”

Di sisi lain, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memandang politik kampus sebagai ruang yang tidak terpisahkan dari dinamika ormek, tetapi sekaligus mengandung persoalan fragmentasi gerakan. Ketua HMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS 2026, Ahmad Muhajir menilai bahwa politik kampus saat ini cenderung dipengaruhi oleh kepentingan berbagai kelompok organisasi, yang pada akhirnya berpotensi memecah gerakan mahasiswa ke dalam ego sektoral. “Politik kampus hari ini aku merasa terlalu dimainkan oleh teman teman dari eksternal atau ormek. Mereka pasti bermain di situ, entah KAMMI, GMNI, HMI, atau yang lainnya. Mereka pasti punya ambisi atau kepentingan untuk masuk di situ. Aku mempertanyakan sebetulnya kenapa harus ada kepentingan-kepentingan itu untuk masuk. Apakah ormek tidak bisa berdiri ketika mereka tidak punya kepentingan untuk masuk ke politik kampus,” ucapnya (3/3/2026).

Meski demikian, HMI tetap melihat pentingnya kehadiran organisasi dalam merespons persoalan mahasiswa. Posisi HMI, dalam hal ini, berada di antara upaya untuk tetap relevan di tengah arus politik kampus sekaligus refleksi kritis terhadap praktik politik yang ada. Muhajir menambahkan, “Hal ini menjadi alasan mengapa gerakan mahasiswa terpecah belah, lalu berakhir teman-teman bergerak sesuai dengan ego sektoral masing-masing, itu karena perbedaan kepentingan tersebut. Ketika kepentingan ini berbeda-beda, akan lebih susah untuk menyatukan. Untuk membangun gerakan yang kolektif itu susah, tapi positifnya adalah ketika terdapat perbedaan kita akan mendapatkan variabel-variabel lain. Jadi, ada plus minusnya, tapi yang perlu dicatat adalah dinamika-dinamika tadi itu tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan mahasiswa, bukan untuk kepentingan senior.” Perspektif ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme gerakan kolektif mahasiswa dan realitas politik kampus yang sarat kepentingan.

Sementara itu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menunjukkan keterlibatan yang lebih eksplisit dan strategis. GMNI tidak hanya terlibat dalam pengusungan calon dalam kontestasi kampus, tetapi juga membangun koalisi dengan ormek lain serta menempatkan kadernya di berbagai posisi strategis, baik di tingkat universitas maupun fakultas. M. Naufal Eka Putra, Ketua GMNI UNS 2026, mengungkapkan bahwa organisasinya aktif dalam pengusungan kandidat serta terlibat dalam pengisian jabatan struktural. “Pas pemilihan zamannya Agung, GMNI terlibat pengusungan calon nomor urut 3. Itu kami koalisi sama PMII. Lalu pada zaman Faiz itu kami mengusungkan legislatif yaitu Mas Bagus sebagai Ketua DEMA UNS. Terus yang di tingkat fakultas itu kami mengajukan tiga calon di tingkat fakultas. Di FISIP ada Dewa, di FP mengajukan Ali dan *alhamdulillah* menang, di FH kemarin Ixora dan *alhamdulillah* menang juga. Kami juga mengusulkan nama untuk mengisi bebera-

pa posisi struktural di BEM UNS. Kemarin, kami punya dirjen di BEM UNS, kami punya beberapa menteri di beberapa fakultas juga yang sifatnya rekomendasi dari kami," jelas Naufal (3/3/2026). Hal ini menunjukkan bahwa GMNI memposisikan diri sebagai aktor politik kampus yang terorganisasi dan memiliki strategi kekuasaan yang cukup jelas.

Namun demikian, keterlibatan aktif tersebut juga diiringi dengan sikap kehati-hatian. Naufal menyebut bahwa GMNI tetap selektif dalam menentukan langkah politik, terutama dalam membangun koalisi. "Secara keseluruhan GMNI cukup aktif di dinamika politik kampus, tapi kami tetap selektif. Apalagi kami pernah punya pengalaman buruk saat kontestasi ketika menjalin koalisi," ujarnya. Ia menambahkan bahwa meskipun politik bersifat dinamis, organisasi tetap perlu berhati-hati dalam mengambil sikap agar tidak terjebak dalam dinamika yang merugikan.

Di sisi lain, Front Mahasiswa Nasional (FMN) justru mengambil pendekatan yang lebih terbuka dan ideologis. FMN secara eksplisit mengakui keterlibatannya dalam pengusungan kader dalam kontestasi kampus. Ketua FMN UNS, Muhammad Zainal Abidin, menilai bahwa transparansi merupakan prinsip penting dalam praktik politik kampus, sekaligus menjadi pembeda dengan ormek lain yang cenderung tidak menampilkan afiliasi secara terbuka. Ia bahkan mengkritik kecenderungan tersebut sebagai sikap yang tidak jujur. "Kami nggak pernah suka, menurut kami itu agak dua muka, agak hipokrit. Untuk apa ingin mengorganisir kawan-kawan mahasiswa, tapi tidak pernah jujur kalian dari mana," tuturnya (6/3/2026). Menurutnya, FMN menjadi satu-satunya organisasi yang secara terbuka mengusung kader dalam kontestasi terakhir, termasuk dirinya sendiri sebagai calon legislatif mahasiswa. "Bahkan dari yang pemilu kemarin kan cuma FMN yang terbuka untuk mengusungkan orang. Saya sendiri diusungkan. Nggak ada yang lain, cuman kami yang terbuka untuk mengusungkan anggota kami jadi legislatif," tuturnya. Ia menilai bahwa transparansi merupakan bentuk kejujuran politik yang justru membangun kepercayaan mahasiswa.

Di sisi lain, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menunjukkan pendekatan yang relatif berbeda. Meskipun belum memiliki basis massa yang kuat secara kuantitas, IMM menekankan penguatan kualitas kader dan internalisasi ideologi sebagai strategi utama. Ketua IMM UNS 2026, Surya Syaukaany, saat diwawancarai (4/3/2026) menyatakan, "Mungkin untuk saat ini masih dikatakan belum cukup kuat secara massa atau dukungan, tapi yang dapat kami beritahu adalah IMM UNS punya pondasinya tersendiri, punya ideologinya sendiri. Ya mungkin kalau misalkan secara jumlah dinilai masih kurang secara kuantitas. Namun, untuk secara kualitas mungkin, bukan mengklaim sih, lebih ke dapat bersainglah."

Ia menyebut bahwa kader IMM didorong untuk aktif di berbagai organisasi intra kampus, seperti BEM dan Himpunan Mahasiswa, secara independen. "Dari kader kami mungkin memang ada yang didelegasikan untuk istilahnya ikut berkontribusi di salah satu di BEM lah gitu. Entah itu jadi Menteri, entah itu jadi Dirjen dan lain sebagainya. Lebih ke membebaskan aja sih, karena dari mereka sendiri memang majunya itu secara independen. Jadi, bukan mengatasnamakan IMM," ungkapnya. Artinya, keterlibatan dalam politik kampus tidak selalu dilakukan atas nama organisasi, melainkan melalui kapasitas individu kader. Pendekatan ini mencerminkan strategi "difusi pengaruh", yaitu nilai organisasi tetap dibawa, tetapi tanpa afiliasi formal yang eksplisit.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) memposisikan politik kampus sebagai bagian integral dari proses pembentukan kader pemimpin. Dengan visi mencetak pemimpin hingga tingkat nasional, KAMMI menekankan pentingnya pembinaan sejak dini melalui pendidikan politik dan kaderisasi yang terstruktur. Ketua KAMMI UNS 2025, Muhammad Syafnat, saat diwawancarai (4/3/2026) mengatakan, "Visinya KAMMI ini kan mencetak kader pemimpin, mencetak

kader pemimpin yang nanti akan berkiprah di nasional hingga internasional. Jadi, kami secara visi-misi itu jelas tertarget, kalau bisa ya kami gembleng sejak dini supaya mau berorganisasi, mau jadi pemimpin, bahkan itu di tingkat himpunan atau di tingkat kampung mungkin di RT/RW. Kami mencetak orang-orang di situ." Dalam praktiknya, keterlibatan kader dalam kontestasi kampus juga melalui proses seleksi berbasis nilai, khususnya kesesuaian dengan prinsip keislaman dan kapasitas kepemimpinan. Ia menuturkan, "Salah satunya mungkin kami majukan orang atau nggak di BEM UNS. Pasti kami akan ada analisis terlebih dahulu. Oh, memang orangnya ini dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ada beberapa nilai religius yang memang cocok jadi pemimpin, itu baru kami *ACC* nih, kami bolehkan untuk dia maju."

Menariknya, KAMMI juga menyoroti bahwa di luar kontestasi politik, relasi antar-ormek cenderung cair dan bersifat personal. Kompetisi yang terlihat dalam momentum seperti pemilu tidak sepenuhnya mencerminkan hubungan sehari-hari antarkader, yang justru tetap terjalin secara santai dan kolegial. "Sebenarnya kalau di luar itu ya bercanda, santai-santai saja. Contoh, aku masih nongkrong sama anak-anak HMI atau mungkin anak-anak GMNI, PMII dan sebagainya. Jadi, kami cuman berkontestasi waktu itu," ujarnya.

Secara umum, dinamika ini menunjukkan bahwa ormek tidak hanya berperan sebagai organisasi kaderisasi, tetapi juga sebagai aktor politik dengan strategi yang beragam, mulai dari yang terbuka, terselubung, hingga berbasis individu. Perbedaan pendekatan tersebut mencerminkan cara masing-masing organisasi membaca peluang, mengelola kader, serta merespons struktur kekuasaan di kampus. Lebih jauh, keberagaman strategi ini juga memperlihatkan bahwa politik kampus tidak berlangsung secara tunggal, melainkan melalui berbagai lapisan praktik, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dalam konteks ini, ormek tidak hanya menjadi peserta dalam kontestasi, tetapi juga turut membentuk cara kerja dan arah dari politik kampus itu sendiri.

Peta Dominasi Ormek di UNS

Keberadaan ormek di UNS menunjukkan peta persebaran kader yang beragam. Variasi ini dipengaruhi oleh perbedaan dinamika, kultur akademik, serta sejarah gerakan di masing-masing fakultas. Pada beberapa fakultas, ormek tertentu tampak lebih dominan, dipengaruhi oleh karakter mahasiswa dan tradisi intelektual yang berkembang. Peta persebaran ini memperlihatkan bagaimana organisasi membangun basis relasi, menjaga keberlanjutan kaderisasi, serta menyesuaikan diri dengan konteks sosial di tiap fakultas.

Front Mahasiswa Nasional (FMN), misalnya, tidak memiliki basis dominasi yang signifikan di fakultas tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah kader yang relatif terbatas. Zainal Abidin menyebutkan, "Kami nggak mendominasi karena total hanya 10 orang saja, tapi kalau paling banyak di FIB." Meski demikian, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) dinilai menjadi ruang yang cukup terbuka bagi aktivitas FMN, dengan reputasi yang cukup baik di kalangan mahasiswa tertentu.

Berbeda dengan FMN, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menunjukkan pola persebaran kader yang relatif merata. Namun, di fakultas seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), kehadirannya tampak lebih menonjol. Hal ini tidak lepas dari peran kader senior dalam menjaga kesinambungan organisasi melalui pendampingan dan pengaderan lintas angkatan, sehingga eksistensinya lebih terasa di beberapa titik.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di UNS hingga kini masih berada dalam satu komisariat tingkat universitas. Struktur ini membuat IMM belum membentuk komisariat berbasis fakultas. Keterbatasan dalam proses pengkaderan menjadi tantangan utama dalam membangun basis yang kuat di masing-masing fakultas. Surya Syau-

kaany menjelaskan, “Kami masih satu komisariat dalam satu universitas. Belum bisa dalam satu fakultas mendirikan satu komisariat. Jadi, kami belum bisa mengklaim basis terbanyak ada di fakultas tertentu.”

Di sisi lain, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memperlihatkan persebaran kader yang relatif merata di berbagai fakultas. Kehadiran kader PMII tidak terpusat pada satu fakultas tertentu, melainkan tersebar mengikuti dinamika mahasiswa di masing-masing lingkungan akademik. “Kader kami nggak ada yang mendominasi. Kami hampir semuanya sama sih, rata-rata sama,” ujar Ollyvia Cahyaning.

Berbeda dengan PMII, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memiliki jaringan komisariat yang luas di berbagai fakultas. Keberadaan struktur ini membuat HMI hadir di banyak ruang kemahasiswaan. Namun, dalam praktiknya, HMI menunjukkan pengaruh yang lebih kuat di beberapa fakultas tertentu, khususnya Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP). Dominasi ini tidak terlepas dari kuatnya tradisi kaderisasi serta keberlanjutan jaringan internal yang telah terbangun, sehingga memungkinkan HMI mempertahankan basis massa yang relatif solid di fakultas-fakultas tersebut.

Pola yang cukup menonjol juga terlihat pada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Dalam beberapa tahun terakhir, GMNI menunjukkan dominasi yang cukup kuat di sejumlah fakultas, seperti Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, dan FISIP. Selain itu, basis massa GMNI juga mulai berkembang di fakultas lain seperti Fakultas Keolahragaan (FKOR), FKIP, FIB, dan Sekolah Vokasi. Faktor kultur akademik dan kedekatan dengan isu sosial-politik menjadi salah satu penentu kuatnya basis tersebut. Naufal Eka menyampaikan, “Kalau secara dominasi, kami sudah dua tahun ini memegang Fakultas Pertanian secara struktural dan basis massa. Terus, tiga tahun ini di Fakultas Hukum. Untuk basis massa lain, kami punya basis besar di FISIP. Lalu di FKOR sih nggak mendominasi, cuman kami memegang HIMA-nya di sana, HIMAKOR.”

Sentimen, Stigma, dan Relasi Ormek

Di tengah keterlibatan aktif ormek dalam dinamika kampus, muncul beragam sentimen yang membentuk persepsi terhadap organisasi-organisasi tersebut. Sentimen ini tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas internal ormek, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti citra alumni, dinamika politik nasional, serta cara organisasi menampilkan diri di ruang publik kampus. Secara umum, data kami menunjukkan bahwa keberadaan ormek di UNS belum sepenuhnya mendapatkan posisi yang kuat di mata mahasiswa, khususnya dalam konteks politik kampus. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, sebanyak 43,9% responden menyatakan bahwa ormek tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap politik dan iklim demokrasi kampus. Sementara itu, sisanya terbagi relatif seimbang antara yang merasakan dampak positif dan negatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun ormek aktif dalam berbagai dinamika, pengaruhnya belum dirasakan secara luas oleh mahasiswa secara keseluruhan.

Kondisi tersebut turut membentuk sentimen yang berkembang di kalangan mahasiswa. Sentimen ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan refleksi dari krisis kepercayaan terhadap peran dan nilai yang ditawarkan ormek. Sebagian responden menilai bahwa peran ormek sebagai wadah kepemimpinan dan jaringan belum dirasakan secara merata, terutama oleh mahasiswa di luar lingkaran internal organisasi. Persepsi ini diperkuat dengan adanya anggapan bahwa dinamika antar-ormek justru menghadirkan kesan eksklusivitas dan potensi konflik, yang pada akhirnya dipandang sebagai gangguan terhadap stabilitas dan aksesibilitas ruang organisasi di kampus.

PMII melihat sentimen negatif sebagai hal yang tidak terhindarkan dalam kehidupan organisasi. Ollyvia Cahyaning menyebut bahwa kritik dari mahasiswa perlu disikapi secara

selektif, sebagian menjadi bahan evaluasi, sementara sebagian lainnya tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Ia mengatakan, "Setiap ormek itu pasti ada yang merasakan, *kok gini, kok kamu ikut ini.* Setiap organisasi pasti ada plus minusnya masing-masing, kan? Yang mengkritik kadang nggak tahu apa-apa. Nggak perlu lah dipikirkan, tapi kritik-kritik yang oke nih, bisa kami jadikan evaluasi." Ia juga menilai bahwa sentimen negatif terkadang muncul akibat kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap organisasi, atau bahkan dipengaruhi oleh dinamika persepsi seperti kecemburuan terhadap program yang dianggap menarik. "Misalkan kami punya program yang mungkin cukup menarik buat teman-teman ya. Terus katakanlah digoreng lah oleh media atau apa gitu. Nah, mungkin itu karena ada perasaan iri. Misalkan kami buat suatu hal, terus *wah menarik deh buat goreng-goreng."*

Sementara itu, HMI menghadapi tekanan sentimen yang lebih kompleks, terutama karena kuatnya relasi historis antara organisasi dan alumni yang berada di posisi strategis nasional. Ahmad Muhajir mengungkapkan bahwa tindakan alumni kerap berdampak langsung pada citra kader aktif di tingkat komisariat. "Tidak dapat dipungkiri kondisi hari ini aku bisa nyebut mungkin lebih dari 10% kabinetnya Prabowo itu alumni HMI. Senior-senior kami HMI yang pada akhirnya ketika ada masalah, kami yang kena. Itu sentimen yang aku merasa sangat kencang. Bahkan, ketika Bahlil melakukan satu hal, *wah ini alumni HMI.* Padahal kalau dibedah lagi, alumni HMI tidak hanya yang namanya Bahlil, ada Ferry Irwandi, Anies Baswedan, Mahfud MD, Munir. Jadi, aku melihat sentimennya di situ, ketika ada senior alumni HMI yang menduduki jabatan strategis dan mereka berulah. Teman-teman yang ada di komisariat itu yang kena," ujarnya. Sentimen ini diperparah oleh ketidakpercayaan mahasiswa terhadap ormek yang dianggap sarat kepentingan politik, sehingga memunculkan stigma bahwa organisasi lebih berorientasi pada kekuasaan daripada kepentingan mahasiswa. "Kenapa akhirnya teman-teman tidak percaya, karena barang-kali ada banyak kepentingan di situ yang membuat teman-teman mahasiswa muak. Ketika teman-teman memandang ormek atau memandang HMI, *wah ini isinya kepentingan doang.* Padahal kan nggak." tambahnya.

Di sisi lain, GMNI menghadapi stigma yang berbeda, yang lebih berkaitan dengan karakter kadernya. GMNI kerap dipersepsikan sebagai organisasi dengan gaya yang lebih "lepas" dan tidak terlalu menjaga citra formal. Naufal Eka menyebut karakter kader GMNI sebagai "los-losan" dan tidak terlalu memedulikan penilaian publik selama apa yang dilakukan dianggap benar. "Hal yang biasa jadi *gogon* atau gosip *underground* itu GMNI kesannya orang-orang yang rebel, bahasa gampangnya bukan orang-orang yang rapi. Karena memang karakteristik yang dimiliki oleh GMNI sekarang itu orang-orang yang grusak-grusuk, orang-orang yang 'los-losan', yang nggak peduli apa kata orang asal apa yang mereka lakukan itu benar. Jadi, mereka jarang menjaga *image* gitu. Itu yang menurutku menjadi salah satu stigma. Nggak seperti ormek lain yang cenderung mainnya rapi. Cenderung menjaga *image* dan citra mereka. GMNI sendiri menurutku kebalikannya dari itu," ujarnya. Persepsi ini menunjukkan bahwa citra organisasi tidak hanya dibentuk oleh aktivitas politik, tetapi juga oleh gaya dan kultur internal yang tampak di ruang publik.

Berbeda dengan organisasi lain, IMM cenderung merasa menerima sentimen yang relatif netral. Mahasiswa umumnya memandang IMM sebagai bagian dari organisasi keislaman yang serupa dengan ormek lain, tanpa stigma negatif yang terlalu kuat. Syauka menyatakan, "Kalau yang aku lihat ya, dari teman-temanku sendiri menganggapnya masih sama dengan organisasi-organisasi eksternal lainnya. Jadi ya, menganggap bahwasanya IMM itu ya sama seperti HMI, PMII, KAMMI, dan sebagainya. Kalau terkait sentimen mereka terhadap IMM, ya masuknya biasa saja sih. Atau mungkin bisa dikatakan bagus karena maksudnya adalah

organisasi eksternal yang keislaman gitu. Mungkin yang terlihat mahasiswanya adalah mahasiswa yang religius." Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap ormek juga dipengaruhi oleh tingkat visibilitas dan intensitas keterlibatan dalam politik kampus.

Sementara itu, FMN justru menilai bahwa transparansi menjadi kunci dalam mereduksi sentimen negatif. Dengan secara terbuka mengakui keterlibatan dalam kontestasi politik kampus, FMN berupaya membangun kepercayaan publik mahasiswa. Zainal menyatakan, "Argumen ormek-ormek lain mengatakan bahwa kalau mahasiswa itu tahu organ-organ BEM atau DEMA itu diusungkan oleh ormek itu bakal jadi hal yang negatif atau hal yang tabu lah gitu. Buktinya kan nggak. Gue nggak ada hujatan dari kemarin. Bahkan kawan-kawan kebanyakan malah respect karena mereka melihat bahwa *oh ini jujur.*" Pendekatan ini menunjukkan bahwa keterbukaan dapat menjadi strategi alternatif dalam menghadapi stigma terhadap ormek. Dengan demikian, sentimen mahasiswa terhadap ormek tidak dapat dilihat secara tunggal. Ia merupakan hasil interaksi antara praktik politik, citra organisasi, serta dinamika komunikasi antara ormek dan mahasiswa. Di sisi lain, relasi antar-ormek menunjukkan bahwa di balik kompetisi politik yang tampak, tetap terdapat ruang kolaborasi dan interaksi sosial yang membentuk ekosistem organisasi di kampus.

Apakah Ormek Dapat Dianggap Sebagai Partai Politik dalam *Student Government*?

Kompleksitas relasi, stigma, dan praktik politik yang melibatkan ormek tersebut kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah ormek sekadar organisasi kaderisasi, atau justru telah berfungsi layaknya partai politik dalam struktur *student government* kampus? Di kalangan mahasiswa, muncul pula persepsi bahwa ormek kerap dipandang sebagai "kendaraan politik" dalam kontestasi kampus. Tidak sedikit yang menilai bahwa keterlibatan dalam ormek dapat mempermudah proses pencalonan dalam pemilu mahasiswa, terutama dalam hal membangun jaringan, memperoleh dukungan, dan menggalang suara. Persepsi ini pada akhirnya memperkuat anggapan adanya kemiripan antara ormek dan partai politik, khususnya dalam fungsi konsolidasi kekuatan dalam ruang politik kampus.

Secara konseptual, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk atas dasar kesamaan ideologi untuk memperjuangkan kepentingan politik serta menjalankan fungsi kaderisasi, pendidikan politik, dan penyaluran aspirasi. Dalam batas tertentu, fungsi-fungsi tersebut memiliki kemiripan dengan praktik yang dijalankan oleh ormek di lingkungan kampus. Melalui proses kaderisasi, forum diskusi, hingga keterlibatan dalam kontestasi pemilu mahasiswa, ormek turut berperan dalam membentuk kesadaran politik sekaligus mengonsolidasikan basis dukungan.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar yang membedakan ormek dari partai politik. Partai politik memiliki orientasi untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan dalam sistem pemerintahan negara, sementara ormek tidak memiliki tujuan formal tersebut. Keterlibatan ormek dalam politik kampus lebih berfungsi sebagai ruang kaderisasi dan distribusi pengaruh di tingkat mahasiswa, bukan sebagai entitas yang secara legal bertarung dalam struktur kekuasaan formal. Dengan demikian, posisi ormek lebih tepat dipahami sebagai aktor politik nonformal yang beroperasi di sekitar struktur *student government*.

Dalam perspektif akademisi, ormek

memang tidak dapat dilepaskan dari praktik politik itu sendiri Airlangga Surya Nagara sebagai Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS, menegaskan bahwa organisasi dan politik merupakan dua hal yang inheren. Menurutnya, ormek memiliki fungsi strategis sebagai wadah kaderisasi sekaligus penyalur aspirasi mahasiswa, yang dalam praktiknya memiliki kemiripan dengan cara kerja partai politik. “Nama organisasi sama politik, sebetulnya tidak bisa dipisahkan,” ujarnya. Lebih jauh, ketika dianalogikan dalam konteks *student government*, peran ormek dalam praktiknya memang memiliki kemiripan dengan partai politik, terutama dalam hal pembentukan basis dukungan dan dinamika kekuasaan. “Bisa diibaratkan,” tambahnya (24/2/2026).

Lebih jauh, keberadaan ormek juga tidak hanya dapat dilihat dari perannya dalam kontestasi politik, tetapi sebagai ruang pembelajaran demokrasi bagi mahasiswa. Dalam praktik organisasi, mahasiswa dihadapkan pada perbedaan kepentingan dan latar belakang ideologi yang beragam, baik dalam lingkup internal maupun antarorganisasi. “Nah kalau secara hukum sendiri kalau kita bicara demokrasi ya penting, sebagai saluran teman-teman. Ketika teman-teman berorganisasi minimal secara internal saja teman-teman akan menghadapi yang namanya perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan baik itu kepentingan misalnya antara orang-orang yang berbeda-beda atau ada namanya organisasi ekstra kampus. Gerakan-gerakan politik tingkat mahasiswa seperti HMI, KAMMI, GMNI, dan PMII mempunyai basic ideologi yang berbeda-beda. Meskipun semuanya harus meyakini dan menunduk pada Pancasila, mereka mempunyai basis ajaran yang berbeda-beda, punya doktrinasi yang berbeda-beda, yang detailnya punya perbedaan kepentingan,” jelas dosen itu. Kondisi ini mendorong mahasiswa untuk berlatih mengelola perbedaan, menghargai pendapat orang lain, serta memahami dinamika kepentingan dalam sebuah organisasi.

Airlangga juga menekankan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam organisasi memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kehidupan demokrasi. Minimnya partisipasi mahasiswa dalam organisasi dan rendahnya keterlibatan dalam pemilu kampus dinilai berpotensi melahirkan sikap apatis yang tidak berhenti di tingkat kampus, tetapi juga terbawa hingga ke ranah politik yang lebih luas. Ia mengatakan, “Ketika mereka berorganisasi mereka akan berlatih bagaimana kemudian menghormati pendapat orang lain. Kira-kira begitu, bagi saya itu makanya kenapa kok penting dan harus ada karena sekarang teman-teman anak muda banyak yang nggak aktif kegiatan mahasiswa banyak yang acuh tak acuh dengan pemilu dan sebagainya. Akhirnya apa? Menjadi apatis. Apatis kan nggak berhenti di situ. Di tingkat yang lebih luas tingkat nasional, teman-teman juga menjadi apatis sama pemilu, sama proses politik yang terjadi.” Dalam konteks ini, keberadaan ormek menjadi penting tidak hanya sebagai aktor politik, tetapi juga sebagai ruang pembentukan kesadaran dan partisipasi demokratis mahasiswa.

Dengan demikian, ormek tidak dapat secara sederhana disamakan dengan partai politik, tetapi juga tidak dapat dilepaskan dari praktik politik itu sendiri. Ia berada di posisi antara menjalankan sebagian fungsi politik seperti kaderisasi dan konsolidasi kekuatan, tetapi tanpa legitimasi formal sebagai aktor kekuasaan. Dalam konteks ini, ormek menjadi salah satu elemen kunci yang membentuk dinamika dan konfigurasi kekuasaan dalam politik kampus UNS.

LAPORAN KHUSUS III

DEMOKRASI SEMU DALAM PEMILU UNS 2025

Penulis: Kartika Ragil Maharani, Naira Parahita Nastiti, Safira Jihan Purnomo Putri

Pemilihan umum (pemilu) mahasiswa selama ini diposisikan sebagai instrumen utama dalam membangun legitimasi *student government* di Universitas Sebelas Maret (UNS). Berdasarkan mekanisme ideal, mahasiswa sebagai konstituen diberi ruang untuk menentukan arah kepemimpinan dan memastikan bahwa roda kekuasaan berputar atas dasar kehendak bersama. Dengan demikian, ruang kompetisi gagasan yang sehat tanpa sekat menjadi terbuka.

Namun, Pemilu UNS 2025 justru berjalan dalam kondisi yang serba terbatas. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kembali berkutat pada calon tunggal. Euforia demokrasi yang kelabu ini memicu gerakan kotak kosong sebagai respons dari sebagian mahasiswa yang merasa tidak terwakili dalam kontestasi. Dari hasil pemilihan, tingkat partisipasi mahasiswa juga tercatat rendah jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan mahasiswa UNS. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilu UNS 2025 masih menyisakan sejumlah persoalan.

Alih-alih menghadirkan adu manifesto dengan sorak sorai simpatisan yang kompetitif, Pemilu justru berpotensi menjadi sekadar arena reproduksi kekuasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Paradoks ini ditandai dengan pilihan yang terbatas, kompetisi elektoral yang mati, serta krisis legitimasi. Oleh karena itu, laporan ini mencoba menelusuri arah yang sedang dituju Pemilu UNS 2025. Masihkah ia menjadi ruang demokrasi bagi mahasiswa, atau justru bergeser menjadi prosedur legitimasi kekuasaan?

Jejak Hegemoni dalam Eksekutif

Pemilu UNS 2025 memperlihatkan satu gejala yang sulit diabaikan yaitu absennya kontestasi yang kompetitif. Kehadiran calon tunggal dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM menandai menyempitnya ruang pilihan bagi mahasiswa. Dalam kondisi ini, pemilu tidak lagi menjadi arena adu gagasan, melainkan cenderung berjalan sebagai prosedur formal tanpa kompetisi yang seimbang. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan mahasiswa, terutama terkait faktor yang menyebabkan terbatasnya kandidat dalam kontestasi. Salah satu isu yang mengemuka adalah peran organisasi mahasiswa ekstra kampus (ormek) dalam membentuk dinamika politik kampus.

Secara normatif, keberadaan ormek diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018, yang menegaskan perannya dalam pembinaan ideologi Pancasila serta pengembangan kepemimpinan mahasiswa. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan ormek tidak selalu berhenti pada fungsi pembinaan. Dalam konteks tertentu, ia juga dapat membentuk struktur kekuasaan yang berpengaruh di dalam organisasi internal kampus.

Di UNS, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) kerap disebut sebagai aktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam politik kampus UNS. Hal ini menjadi rahasia umum bahwa setiap kampus memiliki ormek yang dominan. Namun, di UNS, dominasi tersebut dinilai menunjukkan pola berulang dalam mencetak kader pada posisi-posisi strategis, khususnya di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Dampaknya, ruang kontestasi menjadi tidak sepenuhnya terbuka. Dalam kondisi ini, kompetisi tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kapasitas dan gagasan, melainkan juga oleh akses terhadap jaringan. Hal ini turut memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap politik kampus. Anggapan bahwa Pemilu UNS bersifat elitis dan eksklusif mulai menguat. Mahasiswa yang berada

Ilustrasi: *Mecca Ash Shiffasetia Saputra*

di luar lingkar organisasi dominan cenderung merasa tidak memiliki ruang untuk terlibat. Sikap yang kemudian dilabeli sebagai apatis ini pada dasarnya lebih mencerminkan keterbatasan akses daripada ketidakpedulian.

Kritik terhadap kondisi ini juga datang dari organisasi lain. Front Mahasiswa Nasional (FMN) UNS, misalnya, menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu UNS 2025 tidak menghadirkan kontestasi gagasan yang berarti. Mereka menilai tidak ada proses politik yang mampu melahirkan *student government* yang benar-benar berpihak pada kepentingan mahasiswa secara luas. “Selama penyelenggaraan Pemilu UNS yang sudah dilakukan sejak 5 November, kami jujur sangat kecewa dengan minimnya, atau bahkan bisa dibilang tidak ada sama sekali kontestasi politik dan penempatan gagasan-gagasan baru yang bisa melahirkan *student government* yang benar-benar berpihak kepada perjuangan demokratis mahasiswa.” Pernyataan tersebut diunggah di Instagram *@fmn.uns* pada pada 21 November 2025.

Di sisi lain, Ketua KAMMI UNS 2025, Muhammad Syafnat mempertegas secara jelas bahwa asumsi publik yang mengatakan bahwa KAMMI yang mendominasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. “Sebenarnya, kalau dibilang mendominasi, nggak. Aku bilang ya karena kami melalui jalur formal, apakah ini termasuk dominasi kekuasaan? Aku pribadi jawab *tidak*. Kami lewat jalur pemilu yang sah. Bahkan ada dinamika di situ, dinamika kotak kosong. Jadi, ormek itu sebenarnya jalan juga, tapi entah kenapa mereka nggak memajukan,” ujarnya saat diwawancarai (4/3/2026).

Syafnat mengatakan bahwa kader yang dicalonkan telah melalui proses formal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada khalayak. Pernyataan ini menunjukkan bahwa

secara struktural tidak ada pengakuan eksplisit mengenai adanya praktik dominasi. “Jadi, Faiz (Presiden BEM UNS 2025) dan Kailani (Presiden BEM UNS 2026) memang kader KAMMI. Pada dasarnya, kami melalui jalur profesional yang dinamakan pemilu. Di situ, diuji pendapat, uji publik, dan dinilai pada teman-teman seluruh mahasiswa UNS,” tambahnya.

Namun, di luar klaim tersebut, publik membaca adanya pola dalam jalur kaderisasi menuju posisi strategis. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Intellectual Leadership School (ILS), program kepemimpinan di bawah BEM. Dalam dua tahun terakhir, Presiden BEM UNS berasal dari posisi Kepala Sekolah ILS, sehingga memunculkan asumsi adanya jalur tertentu menuju kepemimpinan. Menurut data, memang benar bahwa dua tahun berturut-turut Presiden BEM UNS merupakan kepala sekolah dari ILS. Persepsi mengenai adanya pola kaderisasi ini juga muncul di kalangan mahasiswa.

Salah seorang mahasiswa yang mengamati dinamika Pemilu UNS dalam dua tahun terakhir menilai bahwa terdapat alur tidak tertulis dalam jalur menuju kepemimpinan BEM UNS. “Sebenarnya kalau sedikit jeli mengamati pemilihan dua tahun terakhir, jelas sekali *plotting*-an yang pertama menjadi Staf PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia). Kedua, menjadi Kepsek ILS. Ketiga, menjadi Wakil Menteri PSDM. Lanjut lagi, entah ini opsi ya, mau menjadi Ketua PKKMB atau langsung ke Presiden BEM. Tahun ini pun demikian, cuman digeser ke FISIP saja, tapi konteksnya sama saja. Kita bisa membaca itu sebagai *pattern*,” ujarnya. Meskipun tidak dapat digeneralisasi sebagai mekanisme formal, pandangan ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa membaca adanya pola kaderisasi yang berulang dalam distribusi posisi strategis di BEM UNS.

Namun, pola ini kembali dibantah oleh pihak terkait. Kepala Sekolah ILS 2024 yang kini menjabat sebagai Presiden BEM UNS 2026, M. Kailani Rizqi ketika diwawancara (5/3/2026) menyatakan bahwa ILS bukanlah “*golden ticket*” untuk masuk BEM. “Karena gini, ILS itu bisa bikin kamu cepat keterima BEM, tapi bahkan bisa bikin kamu cepat ketolak BEM juga. Ya, jadi bukan berarti ILS ini adalah *golden ticket*.” Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa ILS bukanlah pengaderan yang sengaja dibentuk untuk membentuk calon presiden di BEM.

Ditambah lagi, Ketua KAMMI 2025, Muhammad Syafnat menyebutkan, “Pola itu mungkin kebetulan saja.” Ia menganggap bahwa pola kaderisasi ILS menuju presiden BEM UNS hanya sebuah kebetulan karena dua tahun sebelumnya Presiden BEM UNS bukan berasal dari Kepala Sekolah ILS. Ia mengatakan bahwa sekolah kaderisasi dibentuk untuk mengader di lembaga bukan untuk ormek. KAMMI sendiri juga memiliki tempat kaderisasi yang bernama Muslim Leadership Training (MLT).

Namun demikian, narasi berbeda muncul dari mantan siswa dan mentor ILS yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Akspro BEM 2026. Ahmad Muhajir (3/3/2026) menyebut bahwa ILS memang menjadi salah satu pintu awal bagi mahasiswa untuk masuk ke dalam struktur BEM UNS dengan estimasi sekitar 20% pesertanya melanjutkan ke dalam organisasi. “Menurut saya sendiri, kuncian BEM itu ada di ILS dalam hal untuk kaderisasi. Kalau kita berani membuka dan membedah berapa banyak alumni-alumni ILS yang hari ini menduduki posisi strategis di BEM. Itu kita berani buka. Itu teman-teman bisa lihat sendiri, berapa sih orang-orang alumni ILS yang sekarang jadi menteri-menteri. Saya rasa banyak, lebih dari dua puluh persen prediksi saya. Akhirnya, kita tahu ILS jadi lahan yang sangat basah untuk upaya kaderisasi di BEM UNS,” ujarnya.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara klaim formal dan realitas yang dirasakan di lapangan. Di satu sisi, tidak ada pengakuan eksplisit mengenai dominasi. Di sisi lain, keberulangan pola dan keterhubungan antarposisi tetap menjadi fakta yang sulit diabaikan. Dengan demikian, persoalan hegemoni tidak semata-mata terletak pada benar atau tidaknya tudingan dominasi secara absolut, melainkan pada dampak struktural yang dihasilkannya. Ketika akses terhadap kekuasaan tidak terbuka secara setara, maka demokrasi kehilangan salah satu prinsip dasarnya yaitu kesetaraan kesempatan. Dalam konteks ini, Pemilu UNS

tidak lagi sepenuhnya menjadi ruang kompetisi yang terbuka, melainkan berpotensi menjadi mekanisme yang mereproduksi pola kekuasaan yang sama dari waktu ke waktu.

Kotak Kosong Sebagai Manifestasi Kebuntuan Kontestasi

Kondisi kontestasi yang tidak sepenuhnya terbuka, sebagaimana terlihat dalam pola hegemoni tertentu dalam politik kampus, menemukan bentuk reaksinya dalam Pemilu Mahasiswa UNS 2025. Salah satu manifestasi paling nyata dari kondisi tersebut adalah menguatnya gerakan kotak kosong. Selama ini, kotak kosong kerap diposisikan sebagai pelengkap prosedural dalam pemilihan. Namun, dalam Pemilu UNS 2025, ia justru menjelma menjadi arus yang signifikan. Pasalnya, suara kotak kosong mampu meraih 914 suara dan nyaris menggeser calon tunggal dalam kontestasi Presiden dan Wakil Presiden BEM, Muhammad Kailani Rizqi Pratama dan Abdullah Azzam Algie yang memperoleh 1.403 suara. Meskipun tak membawa figur dan kampanye resmi apapun, gerakan ini tetap mampu mengimbangi basis massa dari pasangan tersebut.

Dalam konteks ini, kotak kosong tidak lagi dapat dipahami sebagai sekadar opsi teknis, melainkan sebagai bentuk ekspresi kolektif atas ketidakpuasan terhadap struktur kontestasi yang dinilai tidak memberikan ruang alternatif. Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba. Berdasarkan wawancara dengan dua mahasiswa yang termasuk penggagas dari gerakan ini, Prana dan Ananta (nama samaran), kemunculan kotak kosong merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang telah lama dirasakan mahasiswa. Salah satu yang paling terasa adalah pola kontestasi yang cenderung berulang. Publik dipenuhi asumsi bahwa alur menjadi pemimpin mahasiswa selalu berasal dari lingkar organisasi yang sama, yakni di bawah naungan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UNS.

"Sebenarnya dari organisasi mana pun kalau mau menaikkan kadernya, ya sah-sah saja," ujar Prana (2/3/2026). Namun, ia menegaskan bahwa persoalan muncul ketika hegemoni tersebut berujung pada ketimpangan peluang dalam kontestasi. "Permasalahannya ketika KAMMI menguasai kursi itu, anggota-anggota BEM UNS yang dikader KAMMI itu terlalu diuntungkan. Jadi, yang non-KAMMI kemungkinan besar akan kalah meskipun kompeten," lanjutnya.

Menurutnya, dominasi sebuah organisasi dinilai memberi *benefit* instan bagi anggota tertentu. Akibatnya, ruang kandidat lain menjadi terbatas. Dalam situasi seperti ini, kompetisi tidak lagi bertumpu pada kapasitas individu, melainkan turut dipengaruhi oleh kedekatan dengan organisasi. Menilik lebih dalam tentang calon tunggal, keberadaan kader ormek lain yang absen dalam kontestasi ini juga perlu dipertanyakan. Dalam pandangan Prana, keputusan untuk tidak maju bukan karena ketiadaan kader dari para ormek, melainkan pertimbangan realistis terhadap peluang yang dianggap kecil.

"Sepengetahuanku dari beberapa kenalan ormek-ormek, mereka bukan kekurangan kader dan sebagainya. Mereka mengakui untuk duduk di kursi UNS masih kalah suara," ucap Prana. Keputusan untuk maju bukan hanya tentang keberanian, melainkan kalkulasi yang cukup realistis. Setiap gerakan membutuhkan logistik dan massa yang tidak sedikit, sehingga peluang menang selalu menjadi pertimbangan utama. Hal ini menjadi konsekuensi dari ketimpangan kekuatan yang dirasakan di lapangan. Dalam pembacaan Prana dan Ananta, pola yang berulang secara perlahan dapat menyaring bahkan menyingkirkan "kemungkinan-kemungkinan" lain sejak awal. Akibatnya, ruang kompetisi tidak lagi melahirkan adu gagasan, tetapi hanya politik satu arah yang berjalan tanpa pembanding.

Dalam konteks ini, Dosen Fakultas Hukum UNS, Airlangga Surya, menilai bahwa dorongan perubahan seharusnya diiringi dengan kehadiran alternatif dalam kontestasi politik. "Nah, kenapa mereka nggak mencalonkan? Masalahnya gitu, kan? Mereka ingin mendorong perubahan, tapi nggak mencalonkan diri. Artinya begini, ketika kita ingin menuntut perubahan berarti kita harus melakukan *movement* dong ka-

lau secara politiknya begitu. Kalau tidak ada *movement,* tidak akan ada perubahan, karena *status quo*-nya kuat," ujarnya (24/2/2026).

Di tengah tidak hadirnya kandidat tandingan, kotak kosong kemudian muncul sebagai satu-satunya kanal yang tersedia bagi mahasiswa untuk mengekspresikan ketidaksetujuan. Hal ini juga dipandang sebagai indikasi adanya kebuntuan dalam sistem demokrasi mahasiswa. "Hal ini menunjukkan ketidakpuasan mahasiswa, tetapi tidak ada yang bisa mengonsolidasikan karena dia tidak punya saluran. Salurannya hanya kotak kosong, ya sudah kotak kosong," lanjut Airlangga.

Di sisi lain, Ketua KAMMI UNS 2025, Syafnat, memandang kemunculan kotak kosong sebagai bagian dari dinamika kontestasi yang tetap perlu diapresiasi. Ia menilai bahwa keberadaan kotak kosong setidaknya menghadirkan bentuk perlawanan dalam situasi minimnya kandidat tandingan. "*Alhamdulillah* juga ada kotak kosong yang main juga," ujarnya. Kehadiran opsi tersebut, menurutnya, membuat kontestasi tidak sepenuhnya berjalan tanpa pembanding.

Menilik struktur dari gerakan ini, gerakan kotak kosong tidak dibangun melalui struktur organisasi formal. Tidak ada figur sentral atau hierarki kepemimpinan yang jelas. Konsolidasi dilakukan secara cair melalui pendekatan personal dari satu individu ke individu lain yang memiliki keresahan serupa. "Kalau ditanya inisiatornya siapa, inisiatifnya datang dari keresahan kami semua. Siapa yang menginisiasi? Kesadaran teman-teman mahasiswa. Mahasiswa yang mencermati dinamika internal BEM, mulai dari pergerakan, *event*, advokasi, hingga Pemilu UNS. Kesadaran ini untuk menjadikan UNS lebih demokratis dengan *government* yang baru," tegas Ananta (2/2/2026).

Di permukaan, gerakan kotak kosong disiarkan dengan berkolaborasi melalui akun-akun anonim seperti *@uns_gembos, @bocoralus.uns, @kentingansantuy,* dkk. Melalui kanal ini, publik disuguhi narasi yang cukup runtut mengenai huru-hara Pemilu UNS 2025, mulai dari investigasi hegemoni KAMMI, eksplorasi kompetensi kandidat Capres dan Cawapres BEM, hingga seruan untuk memilih kotak kosong. "Kami sudah berani membuat gerakan itu pasti kami bisa mempertanggungjawabkan, itu juga narasi barengbareng yang sudah disepakati," ujar Prana.

Tangkapan layar mengenai unggahan carousel dari akun Instagram milik @uns_gembos pada 25 November 2025 dengan mengajak untuk memilih kotak kosong sebagai bentuk reformasi Pemilu UNS.

Di sisi lain, media visual seperti poster bertuliskan "PILIH KOTAK KOSONG" juga digunakan. Menurut penuturan mereka, poster-poster ini tidak memiliki jumlah spesifik karena dicetak sesuai kebutuhan untuk disebarkan sehari sebelum pemungutan suara. Penyebarannya memang tidak merata ke seluruh fakultas, mereka menyasar titik-titik tertentu yang dinilai potensial.

Poster yang berisi ajakan untuk memilih kotak kosong ini disebarkan di Fakultas Peternakan (FP), Fakultas Kedokteran (FK), serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

"Dari aku sendiri cetak sekitar 15 sampai 20 poster untuk disebarkan ke Fakultas Peternakan, Kedokteran, dan FMIPA," tutur Prana. Selain itu, poster serupa juga ditemukan di Fakultas Hukum serta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. "Kami langsung *door to door* karena nggak tahu mana teman dan mana lawan. Kami juga kontak satu per satu teman yang sekiranya memiliki keresahan yang sama," tutur Ananta. Taktik tersebut dipilih untuk mencegah kebocoran data sekaligus menjaga agar gerakan tetap kolektif untuk kepentingan mahasiswa. "Kami menjaga gerakan ini tetap kolektif, takutnya kalau ada yang ditokohkan jadi *blunder,*" lanjutnya. Mereka menyatakan bahwa ajakan tidak pernah dilakukan secara massal melalui grup, apalagi dengan paksaan. Menariknya, sebagian besar mahasiswa yang dihubungi memiliki keresahan yang sama.

Dari situ, mulai terbentuk kelompok kecil berisikan mahasiswa lintas fakultas yang mana masing-masing anggota perlahan mengambil peran sebagai narahubung pergerakan di fakultasnya. Pada waktu itu, mereka belum dapat menjangkau seluruh fakultas karena keterbatasan perwakilan. Namun, sekitar dua hari hingga satu hari sebelum pemungutan suara, semakin banyak mahasiswa yang mengaku resah terhadap polemik Pemilu UNS 2025. Pada titik ini, barisan kotak kosong menyepakati untuk memasifkan gerakan. Perwakilan tiap fakultas pun terbentuk sebagai hasil dari proses konsolidasi yang berkembang secara bertahap. Tepat pada hari pemungutan suara, barisan kotak kosong bergerak secara kolektif dengan turun langsung dan menyebar ke berbagai fakultas.

Namun demikian, dinamika tersebut tidak lepas dari catatan kritis. Gerakan kotak kosong dalam praktiknya melanggar aturan main Pemilu UNS, khususnya terkait batas waktu kampanye. Aktivitas mobilisasi yang masih berlangsung hingga hari pemungutan suara menunjukkan bahwa gerakan ini tidak sepenuhnya berjalan dalam koridor yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi problematis karena di satu sisi kotak kosong diposisikan sebagai bentuk kritik terhadap sistem, tetapi di sisi lain justru mengabaikan mekanisme yang menjadi dasar dari proses demokrasi itu sendiri. Ketua KAMMI UNS 2025 turut menyoroti persoalan ini. "Kemarin juga ada beberapa hal yang disayangkan. Kemarin, pada hari H masih banyak kampanye kotak kosong. Kan lucu sebenarnya, itu salah satu titik kelemahan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) tahun ini adalah kurang adanya itu. Aku sudah melaporkan ini. Kok masih banyak kampanye kotak kosong ya pada hari H," ungkapnya. Pernyataan ini tidak hanya mengarah pada pelanggaran yang dilakukan oleh gerakan kotak kosong, tetapi juga menyinggung lemahnya pengawasan dari penyelenggara Pemilu UNS dalam menegakkan aturan.

Menanggapi hal tersebut, Ibnu Wahbin selaku Ketua KPU UNS memberikan perspektif yang berbeda dengan menekankan bahwa pihaknya tetap menghormati keberadaan gerakan kotak kosong sebagai bagian dari dinamika demokrasi mahasiswa. “Sebelumnya memang KPU menghormati adanya gerakan itu karena itu bentuk ekspresifnya para mahasiswa juga bagian dari dinamika. Selama hal itu tidak mencederai keberlangsungan. Itu kami rasa itu masih bagian dalam demokrasi,” katanya (18/3/2026). Namun demikian, ia juga mengakui bahwa berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara, terutama terkait kualitas pelaksanaan yang dinilai belum maksimal. “Itu juga mungkin menjadi bahan evaluasi bagi panitia terkait mungkin kualitas penyelenggaraan kami yang mungkin belum maksimal sehingga menyebabkan beberapa hal itu,” lanjutnya. Terkait dugaan pelanggaran kampanye kotak kosong hingga hari pemungutan suara, Ketua KPU menegaskan bahwa aspek pengawasan berada di bawah kewenangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), sehingga penilaian mengenai tertib atau tidaknya gerakan tersebut seharusnya dikonfirmasi kepada lembaga pengawas. “Untuk terkait tertib dan tidaknya mereka dalam menyuarakan itu bisa dikonfirmasi lebih lanjut kepada Panwaslu sendiri karena yang menjadi bagian dari pengawasan seperti itu,” jelasnya.

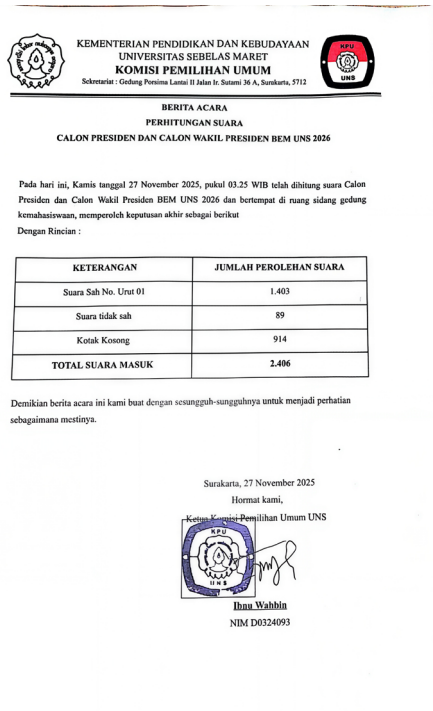

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Sekretariat : Gedung Porsima Lantai II Jalan Ir. Sutami 36 A, Surakarta, 5712

BERITA ACARA
PERHITUNGAN SUARA
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN BEM UNS 2026

Pada hari ini, Kamis tanggal 27 November 2025, pukul 03.25 WIB telah dihitung suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden BEM UNS 2026 dan bertempat di ruang sidang gedung kemahasiswaan, memperoleh keputusan akhir sebagai berikut
Dengan Rincian :

KETERANGAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
Suara Sah No. Urut 01	1.403
Suara tidak sah	89
Kotak Kosong	914
TOTAL SUARA MASUK	2.406

Demikian berita acara ini kami buat dengan sesungguh-sungguhnya untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya.

Surakarta, 27 November 2025
Hormat kami,
Ketua Komisi Pemilihan Umum UNS

Ibnu Wahbin
NIM D0324093

Tangkapan layar mengenai lembar Berita Acara Perhitungan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) BEM UNS 2026.

Puncaknya, kotak kosong meraih 914 suara dari total 2.406 suara yang masuk dalam pemilihan Capres dan Cawapres BEM. Sementara itu, pasangan Kailani–Algie memperoleh 1.403 suara, dengan 89 suara tidak sah. Walaupun menghadapi kekalahan, angka ini berpotensi menjadi bekal pergerakan ke depan. Apabila berandai-andai ten-

tang kemenangan, barisan kotak kosong merencanakan berbagai pembaharuan regulasi. Bentuk paling kecilnya adalah menghidupkan kembali ruang kompetisi dengan mengupayakan adanya dua atau lebih calon untuk adu gagasan. Lebih spesifik, mereka menginginkan adanya *threshold* atau batas minimal kemenangan di setiap fakultas untuk mendorong Capres dan Cawapres BEM untuk memperkuat legitimasi dengan menggaet massa sebanyak-banyaknya.

Di samping itu, pihak universitas melihat fenomena ini melalui sudut pandang yang berbeda. Hartono sebagai Rektor UNS menilai bahwa kemunculan kotak kosong merupakan manifestasi dari dua kemungkinan, yakni sikap apatis mahasiswa atau adanya perasaan tersumbat dalam menyalurkan partisipasi politik. “Itu berarti adalah pekerjaan rumah bersama. Kotak kosong itu manifestasi dari dua hal, yaitu perasaan apatis, artinya apatis itu tidak mau tahu atau mereka ingin berkontribusi, tetapi tersumbat yang akhirnya bermanifestasi ke sana (kotak kosong),” ungkapnya (2/3/2026). Namun demikian, pembacaan ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara institusi dan mahasiswa. Jika pihak universitas melihat kotak kosong sebagai persoalan partisipasi, maka dalam pengalaman sebagian mahasiswa, fenomena ini justru dipahami sebagai respons terhadap struktur kontestasi yang dinilai tidak sepenuhnya terbuka.

Di sisi lain, kotak kosong juga memiliki keterbatasan sebagai instrumen politik. Berbeda dengan kandidat alternatif yang dapat menawarkan gagasan dan program, kotak kosong tidak menghadirkan arah kepemimpinan yang konkret. Dalam konteks ini, pilihan terhadap kotak kosong lebih merepresentasikan penolakan daripada solusi atas persoalan yang ada. Pandangan ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan tidak selalu berujung pada perubahan apabila tidak diikuti dengan upaya membangun alternatif dalam kontestasi. Dengan demikian, gerakan kotak kosong dapat dipahami sebagai sinyal kritik atas kondisi demokrasi mahasiswa, sekaligus penanda adanya keterbatasan dalam kanal perubahan yang tersedia.

Kebobrokan Kinerja KPU UNS 2025

Pemilu UNS 2025 tidak hanya diwarnai minimnya kontestasi, tetapi juga diiringi berbagai persoalan administratif dan teknis yang menyeret penyelenggara, yakni KPU UNS, ke dalam pusaran kritik. Sejumlah mahasiswa menyoroti lemahnya sosialisasi, kesalahan teknis dalam pelaksanaan, hingga minimnya transparansi dalam proses penghitungan suara. Akumulasi persoalan ini tidak hanya memengaruhi kualitas penyelenggaraan, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan mahasiswa terhadap proses demokrasi kampus.

Salah satu persoalan paling mendasar terletak pada aspek sosialisasi. Pada Pemilu UNS 2025, KPU UNS justru membuat

akun Instagram baru, *@pemilu.uns,* yang digunakan sebagai kanal utama publikasi. Namun, akun ini tidak dikenal luas oleh mahasiswa, tercermin dari jumlah pengikut yang hanya mencapai 171 akun selama masa pemilu berlangsung. Akibatnya, distribusi informasi menjadi terbatas. Di beberapa fakultas seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), mahasiswa hanya menerima tautan pemungutan suara tanpa penjelasan memadai. Bahkan, sejumlah mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) mengaku tidak mengetahui bahwa pemilu sedang berlangsung. Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap rendahnya partisipasi mahasiswa dan meningkatnya angka golongan putih (golput).

Ketua KPU UNS 2025 sendiri mengakui kesalahan tersebut terkait pembuatan akun Instagram baru KPU UNS yang disebabkan oleh ketidakmampuan pihak KPU melakukan proses login pada akun Instagram yang lama. Lebih jelasnya, Ketua KPU UNS menerangkan bahwa, "Saya lebih kurang paham, tapi untuk sandi atau proses login itu tidak bisa dilaksanakan entah karena lupa atau proses pengembalian yang susah sehingga kami harus melakukan pembuatan Instagram baru itu." Pengakuan ini menunjukkan bahwa persoalan teknis yang terkesan sederhana justru berdampak luas terhadap akses informasi mahasiswa.

Sosialisasi dan kampanye yang telah dilakukan oleh pihak KPU juga dirasa kurang. Salah satunya terlihat dari Instagram resmi KPU UNS yang baru hanya membagikan beberapa Surat Keputusan (SK) yang baru tanpa adanya penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. Pihak KPU sendiri juga mengakui kurangnya publikasi dan sosialisasi yang telah dilakukan dan berencana menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi untuk selanjutnya. "Kami juga mungkin publikasinya masih dihitung kurang, sehingga mungkin teman-teman yang memang tidak secara langsung tertarik akan hal itu, mungkin tidak mencari tahu terkait Instagram kami atau semacamnya begitu. Maka dari itu, publikasi yang kami lakukan di Instagram mungkin masih terasa kurang," ujarnya. Hal ini membuat pemilu terkesan tertutup, serta memicu kebingungan yang dirasakan oleh para mahasiswa. Kurangnya sosialisasi, kampanye, dan publikasi ini berdampak langsung pada rendahnya partisipasi mahasiswa dalam Pemilu UNS 2025 yang dapat dilihat dari persentase mahasiswa yang berpartisipasi.

Permasalahan lain muncul dari aspek teknis pelaksanaan, khususnya dalam penggunaan Google Form sebagai media pemungutan suara. Pemilu UNS 2025 menggunakan Google Form sebagai tempat mahasiswa memilih calon eksekutif dan legislatif. Hal ini membuat desain dari Google Form itu sendiri menjadi penting dan krusial. Alih-alih mempermudah, desain formulir justru menimbulkan kebingungan. Penulisan pilihan kedua yaitu kotak kosong dalam pemilihan eksekutif BEM, tertulis "NO Urut 02 ()" alih-alih menggunakan pilihan 'Kotak Kosong'. Hal tersebut menimbulkan kebingungan yang lebih besar karena ambiguitasnya. Menyebabkan beberapa mahasiswa mempertanyakan ada atau tidaknya pilihan kotak kosong dalam Pemilu UNS 2025 ini.

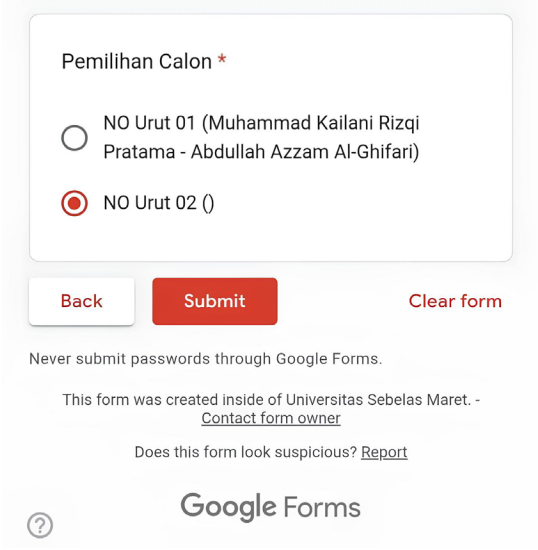

Tangkapan layar Google Form Pemilu UNS 2025 pada opsi pemilihan calon.

Ketua KPU UNS mengakui bahwa penulisan pilihan kotak kosong tersebut memang murni kesalahan dari pihak panitia penyelenggara Pemilu UNS 2025. “Terkait itu, tujuan kami sebenarnya kosong dua itu adalah kotak kosong, tapi kami menulisnya di situ kosong dua, sehingga mungkin itu menimbulkan kebingungan bagi mahasiswa lain begitu. Itu betul kesalahan kami.” Ia juga menambahkan, “Kami menyadari itu kesalahan ketika sudah terjadi, kenapa kami tidak memberikan nama kotak kosong saja begitu.” Ibnu menyatakan bahwa kekeliruan tersebut baru disadari setelah proses pemilu berlangsung, menunjukkan lemahnya proses verifikasi sebelum pelaksanaan.

Kekeliruan yang lebih serius terjadi dalam pemilihan legislatif DEMA. Dalam kerangka regulasi yang berlaku, yakni Undang-Undang KBM UNS Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa, telah diatur bahwa apabila hanya terdapat satu caleg dalam kontestasi, maka caleg tersebut otomatis terpilih menjadi legislatif. Namun demikian, KPU UNS tetap menghadirkan opsi kotak kosong dalam pemilihan legislatif. Akibatnya, calon legislatif dari FISIP dan SV secara simbolik “kalah” dari kotak kosong, meskipun tetap ditetapkan sebagai pemenang. Ketua KPU awalnya berargumen bahwa kehadiran kotak kosong dimaksudkan untuk menjaga “adab demokrasi” tetapi kemudian mengakui bahwa kebijakan tersebut merupakan kesalahan. “Jadi saya izin meralat ya terkait jawaban saya tadi. Untuk kemenangan kotak kosong ini memang secara sehat atau tidak di dalam proses legislatif itu memang kesalahan dari kami. Jika sesuai dengan undang-undang, memang proses calon tunggal legislatif itu memang dinyatakan sudah menang, ya. Jadi, itu memang kesalahan dari kami yang memberikan opsi kotak kosong pada legislatif juga,” ujarnya.

Dampak dari keputusan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek legitimasi politik. Salah satu anggota DEMA UNS 2026 yang terdampak menyatakan, “Bukan kecurangan, tapi cuman kesalahan fatal. Cuman ada satu calon dari satu fakultas, yang bahkan kalau nggak ada yang memilih pun tetap sebagai calon legislatif terpilih. Kemudian, melihat sistem pemilihan legislatif, itu tidak ada sejarah pemilihan legislatif itu melibatkan kotak kosong. Meski kotak kosong menang, itu tidak memengaruhi hasilnya, karena yang memilih berapapun

itu tetap menjadi anggota legislatif." Pernyataan ini menegaskan bahwa kesalahan prosedural KPU berpotensi merusak persepsi publik terhadap legitimasi hasil pemilihan.

Kritik terhadap KPU semakin menguat pada tahap penghitungan suara. Hasil perhitungan memang dipublikasikan melalui Berita Acara di Instagram resmi, tetapi prosesnya dinilai tidak transparan. Ketua KPU menegaskan bahwa penghitungan dilakukan secara terbuka pada 26 November 2026 di Ruang Sidang MAWA dan dihadiri berbagai pihak. "Perhitungan itu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, yang kemudian tanpa ada celah kecurangan, yang kemudian kami juga melakukan hasil final hitung di situ juga," ujarnya. Namun, pengamatan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Tata letak ruangan yang tidak tertata membuat batas antara panitia, tim sukses, dan peserta tidak jelas. Beberapa petugas KPU juga terlihat kebingungan saat proses berlangsung. Selain itu, durasi penghitungan yang berlangsung dari sekitar pukul 20.00 WIB hingga 03.00 WIB dini hari turut menimbulkan kelelahan dan memperbesar potensi kesalahan. Kondisi ini memunculkan skeptisisme di kalangan mahasiswa, bahkan ketika KPU mengklaim proses telah berjalan sesuai asas demokrasi.

Dengan demikian, berbagai persoalan dalam Pemilu UNS 2025 menunjukkan bahwa krisis yang terjadi tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan. Ketika penyelenggara gagal memastikan transparansi, akurasi, dan akses informasi yang memadai, maka legitimasi hasil pemilihan menjadi dipertanyakan. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap KPU tidak cukup berhenti pada perbaikan teknis, tetapi juga perlu menyentuh pembenahan sistemik agar Pemilu UNS ke depan dapat benar-benar merepresentasikan prinsip demokrasi yang inklusif dan akuntabel.

Krisis Legitimasi Konsekuensi dari Defisit Partisipasi

Hasil penghitungan suara oleh KPU UNS menetapkan pasangan calon nomor urut 1, Kailani dan Alghi, sebagai Presiden BEM UNS 2026. Secara administratif, hasil perhitungan suara sah dan tidak terbantahkan. Namun, problem utama Pemilu UNS 2025 tidak berhenti pada legalitas hasil, melainkan terletak pada krisis legitimasi yang menyertainya. Dari total lebih dari 40.000 mahasiswa aktif UNS, jumlah partisipasi dalam pemilu hanya 2.406 pemilih. Artinya, lebih dari 37.000 mahasiswa memilih untuk tidak berpartisipasi. Dengan tingkat partisipasi yang bahkan tidak mencapai 10%, Pemilu UNS 2025 menunjukkan gejala serius berupa apatisme politik mahasiswa dan melemahnya keterlibatan dalam proses demokrasi kampus.

Dalam wawancara, Presiden BEM UNS terpilih 2026, Kailani, mengakui bahwa hasil pemilu menghadirkan tantangan terkait legitimasi. "Kami melihat bahwa hasil pemilu kemarin menghadirkan satu tantangan, yaitu terkait legitimasi dari pemilu itu sendiri," katanya. Ia menilai rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kurang optimalnya penyebaran informasi hingga adanya pergeseran tren minat mahasiswa terhadap organisasi kemahasiswaan. Menurutnya, mata mahasiswa saat ini tidak lagi melihat ke ormawa sehingga penurunan partisipasi tidak hanya terjadi dalam pemilu, tetapi juga dalam rekrutmen kepanitiaan. Ia memandang kondisi ini sebagai tantangan struktural yang harus dihadapi organisasi mahasiswa untuk tetap bertahan dan relevan.

Di sisi lain, perspektif akademik men-

yoroti persoalan ini secara lebih tegas. Dosen Hukum Tata Negara FH UNS, Airlangga Surya, membedakan antara legitimasi yuridis dan legitimasi sosiologis. Ia menegaskan bahwa kemenangan Kailani dan Alghi memang sah secara hukum (legitimasi yuridis terpenuhi), tetapi lemah secara sosiologis. “Dalam konteks ini ada legitimasi sosiologis dan legitimasi yuridis. Legitimasi yuridis terpenuhi, secara sosiologis tidak terpenuhi, tapi yang paling penting di antara semuanya apa sih yang bisa mengunci itu semuanya? Legitimasi yuridis. Meskipun secara sosiologis, jangankan tipis dengan kotak kosong, dari sekian ribu mahasiswa saja yang nyoblos hanya 2000-an mahasiswa. Persentasenya berapa? Sepuluh persen pun nggak ada,” ujarnya. Dengan partisipasi yang tidak mencapai 10% dari total mahasiswa, ia menilai legitimasi sosial kepemimpinan BEM menjadi rendah. Meski demikian, legitimasi yuridis tetap menjadi dasar formal yang “mengunci” keberlakuan hasil pemilu dan menuntut semua pihak untuk tetap berhati-hati dalam menyikapinya.

Dari dua perspektif tersebut, terlihat adanya ketegangan antara keabsahan formal dan penerimaan sosial. Di satu sisi, prosedur demokrasi telah dijalankan sesuai aturan. Namun, minimnya partisipasi dan tingginya angka golput menunjukkan bahwa hasil pemilu tidak sepenuhnya merepresentasikan kehendak kolektif mahasiswa. Kondisi ini berimplikasi langsung pada efektivitas kepemimpinan BEM ke depan. Lemahnya legitimasi sosial berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan, partisipasi, serta kepatuhan mahasiswa terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dalam situasi seperti ini, otoritas formal tidak otomatis menjamin kekuatan politik yang nyata di tingkat basis mahasiswa.

Lebih jauh, perspektif institusional dari rektorat memperluas persoalan ini sebagai bagian dari krisis yang lebih struktural. Rektor UNS menyatakan, “Kalau pengin proses demokrasi baik sehingga menghasilkan pemimpin yang maksimal prosesnya harus diperbaiki, jangan menyalahkan person atau pemimpinnya.” Pernyataan ini menggeser fokus kritik dari individu terpilih ke kualitas sistem demokrasi kampus itu sendiri. Artinya, krisis legitimasi tidak bisa semata dibebankan kepada Kailani dan Alghi, tetapi merupakan refleksi dari lemahnya ekosistem politik kampus secara keseluruhan.

Lebih lanjut, rektor juga menyoroti bahwa rendahnya partisipasi tidak selalu murni apatisme, tetapi juga bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya politik kampus. “Mungkin banyak ketidaktahuan tentang manfaat politik kampus atau berorganisasi. Mahasiswa itu kadang terjebak, fokusnya pada IPK (Indeks Prestasi Kumulatif), sehingga yang lainnya dianggap tidak penting,” ujarnya.

Dengan demikian, tantangan utama bagi Kailani dan Alghi bukan sekadar menjalankan roda organisasi, melainkan membangun ulang legitimasi sosial yang belum sepenuhnya terbentuk. Legitimasi tidak berhenti pada hasil pemungutan suara, tetapi harus terus diproduksi melalui kinerja yang konkret, komunikasi yang efektif, serta keberpihakan yang dirasakan langsung oleh mahasiswa. Di sisi lain, perbaikan sistem pemilu dan penguatan pendidikan politik kampus menjadi pekerjaan rumah bersama baik bagi BEM, DEMA, Ormawa, seluruh mahasiswa maupun institusi kampus itu sendiri. Tanpa perbaikan struktural tersebut, kepemimpinan BEM berisiko berjalan secara administratif, tetapi kehilangan makna sebagai representasi politik mahasiswa UNS.

RISET

APATISME MAHASISWA UNS TERHADAP POLITIK KAMPUS UNS

Penulis: Mohamad Nur Rohman, Jihan

Partisipasi mahasiswa pada politik kampus merupakan unsur penting dalam kehidupan kampus sebagai ruang pembelajaran politik. Organisasi mahasiswa menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mengasah jiwa kepemimpinan, mengembangkan minat-bakat, dan membangun kesadaran terhadap isu sosial baik dalam kampus maupun dunia luar. Sesuai pembahasan ini, *student government* seharusnya menjadi wadah representasi aspirasi mahasiswa sekaligus menjadi penyelenggara pendidikan politik. Pada kenyataannya mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) memiliki kecenderungan yang relatif rendah terhadap minat untuk terlibat pada kegiatan politik kampus dan pemahaman mengenai *student government* kampus. Hal ini dapat dilihat pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) UNS 2025, yakni terjadi perbedaan jumlah yang cukup jauh antara mahasiswa yang memiliki hak untuk memilih, dan mahasiswa yang telah memberikan suaranya. Pada saat yang bersamaan, sentimen negatif mengenai organisasi mahasiswa eksternal kampus (ormek) yang mulai mendominasi politik kampus serta program kerja organisasi mahasiswa yang terlihat terlalu seremonial menyebabkan jarak yang semakin menjauhkan mahasiswa non-pengurus ormawa dengan ormawa. Berdasarkan hipotesis tersebut tulisan ini ditulis untuk menganalisis faktor kecenderungan apatisme mahasiswa umum terhadap *student government* di UNS.

METODE

Riset ini ditulis dengan jenis pendekatan *mixed methods*, yaitu menyatukan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa UNS aktif dengan batasan dari angkatan 2021

hingga Angkatan 2025. Penentuan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin karena jumlah populasi diketahui. Berdasarkan perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, didapat total minimum sampel yaitu sebanyak 100 responden dengan margin galat (***error***) 8%. Pengumpulan data dilakukan dengan metode ***convenience sampling***, yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner secara daring (***online***) kepada mahasiswa UNS yang mudah dijangkau. Pemilihan sampel dengan dasar untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan responden. Tim Riset LPM Kentingan telah melakukan penyebaran kuesioner secara online dengan rentang waktu 26 Februari–11 Maret 2026 kepada seluruh mahasiswa. Kuesioner dibuat dengan menggunakan jenis pertanyaan tertutup dan terbuka. Peneliti menanyakan mengenai pemahaman dan sentimen terhadap ***student government*** UNS. Dalam menganalisis jawaban responden, peneliti menyediakan jawaban berupa skala Likert dari 1 hingga 4 sebagai pilihan jawaban yang dapat dipilih responden, ditambah esai untuk mengutarakan opini responden, serta wawancara untuk memperkuat data.

PEMBAHASAN

Krisis Pemahaman dan Representasi *Student Government* UNS

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh kurangnya tingkat pemahaman mahasiswa terhadap struktur dan mekanisme *student government* di kampus. Hasil survei yang didapat dari 157 mahasiswa UNS menunjukkan bahwa pemahaman fungsi dasar mengenai peran *student government* relatif beragam. Terdapat lebih dari 50% responden mengetahui peran dan orang yang bergerak menjalankan *student government*, tetapi pada aspek yang lebih spesifik seperti pemahaman mengenai mekanisme pemberian hak suara dan pendidikan politik, mahasiswa relatif masih belum memahami secara optimal. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pendidikan terkait *student government.* Dengan ini, menunjukkan bahwa keberadaan *student government* belum sepenuhnya menjadi pengetahuan umum di kalangan mahasiswa.

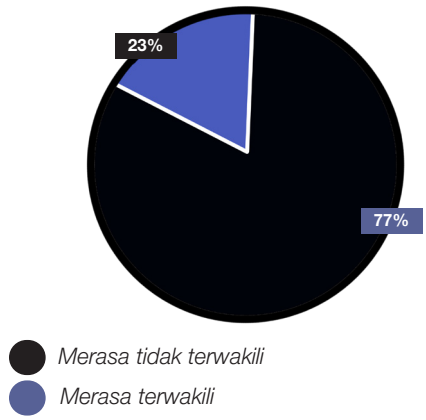

77% Responden merasa tidak diwakili suara nya oleh student government

Faktor lain yang menjadikan *student government* dinilai sebagai "dunia lain" oleh mahasiswa *non-organisasi* adalah karena terbentuknya persepsi mahasiswa terhadap program kerja organisasi tersebut yang dinilai belum cukup menjawab kebutuhan riil mahasiswa. Sebanyak 65,6% responden menilai bahwa program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Mahasiswa (DEMA) dianggap terlalu seremonial dan kurang terbuka bagi mahasiswa non-ormek.

Pernyataan ini dapat divalidasi dengan hasil kuesioner, dimana 77,1% responden menyatakan bahwa *student government* tidak benar-benar mewakili suara mereka. Hasil ini memperlihatkan adanya jarak antara lembaga yang menjadi representasi mahasiswa dengan komunitas yang seharusnya mereka wakili.

Namun, tidak semua responden memiliki pandangan negatif pada program kerja *student government,* terdapat sebagian responden yang beranggapan bahwa aktivitas BEM dan DEMA tidak sepenuhnya seremonial. Menurut mereka, keterbatasan pada penyelenggaraan program dan kegiatan dikarenakan ormawa memiliki ruang gerak yang kecil. Dalam konteks tersebut, kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan acara organisasi dapat menjadi sarana yang tetap relevan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa. Menambahkan pernyataan sebelumnya, penerapannya masih perlu banyak perbaikan sistem maupun mekanisme, sehingga program tersebut dapat lebih luas menjangkau mahasiswa dan dapat menjadi kegiatan yang menunjang minat bakat mahasiswa.

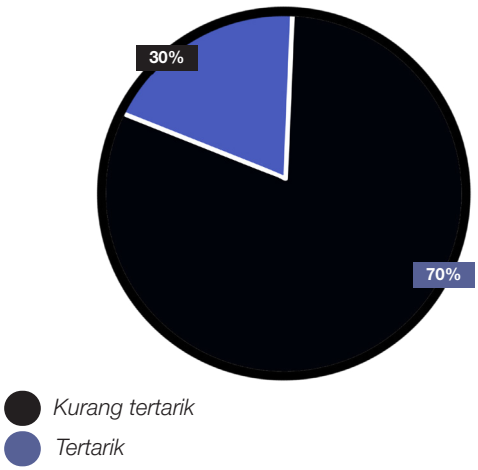

70% Responden kurang tertarik tentang sistematika student goverment

Berdasarkan hasil survei juga menunjukkan hubungan linear antara keterbatasan pengetahuan dengan sentimen apatis dan negatif terhadap organisasi mahasiswa. Sekitar 70% responden mengakui bahwa ketidaktahuan mereka mengenai sistematika *student government* membuat mereka menjadi kurang tertarik untuk terlibat langsung atau menjadi bagiannya. Ketika pemahaman terhadap *student government* kurang, mahasiswa umum non-organisasi cenderung mempercayai stigma negatif yang tersebar, yang kemudian stigma ini menjadi dasar sikap apatis dan semakin menjauhkan organisasi mahasiswa dari fungsi representatifnya di lingkungan kampus. *Student government* perlu lebih aktif dan masif dalam menyelenggarakan pendidikan politik di lingkungan kampus, sehingga keberadaan organisasi mahasiswa (ormawa) tidak hanya dipandang sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi ruang belajar bagi mahasiswa mengenai dunia politik di dalam dan di luar kampus. Kondisi tersebut pada akhirnya tidak berhenti pada tataran persepsi, melainkan berimplikasi langsung pada menurunnya keterlibatan mahasiswa dalam praktik demokrasi kampus. Salah satu manifestasi paling nyata dari fenomena ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Pemilu UNS 2025.

Defisit Partisipasi Pemilu UNS 2025

Pemilu mahasiswa dianggap sebagai puncak dari pesta demokrasi terbesar di kampus. Namun, pada tahun 2025 ini, Pemilu yang dilaksanakan di UNS menunjukan bahwa

pesta ini sudah mulai kehilangan daya tarik nya lagi di mata mahasiswa secara umum. Berdasarkan survei, ada sebanyak 26,8% responden yang mengaku bahwa mereka tak tahu sama sekali tentang adanya pelaksanaan Pemilu UNS 2025. Kondisi ini semakin memprihatinkan jika melihat partisipasi Pemilu UNS 2025 dengan sebanyak 60,9% responden secara sadar memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Temuan ini berbanding lurus dengan data yang didapat saat perhitungan suara Pemilu UNS 2025. Hanya 2.406 mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya, dibandingkan puluhan ribu mahasiswa lainya memilih untuk tidak menggunakan hak pilih. Angka ini menjadi bukti gagalnya Pemilu UNS 2025 sebagai representasi kolektif suara mahasiswa, menjadikannya lebih menyerupai kontestasi eksklusif kelompok tertentu.

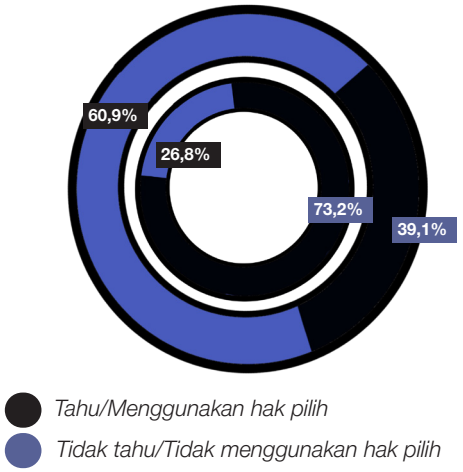

Sebanyak 60,9% responden dari 73,2% responden yang tahu akan Pemilu UNS memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya

Tingginya angka golput ini bukan berarti mahasiswa yang sekedar malas atau tidak peduli politik kampus. Namun, hal ini menjadi indikasi sebagai sikap evaluasi rasional terhadap sistem yang berjalan. Dari hasil survei, dapat dilihat alasan utama mengapa banyak mahasiswa memilih untuk memalingkan muka dari Pemilu UNS 2025:

58% responden merasa kurangnya sosialisasi tentang Pemilu UNS 2025 dari pihak penyelenggara maupun kandidat. Sosialisasi seringkali hanya sebagai formalitas lewat media sosial atau pengumuman satu arah, tanpa pernah benar-benar membedah gagasan bersama mahasiswa di akar rumput.

42% responden merasa bahwa Pemilu UNS 2025 hanya ajang rutinitas tahunan biasa, sehingga mematikan gairah dalam berdemokrasi. Sentimen ini diperparah oleh realitas calon tunggal. Sehingga beberapa responden mengaku “percuma” jika kontestasi hanya melawan kotak kosong.

41% responden menyatakan bahwa mereka tidak mengenal calon yang diusungkan pada Pemilu UNS 2025. Hal ini menjadi teguran keras kepada tim sukses dan pihak penyelenggara terhadap strategi dan pengenalan calon. Secara logis, apabila kandidatnya tidak dikenal oleh publik lantas bagaimana visi misinya dapat dipercaya dan dikawal?

Rendahnya partisipasi mahasiswa dalam Pemilu UNS 2025 disadari betul oleh Presiden BEM UNS 2026 terpilih yaitu M. Kailani Rizqi Pratama. Dalam wawancaranya (5/3/26), ia mengakui adanya tren penurunan tingkat partisipasi di kalangan mahasiswa. Kailani menyebutkan perlu adanya ‘akrobat’ di setiap ormawa dalam menjalankan visi-misinya. Tidak hanya mengulang program kerja dari tahun ke tahun, tetapi diperlukan ‘pengemasan’ visi-misi dalam bentuk yang lebih relevan dengan keadaan saat ini. Selain itu, Kailani melihat

bahwa setiap organisasi memang ada fase naik dan turunnya. Oleh karena itu, diperlukan tindakan terbaik yang dapat dilakukan dalam setiap fase-fase tersebut. Ia pun menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan agar organisasi tersebut tidak 'mati'.

Namun demikian, persoalan rendahnya partisipasi dan krisis kepercayaan mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika internal *student government* dan ormawa intra kampus. Terdapat faktor lain di luar struktur formal yang turut membentuk persepsi dan sikap mahasiswa terhadap politik kampus, salah satunya adalah keberadaan organisasi mahasiswa eksternal.

Sentimen Mahasiswa UNS Terhadap Ormek

Kehadiran ormek di lingkungan UNS ternyata belum mendapatkan posisi yang kuat bagi mahasiswa ketika pesta politik kampus terlaksana. Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan, data menunjukkan bahwa sebanyak 43,9% responden menyatakan ormek tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap politik dan iklim demokrasi kampus. Selain itu, sisa responden lainnya terbagi seimbang antara yang merasakan efek positif dan negatif.

1,2 dari 10 mahasiswa mengatakan tidak familiar dengan istilah ormek

Mahasiswa sebenarnya sudah cukup familiar terhadap keberadaan ormek di UNS, Hanya sekitar 12,1% responden mahasiswa yang tidak familiar terhadap istilah ormek di kampus. Jika dilihat dari persebarannya, ormek yang paling banyak dikenal oleh mahasiswa adalah HMI, dengan 57% responden mengetahui organisasi tersebut. Posisi ini lalu diikuti oleh KAMMI dan GMNI di urutan kedua dan ketiga, serta hanya 8% responden yang tidak tahu sama sekali tentang apa saja ormek yang ada di UNS. Angka ini cukup kecil jika dibandingkan dengan jumlah responden yang tidak merasakan dampak signifikan dari ormek. Hal ini mempertegas bahwa fungsi dan pengaruh ormek di kalangan mahasiswa masih kurang jika dibandingkan dengan popularitasnya.

Ketimpangan antara popularitas dan dampak nyata ini berpengaruh pada sentimen yang dihasilkan mahasiswa terhadap ormek. Sentimen ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan cerminan krisis kepercayaan terhadap nilai-nilai yang ditawarkan. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden merasa bahwa peran ormek sebagai wadah kepemimpinan dan jaringan bagi mahasiswa belum dirasakan dampaknya secara merata oleh massa di luar lingkaran "eksklusif" organisasi. Kondisi ini diperparah dengan persepsi mahasiswa, yaitu melihat dinamika ormek justru dianggap sebagai gangguan ter-

hadap stabilitas dan aksesibilitas di lingkungan kampus. Sentimen tersebut terkonfirmasi melalui tingginya tingkat persetujuan responden terhadap indikasi adanya konflik antar-ormek dan kesan eksklusivitas yang kental.

KESIMPULAN

Pada akhirnya, anjloknya angka partisipasi dalam Pemilu UNS 2025 dan krisis kepercayaan terhadap *student government* menjadi dua sisi yang saling menguatkan. Rendahnya partisipasi ini bukan hanya bentuk apatisme politik mahasiswa, melainkan sebuah evaluasi rasional terhadap sistem Pemilu UNS yang gagal memfasilitasi kontestasi gagasan secara menyeluruh. Di sisi lain, bagi *student government*, krisis kepercayaan mahasiswa ini menjadi rapor merah dalam melaksanakan amanah konstitusi di lingkungan kampus. Oleh karena itu, *student government* dituntut untuk melakukan gebrakan nyata yang mampu mengubah perspektif mahasiswa dan menjadikan ruang pergerakan lebih inklusif. Jika kondisi ini terus diabaikan, maka pemilu akan abadi sebagai rutinitas kosong, dan *student government* hanya akan dianggap sebagai otoritas tanpa fungsi yang jelas.

Selain itu, pembenahan tidak dapat berhenti pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu semata, melainkan harus menyentuh akar persoalan berupa relasi antara *student government* dan mahasiswa itu sendiri. Diperlukan upaya sistematis dalam membangun kembali kepercayaan publik kampus melalui transparansi, keterbukaan akses, serta penyelenggaraan pendidikan politik yang partisipatif dan berkelanjutan. Tanpa adanya perubahan pendekatan tersebut, *student government* akan terus berada dalam lingkaran eksklusivitas yang menjauh dari basis konstituennya. Oleh karena itu, momentum krisis ini seharusnya tidak dipandang sebagai kemunduran semata, melainkan sebagai titik refleksi untuk merekonstruksi ulang praktik demokrasi kampus agar lebih substantif, inklusif, dan benar-benar berakar pada kebutuhan mahasiswa secara luas.

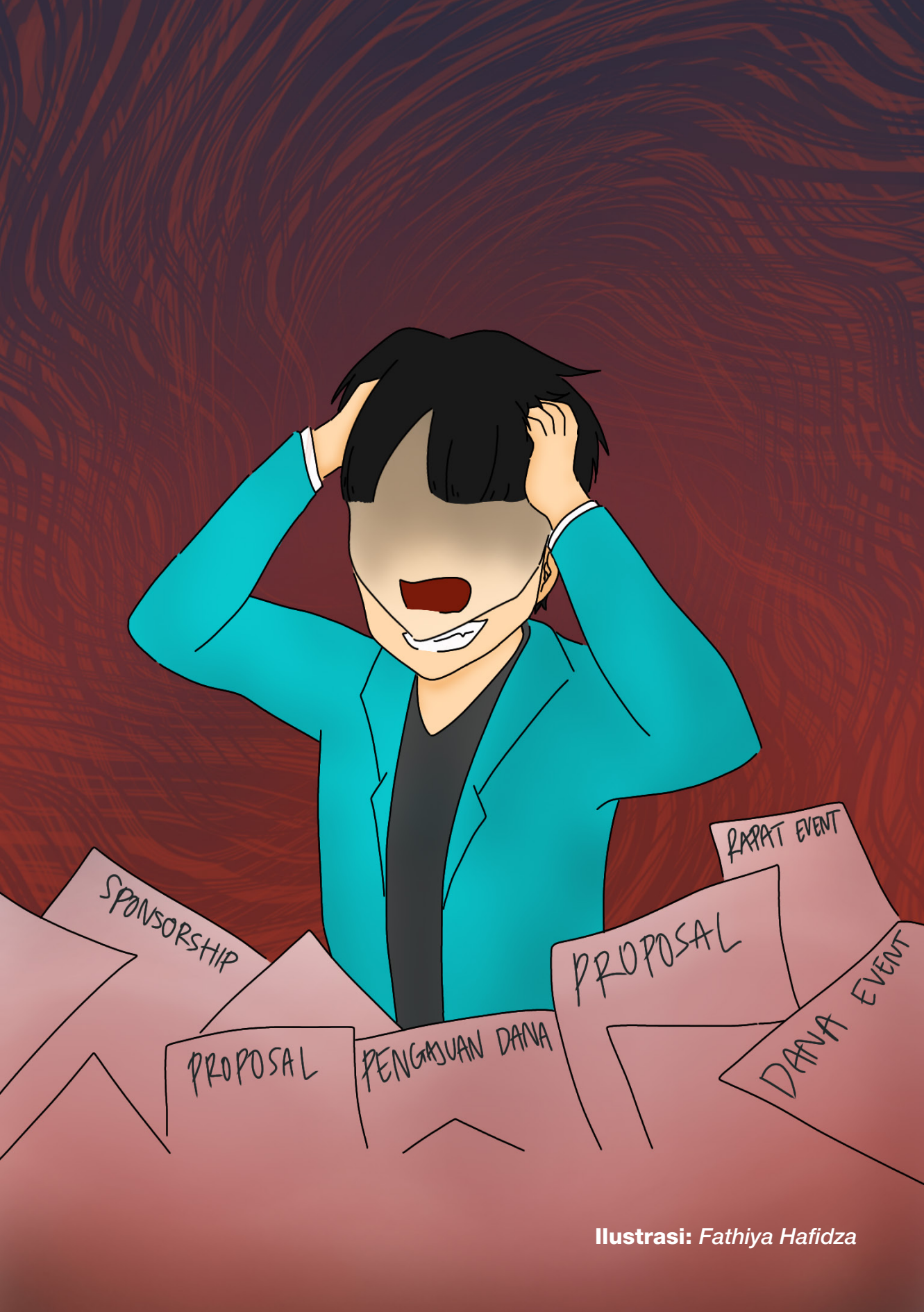

Ilustrasi: *Fathiya Hafidza*

BEM: BADAN EVENT MAHASISWA?

Penulis: Wantech Arofiq Huda Firdausyi, Stevani Aqueen Hanyt

Mahasiswa sebagai entitas kolektif yang rentan terfragmentasi membutuhkan satu simbol representasi yang mampu menyalurkan aspirasi serta mengkritisi kebijakan institusional. Dalam konteks ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) memiliki posisi politis dalam demokrasi kampus. BEM memegang mandat sentral dalam artikulasi kepentingan mahasiswa. Namun, eksistensi BEM Universitas Sebelas Maret (UNS) kian terasa berjarak dan kehilangan esensi pergerakan, seakan BEM tidak jauh berbeda dengan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) lainnya yang mengedepankan program kerja dan acara unggulan daripada sebagai lembaga eksekutif kampus. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan mengenai BEM UNS sebagai manifestasi konkret representasi mahasiswa. Apakah keberadaannya masih relevan secara fungsional dan politis sebagai badan eksekutif mahasiswa?

BEM UNS secara retoris mengklaim bahwa mereka masih berada di jalur kolektif pergerakan dengan tetap mengangkat dan menyuarakan isu-isu krusial seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan penanganan kekerasan seksual. Meski demikian, terdapat "tren proker" konservatif yang mana anggota lebih fokus pada keberjalanan program kerja yang sudah berjalan turun-menurun daripada pergerakan advokasi. Lantas, apakah isu-isu ini diangkat untuk memenuhi tuntutan estetika *feeds*–sebagai caption formal semata? Karena substansi perjuangan rasanya sudah tergerus dengan komoditas program kerja dan terdapat diskoneksi operasional nyata dalam kepengurusannya.

Evaluasi BEM UNS Periode Tahun Lalu: Ilusi Keseimbangan Pergerakan dan Kepanitiaan

Pada periode 2025, BEM UNS meninggalkan jejak dengan citra yang kurang baik. Mereka lebih sering melaksanakan proker di bidang sosial, minat bakat, pendidikan, dan pengembangan SDM ketimbang melaksanakan fungsi utamanya sebagai pilar pergerakan dan advokasi mahasiswa. Bahkan hingga muncul candaan "BEM = Badan *Event* Mahasiswa" di kalangan mahasiswa UNS. Program kerja tersebut sebenarnya merupakan hal yang baik, tetapi sebagai lembaga eksekutif seharusnya BEM UNS lebih memprioritaskan fungsinya sebagai pilar pergerakan dan advokasi mahasiswa.

Terkait hal ini, Muhammad Kailani Rizqi Pratama atau biasa dikenal sebagai Kailani, selaku Presiden BEM UNS 2026, menuturkan (5/3/2026), "Jika BEM sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa mengubah *khittah* dari BEM itu sendiri sebagai pergerakan, saya rasa salah, tapi ketika pada akhirnya BEM tetap sesuai *khittah*-nya sebagai pergerakan, kemudian ditambah *event*, itu nggak masalah." Ia menambahkan, "Karena tren mahasiswa saat ini kan *event*. Nanti kalau hanya seratus persen pergerakan, wacana yang muncul adalah BEM terlalu pergerakan. Sementara itu, mahasiswa sekarang butuh *event*, mungkin *event-event* terkait dengan konser dan festival karier."

Kailani tidak menyangkal citra BEM UNS sebagai badan *event.* Menurutnya, hal ini tidak mengubah BEM UNS hanya sebagai badan *event*, tetapi tetap menjadi pilar pergerakan sekaligus menambah fungsi sebagai pelaksana *event.* Ia berpendapat bahwa BEM UNS perlu melaksanakan *event* untuk menghindari anggapan bahwa BEM terlalu pergerakan, karena tren di kalangan mahasiswa saat ini cenderung pada event seperti konser dan festival karier. Jika alasannya demikian, maka BEM UNS sedang kehilangan fungsi leader (pemandu arah gerakan) dan berubah menjadi sekadar *follower* (pengikut selera pasar).

BEM tidak beroperasi dengan sumber daya tak terbatas. Energi, waktu, dan dana adalah elemen yang sifatnya *zero-sum*, yakni alokasi untuk satu hal akan mengurangi jatah bagi hal lainnya. Jika banyak sumber daya manusia dikerahkan untuk mengurus konser atau festival, maka fokus terhadap eskalasi isu politik dan advokasi secara otomatis akan tereduksi. Justifikasi bahwa BEM harus membuat event karena mahasiswa sekarang butuh *event* adalah bentuk pragmatisme yang berbahaya bagi sebuah lembaga eksekutif politik. BEM tidak didirikan untuk menjadi promotor hiburan yang tunduk pada selera pasar atau tren hedonisme mahasiswa. Hal ini menormalisasi pergeseran BEM menjadi *semi-EO* dengan dalih "menyesuaikan tren" adalah sebuah kemunduran fungsional.

Ketakutan Kailani akan wacana "BEM terlalu pergerakan" justru mengonfirmasi bahwa kepengurusan saat ini masih mewarisi mentalitas main aman seperti kepengurusan sebelumnya. Stigma "Badan *Event* Mahasiswa" tidak muncul tanpa sebab, ia lahir dari akumulasi kekecewaan mahasiswa pada kepengurusan periode sebelumnya. Karena itu, seharusnya Kailani tidak "bermain" seperti kepengurusan sebelumnya, ia seharusnya membawa perubahan pada BEM UNS 2026.

Fungsi Internal: BEM untuk Akar Rumput atau Eksklusif untuk Pengurus?

Adanya distorsi fungsional BEM menggerus eksistensi dan marwah organisasi mereka. Selain itu, banyak mahasiswa terutama mahasiswa baru yang mulai bersikap apatis terhadap BEM dan mempertanyakan manfaat adanya badan eksekutif. Menyikapi pertanyaan terhadap fungsi BEM, Kailani menanggapi, "Saya pernah ditanya apa untungnya *nge-BEM*. Saya melihat bahwa BEM ini punya suatu hal yang tidak tertulis, tapi itu menjanjikan, yaitu relasi. Pascakampus itu kan tidak akan jauh dari dunia kerja dan di sana akan bersosialisasi." Jawaban tersebut meleset dari esensi pertanyaan dan terlalu klise.

Alih-alih menjawab manfaat keberadaan BEM, Kailani malah memberikan alasan bergabung dengan BEM seakan mempromosikannya sebagai agen penyalur kerja dan lembaga kursus kepemimpinan. Kailani melanjutkan, "Apa yang bisa dijanjikan? BEM sebagai ruang belajar. Kalau mau belajar desain, ada kementeriannya. Kalau mau belajar event, ada badan khususnya. Kalau mau belajar advokasi, ada kementerian advokasi." Pernyataan ini mempertegas adanya distorsi fungsional dan menyebabkan disorientasi eksistensi BEM yang kian menjauh dari kepentingan massa.

BEM terbentuk karena mahasiswa memerlukan *counter-power* untuk mengawasi kebijakan kampus. BEM sebagai garda terdepan yang dapat membela hak-hak mereka, bukan hanya tempat memperindah *Curriculum Vitae* pengurusnya. Mahasiswa yang bayar UKT tidak butuh BEM menjadi tempat les dan panitia acara hiburan, mereka butuh BEM menjadi tameng saat berhadapan dengan birokrasi rektorat. Mahasiswa mengharapkan BEM sebagai representasi suara mahasiswa terhadap kebijakan yang diskriminatif dan eksploitatif. Sebagai badan eksekutif, BEM harus peka terhadap isu substansial yang ada dan memposisikan diri sebagai jembatan antara suara mahasiswa dengan pemangku kebijakan.

Menempatkan advokasi dalam posisi yang sejajar dengan kelas desain atau manajemen pelaksanaan konser sebagai sekadar pilihan "modul belajar" adalah bentuk penyusutan makna perjuangan. Advokasi tidak lagi dipandang sebagai fungsi dasar BEM untuk membela hak mahasiswa, melainkan hanya sebagai fungsi dasar BEM untuk mempercantik portofolio anggota. Jika BEM

bawa arus dalam tren program kerja, maka ia kehilangan unggulannya, kecuali bagi mereka yang katanya mencari relasi. BEM tidak dapat disamakan dengan UKM dan Ormawa yang berfokus pada pengembangan *skill* tertentu. Karena pada dasarnya, BEM bukanlah *skill-builder*, tetapi simbol representasi mahasiswa.

Fungsi Eksternal 2026: Antara Birokratisasi Isu dan Nyali Turun ke Jalan

Kepengurusan BEM UNS periode sebelumnya terjebak pada aksi simbolik dan kajian di Instagram yang minim partisipasi massa. Peserta konsolidasi umumnya hanya terdiri dari anggota BEM dan segelintir aktivis kampus, tanpa melibatkan mahasiswa secara luas. Dalam merespons kritik ini, Kailani menawarkan sejumlah strategi untuk kabinet 2026, seperti inventarisasi isu, *timeline* eskalasi, propaganda terukur, dan pembentukan Sekolah Politik Pergerakan.

"Pertama, tahun ini kami punya program inventarisasi isu. Sebelum isu itu naik, kami inventarisasi dulu secara luas isu-isu apa yang menjadi sorotan. Setelah itu, melakukan konsolidasi. Pergerakan hari ini jangan sampai jadi pergerakan yang reaktif, mesti punya timeline kapan isu ini akan dieskalasikan. Secara kajian juga harus lebih siap dan penyebarluasan propaganda harus lebih terukur. Kami juga merencanakan Sekolah Politik Pergerakan sebagai langkah edukasi untuk mahasiswa. Demokrasi dan aksi massa itu butuh konsolidasi internal, pengkajian isu, baru setelah itu kami menetapkan langkah selanjutnya," tutur Presiden BEM UNS 2026 tersebut.

Secara administratif, gagasan ini tampak rapi dan sistematis. Namun, pendekatan tersebut justru memunculkan kekhawatiran baru, yakni potensi birokratisasi pergerakan. Pernyataan bahwa pergerakan tidak boleh reaktif menjadi paradoks dalam konteks realitas politik di Indonesia, yakni kebijakan sering kali disahkan secara mendadak. Situasi seperti ini menuntut respons yang cepat. Jika setiap isu harus melewati proses birokrasi internal, maka momentum perlawanan berpotensi hilang.

Rencana pembentukan Sekolah Politik Pergerakan juga patut dikritisi. Meskipun memiliki tujuan edukatif, program ini berpotensi menjadi dalih untuk menunda aksi. Pertanyaan mendasarnya adalah: *siapa yang akan menjadi peserta?* Jika hanya terbatas pada anggota BEM atau kelompok tertentu, maka elitisme dalam tubuh BEM akan terus berlanjut. Pada akhirnya, fungsi eksternal BEM tidak diukur dari banyaknya kajian yang dibuat, kerapian timeline, atau estetika konten media sosial. Ukuran keberhasilan pergerakan terletak pada daya tekan politik yang dihasilkan. Jika keberhasilan hanya diukur dari aktivitas administratif, maka pergerakan tersebut kehilangan maknanya.

Kesimpulan

Upaya BEM UNS periode 2026 untuk menggabungkan pelaksanaan *event* dengan eskalasi perjuangan justru berpotensi melahirkan birokratisasi gerakan. Relevansi BEM bergantung pada keberanian internal organisasi untuk meninggalkan mentalitas bermain aman dan kepentingan pragmatis. Eksistensi BEM UNS dipertaruhkan pada kemampuannya dalam memprioritaskan kepentingan mahasiswa di atas kepentingan individu pengurus.

BEM harus dikembalikan pada posisinya sebagai lembaga representatif yang mengawasi kekuasaan, menyuarakan aspirasi mahasiswa, dan mengkritisi kebijakan. Bukan sebagai lembaga kursus kepemimpinan atau penyelenggara hiburan yang tidak berbeda dengan UKM dan ormawa. Kegagalan dalam mengembalikan marwah advokasi sebagai prioritas utama akan mengonfirmasi bahwa BEM telah mengalami pergeseran menjadi entitas yang kehilangan taring politiknya.

Ilustrasi: *Fathiya Hafidza*

KETIKA KRITIK TANPA WAJAH: DILEMA AKUN ANONIM DI RUANG KAMPUS

Penulis: Dzakiya Khairun Nisa dan Zulfi Khoirunisa

Cara berkomunikasi manusia modern tidak lagi bisa dilepaskan dari media sosial. Kita sepakat bahwa internet telah berhasil mendistribusikan atau barangkali mendemokratisasi informasi. Perkembangan platform digital juga turut memodifikasi cara kita untuk melacak, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Salah satu fenomena menarik di media sosial, terkhusus Instagram, adalah keberadaan akun anonim.

Kemunculan akun anonim seperti *@kentingansantuy, @bocoralus.uns,* dan *@anomaliuns* mengindikasikan bahwa praktik komunikasi yang tidak menunjukkan identitas bukan lagi pengecualian. Dinamika politik kampus telah bertransformasi menuju ruang daring. Kanal formal penyaluran kritik dalam bentuk forum organisasi yang dipercaya dapat menyampaikan aspirasi mahasiswa kerap dipersepsikan memiliki keterbatasan, sehingga tidak mampu menampung keresahan yang terus berkembang. Di tengah kebuntuan tersebut, media sosial menjelma sebagai medium alternatif yang tak hanya berbicara, tetapi juga melawan.

Di antara arus itu, lahirlah akun-akun tanpa wajah. Semakin kabur identitas seseorang, akan semakin berani pula ia berbicara. Di balik nama samaran, foto profil yang kabur, dan tanpa jejak personal, terbitlah keberanian yang kerap absen di dunia nyata. Pseudonimitas tidak sekadar menjadi bentuk penyamaran, tetapi juga strategi atau mungkin pelarian untuk membuka ruang ekspresi yang selama ini terasa sempit.

Namun, kehadiran mereka juga menumbuhkan persoalan yang lebih kompleks. Apakah keberadaan akun-akun anonim tersebut benar-benar memperkuat demokrasi kam-

pus sebagai alat kritik alternatif? Atau justru menjelma menjadi instrumen politik tanpa akuntabilitas? Pertanyaan ini penting, mengingat maraknya akun *underground* dapat dibaca sebagai refleksi dari kualitas politik kampus itu sendiri.

Ruang anonim tidak mungkin lahir begitu saja. Ia tumbuh dari latar sosial-politik kampus itu sendiri. Menurut pengakuan *@kentingansantuy* saat diwawancarai (28/2/2026), kehadiran arena kritik alternatif ini berakar dari kecenderungan mahasiswa yang lebih melihat "siapa" yang berbicara ketimbang "apa" yang dibicarakan. Kedekatan dengan aktor politik seringkali dipandang lebih penting dibanding substansi argumen yang dibawa. Akibatnya, argumen yang berbasis fakta dan logika kerap dipatahkan, terutama ketika disampaikan dalam forum konsolidasi.

Dalam wawancara (27/2/2026), admin akun *@anomaliuns* menegaskan, "Setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya di media sebagai bentuk pelampiasan keresahannya." Ia menambahkan bahwa independensi mereka tidak didasari oleh alasan yang bersifat *ndakik-ndakik* atau dibuat-buat.

Klaim penyambung lidah yang melekat pada elite organisasi mahasiswa perlu dibongkar ulang. Setiap suara yang mengatasnamakan mahasiswa bisa saja tidak betul-betul merepresentasikan kepentingan kolektif. Dalam situasi tertentu, kuasa representasi dapat digeser menjadi alat produksi pengaruh yang rentan ditarik menjadi kepentingan golongan. Persoalan ini berkelindan dengan rendahnya literasi politik mahasiswa, sementara elite organisasi gagal menjalankan fungsi edukatifnya untuk membangun kesadaran politik di internalnya sendiri. Akibatnya, politik kampus kehilangan dimensi pedagogis dan lebih menyerupai arena sirkulasi elite tanpa transformasi berarti. Dalam celah itulah akun-akun anonim hadir bukan sebagai solusi ideal, melainkan sebagai umpan balik atas kekosongan yang dibiarkan terbuka.

Pemetaan Akun *Underground* UNS

Jika ditelusuri lebih jauh, pola yang dipetakan akun-akun tersebut relatif seragam. Dari segi karakter konten, umumnya mereka mengusung gaya satire, kritik tajam, hingga bocoran internal yang tidak mungkin didapat dari kanal resmi. Opini yang mereka sebarluaskan juga bergerak bebas tanpa batas institusional. Narasi yang dibangun membuat konten mereka mudah viral sekaligus membentuk persepsi mahasiswa dalam memandang kebijakan dan aktor politik kampus.

Untuk melihat pengaruhnya secara konkret, *@kentingansantuy* dapat dijadikan contoh. Dengan sekitar 3,8 ribu pengikut dan 170 unggahan, akun ini menunjukkan bagaimana kontennya mampu menjangkau audiens. Unggahannya yang berkolaborasi dengan akun anonim lain pada 21 Juli 2025—yang mengangkat *meme* isu dugaan kedekatan Presiden BEM UNS 2025 dengan aktor politik eksternal—mampu meraih 24,6 ribu likes dan 83 komentar. Angka ini tidak hanya melampaui basis pengikutnya, tetapi juga menandakan bagaimana konten yang diangkat dapat melampaui batas distribusi normal dan masuk ke dalam sirkulasi

percakapan yang lebih luas. Ia juga mengangkat dinamika demonstrasi, kasus kekerasan seksual, serta evaluasi pelaksanaan Pemilu UNS. Kontennya bergerak luwes dari politik kampus hingga isu nasional. Dari kritik hingga ejekan. Ia berbicara tentang kegelisahan yang tidak mungkin tersalurkan jika ia menampakkan identitasnya. Melalui narasi dan simbol "Media Alternatif 11 Maret" serta tagar #OposisiPermanen, akun ini secara gamblang menegaskan bahwa posisinya tidak netral. Ia berdiri sebagai aktor oposisi yang secara aktif berupaya menantang arus utama.

Peran Akun Anonim dalam Politik Kampus

Akun anonim berperan dalam mengangkat kasus yang tidak dibahas oleh media resmi kampus, sehingga ramai dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari warga kampus yang pada akhirnya mendorong diskursus publik di kalangan mahasiswa. Hal tersebut sejalan dengan pengakuan *@kentingansantuy* (2/3/2026) bahwa keberadaannya adalah sebagai "bahan bakar" bagi mahasiswa dengan menyajikan informasi terkait isu-isu penting sehingga memicu adanya gebrakan-gebrakan baru. Selain itu, akun anonim memiliki peran penting dalam pergerakan politik di kampus. Salah satunya adalah menjalankan kritik dan kontrol sosial terhadap organisasi di dalam maupun luar kampus serta mengenai birokrasi kampus.

Berkaitan dengan hal itu, akun anonim juga menjadi ruang alternatif bagi mahasiswa di luar struktur formal kampus. Pada saat kanal resmi seperti BEM atau organisasi kemahasiswaan yang sering terikat birokrasi dan kepentingan tertentu, akun anonim hadir sebagai oposisi yang lebih bebas dan tidak terafiliasi. Dengan melaporkan isu melalui akun anonim, mahasiswa bisa menyuarakan kritik terhadap praktik organisasi, kebijakan kampus, hingga masalah-masalah internal tanpa khawatir terhadap tekanan sosial maupun struktural. Namun, kebebasan tersebut juga menuntut tanggung jawab agar tetap terkontrol sehingga kritik yang disampaikan tidak bergeser menjadi serangan personal atau menjadi ladang berita bohong atau hoaks.

Problem Etis dan Politik Akun Anonim

Di sisi lain, akun-akun anonim selalu membawa anonimitas yang tidak hanya menghadirkan kebebasan, tetapi juga menimbulkan berbagai risiko yang lebih kompleks, tak hanya berpotensi menjadi wadah penyebaran informasi palsu (hoaks), informasi yang menyesatkan yang memicu keresahan, bahkan konflik di masyarakat. Selain itu, kekeliruan acap kali muncul pada masyarakat kampus yang menyamakan akun anonim dengan fungsi *watchdog* seperti pers. Padahal, pers bekerja dengan prosedur yang jelas verifikasi, kode etik, dan akuntabilitas sementara akun anonim beroperasi tanpa identitas dan tanpa mekanisme pertanggungjawaban.

Lebih jauh, ketiadaan identitas membuka kemungkinan adanya agenda-agenda tersembunyi. Publik tidak pernah benar-be-

nar tahu siapa di balik akun tersebut dan kepentingan apa yang dibawanya. Dalam konteks kampus, akun anonim berpotensi menjadi instrumen politik terselubung, baik untuk kepentingan kelompok tertentu maupun afiliasi organisasi di luar kampus. Dugaan keterkaitan dengan kelompok tertentu menunjukkan bahwa anonimitas tidak selalu berarti independen, melainkan bisa menjadi strategi untuk menyamarkan posisi politik.

Selain itu, sulit bagi pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, atau permintaan tanggung jawab atas konten yang bersifat melanggar hukum akibat identitas asli yang tidak diketahui. Serta tanpa standar verifikasi, informasi yang disebarkan rentan bias dan manipulatif. Hal ini berisiko menurunkan kualitas diskursus publik, dimana kritik berbasis isu bergeser menjadi serangan personal dan opini spekulatif. Bahkan, sebagian pengguna hanya berfokus mengekspresikan pendapatnya tanpa memperhatikan etika komunikasi karena kerahasiaan identitasnya sehingga kritik yang seharusnya menyoroti isu malah menjadi serangan terhadap individu. Hal tersebut bisa membuat dinamika di ruang publik menjadi semakin keruh karena memperbesar kesalahpahaman dan memicu konflik alih-alih mendorong evaluasi.

Kesimpulan

Pada akhirnya, fenomena akun anonim bukanlah sekadar fenomena sederhana yang hitam-putih. Meski sebagian akun tidak merespon ketika dihubungi, seolah mengisyaratkan penolakan ketika diajak berdiskusi, patut meyakini bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Media sosial menjadi pilihan paling mudah sebab nilai yang disampaikan tersebar cepat, menjangkau luas, dan relatif aman bagi yang tak ingin dikenali.

Akun anonim lahir sebagai wujud respons atas keterbatasan ruang kritik formal di kampus. Keberadaannya sebagai oposisi perlu diakui dapat menjaga keseimbangan kekuasaan *(checks and balances)* alternatif di ruang kampus. Perannya juga membantu menjalankan kontrol sosial agar demokrasi kampus tidak melenceng dari jalurnya. Popularitasnya di dunia maya dapat memantik ruang diskursus alternatif yang berpotensi menghasilkan perubahan keputusan atau kebijakan dalam lingkup kampus. Di sisi lain, absennya identitas jelas berpotensi membuka ruang bagi informasi palsu, sekaligus memungkinkan serangan personal tanpa tanggung jawab.

Namun, yang menjadi masalah utama bukanlah tentang ada atau tiadanya akun anonim. Akan tetapi, tentang bagaimana budaya berkomunikasi yang dibangun. Seperti pesan *@kentingansantuy* pada Senin (25/8/2025), “Berpijaklah pada prinsip *anglaras ilining banyu, angeli ananging ora keli* (mengikuti arus, tetapi tidak hanyut).” Kanal formal mesti dibenahi agar lebih responsif, inklusif, dan transparan terhadap aspirasi mahasiswa. Sementara itu, akun anonim juga dituntut untuk tetap kritis dan bertanggung jawab dengan berfokus pada isu yang dibahas, bukan pada individu yang berkaitan. Oleh karena itu, perlu menjadi refleksi bersama terkait dilema keberadaan akun anonim. Apakah kita ingin membangun budaya kritik yang sehat? Atau malah tak acuh terhadap ruang publik yang diramaikan oleh suara tanpa tanggung jawab?

KEKUASAAN, WACANA, DAN APATISME: RELEVANSI POLITIK KAMPUS DALAM BUKU ‘ANIMAL FARM’ KARYA GEORGE ORWELL (1945)

Penulis: Alya Tian Shafara

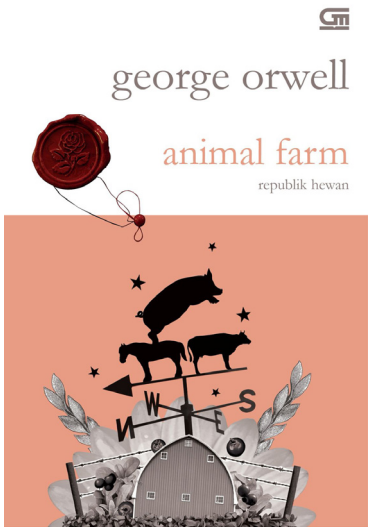

Judul: Animal Farm
Pengarang: George Orwell
Tahun Terbit: 1945
Negara Asal: Britania Raya
Bahasa Asli: Bahasa Inggris
Genre: Fiksi Alegoris, Satir Politik

Novel *Animal Farm* karya George Orwell mengisahkan kehidupan para hewan di sebuah peternakan yang memberontak terhadap pemiliknya, Mr. Jones, karena merasa dieksploitasi dan diperlakukan tidak adil. Pemberontakan ini dipicu oleh gagasan Old Major, seekor babi tua yang mengajarkan bahwa semua hewan berhak hidup bebas tanpa penindasan manusia. Setelah berhasil mengusir manusia, para hewan mengambil alih peternakan dan menamainya *“Animal Farm”*. Mereka membangun sistem baru yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, yang dirumuskan dalam tujuh perintah (*Seven Commandments*), dengan semboyan bahwa semua hewan adalah setara.

Pada tahap awal, kehidupan di peternakan berjalan dengan baik. Para hewan bekerja sama dan merasakan hasil dari kerja mereka sendiri. Kepemimpinan dipegang oleh dua babi, Napoleon dan Snowball, yang memiliki visi berbeda dalam mengembangkan peternakan. Snowball cenderung progresif dan inovatif, sementara Napoleon lebih tertutup dan berorientasi pada kekuasaan.

Konflik muncul ketika Napoleon mengusir Snowball dan mengambil alih kepemimpinan secara mutlak. Sejak saat itu, sistem yang awalnya kolektif berubah menjadi otoriter. Napoleon, bersama kelompok babi lainnya, mulai menikmati berbagai keistimewaan dan secara perlahan mengubah aturan-aturan yang telah disepakati. Melalui propaganda yang disebarkan oleh Squealer, para hewan lain dibuat percaya bahwa semua perubahan dilakukan demi kebaikan bersama. Namun, realitas menunjukkan sebaliknya: para hewan pekerja tetap hidup dalam kesulitan, sementara para pemimpin semakin berkuasa. Pada akhirnya, perbedaan antara babi dan manusia menjadi semakin kabur. Para babi bahkan mulai berjalan dengan dua kaki dan berinteraksi dengan manusia, sehingga para hewan lain tidak lagi mampu membedakan siapa yang sebenarnya mereka lawan dahulu.

Secara keseluruhan, *Animal Farm* menggambarkan bagaimana sebuah revolusi yang

Ilustrasi: *Mecca Ash Shiffasetia Saputra*

berangkat dari idealisme dapat berubah menjadi sistem penindasan baru ketika kekuasaan terpusat pada segelintir pihak dan tidak diawasi secara kritis.

Pendahuluan

Novel *Animal Farm* karya George Orwell merupakan salah satu teks alegori politik paling berpengaruh dalam kajian sastra modern. Karya ini tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap rezim totalitarian, tetapi juga sebagai refleksi universal mengenai kecenderungan kekuasaan untuk menyimpang dari prinsip awalnya. Melalui bentuk fabel yang tampak sederhana, Orwell berhasil membangun narasi kompleks tentang revolusi, legitimasi kekuasaan, manipulasi ideologi, dan degradasi moral dalam sistem politik. Novel *Animal Farm* karya George Orwell ini mengungkap kecenderungan inheren kekuasaan untuk mengalami korupsi. Meskipun sering dibaca dalam konteks Revolusi Rusia, teks ini memiliki daya jangkau yang lebih luas karena memotret pola universal dalam praktik kekuasaan: transformasi dari idealisme menuju dominasi.

Dalam konteks yang lebih lokal, nilai-nilai yang terkandung dalam *Animal Farm* dapat ditransformasikan sebagai alat analisis untuk memahami dinamika politik di lingkungan akademik, khususnya di Universitas Sebelas Maret (UNS). Kampus sebagai miniatur pemerintahan tidak terlepas dari praktik kekuasaan, negosiasi kepentingan, serta konflik ideologis yang sering kali mencerminkan struktur politik yang lebih luas. Kampus juga berperan sebagai ruang demokrasi yang seharusnya menjadi tempat reproduksi nilai-nilai kritis, tetapi pada kenyataannya seringkali justru mereplikasi pola kekuasaan yang problematik. Oleh karena itu, tulisan ini berargumen bahwa Animal Farm tidak hanya mencerminkan realitas politik kampus, tetapi juga mengungkap akar struk-

tural dari problem tersebut.

Sinopsis dan Struktur Naratif

Cerita bermula dari pidato Old Major yang menanamkan kesadaran kolektif kepada para hewan mengenai penindasan yang mereka alami di bawah kekuasaan manusia. Pidato ini menjadi titik awal lahirnya ideologi animalisme, yang berlandaskan pada kesetaraan dan kebebasan. Setelah pemberontakan berhasil, sistem baru dibangun dengan tujuh perintah utama sebagai fondasi hukum.

Namun, struktur naratif novel ini menunjukkan pola siklus kekuasaan: dari revolusi menuju institusionalisasi, lalu menuju degenerasi. Konflik utama muncul ketika Napoleon dan Snowball bersaing dalam menentukan arah kebijakan. Pengusiran Snowball menandai awal konsolidasi kekuasaan oleh Napoleon, yang kemudian mengubah sistem kolektif menjadi otoritarianisme terselubung. Secara struktural, alur ini dapat dibaca sebagai kritik terhadap kegagalan revolusi dalam mempertahankan idealismenya. Transformasi peternakan berubah menjadi rezim yang represif menunjukkan bahwa perubahan sistem tidak selalu menjamin perubahan nilai.

Analisis pada Alegori dan Simbolisme dalam Konteks Sosial Politik

1. Alegori Kekuasaan

Animal Farm secara luas dipahami sebagai alegori terhadap peristiwa Revolusi Rusia dan lahirnya rezim Joseph Stalin. Napoleon merepresentasikan figur pemimpin otoriter yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, sementara Snowball sering dikaitkan dengan Leon Trotsky sebagai simbol intelektual revolusioner. Namun, pembacaan alegoris tidak harus dibatasi pada konteks sejarah tersebut. Secara konseptual, novel ini menggambarkan bagaimana kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu, ideologi dapat digunakan sebagai alat legitimasi, dan bahasa menjadi instrumen kontrol sosial.

2. Manipulasi Bahasa dan Wacana

Perubahan tujuh perintah *(Seven Commandments)* dalam novel merupakan contoh konkret bagaimana bahasa digunakan untuk mengaburkan realitas. Kalimat-kalimat yang awalnya tegas secara perlahan dimodifikasi untuk menyesuaikan kepentingan penguasa. Fenomena ini dapat dianalisis melalui pendekatan pragmatik dan analisis wacana kritis. Makna literal (semantik) tetap tampak konsisten, tetapi makna kontekstual (pragmatik) mengalami distorsi. Dengan demikian, bahasa tidak lagi berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai instrumen dominasi.

3. Representasi Kelas Sosial

Tokoh Boxer merepresentasikan kelas pekerja yang loyal, tetapi tidak kritis. Ia percaya pada slogan *"Napoleon is always right"* yang mencerminkan internalisasi ideologi dominan tanpa refleksi. Sebaliknya, babi-babi melambangkan elite intelektual yang memiliki akses terhadap pengetahuan dan kekuasaan. Ketimpangan ini menciptakan stratifikasi sosial baru yang bertentangan dengan prinsip awal revolusi.

Argumentasi Utama: Kekuasaan Cenderung Menyimpang Tanpa Kontrol Kritis

Salah satu pembahasan utama yang dapat ditarik dari *Animal Farm* adalah bahwa kekuasaan, tanpa mekanisme kontrol yang kuat, hampir pasti akan menyimpang dari tujuan awalnya. Transformasi Napoleon dari pemimpin revolusioner menjadi otoriter menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya individu, melainkan struktur yang memungkinkan konsentrasi kekuasaan. Argumentasi ini relevan secara langsung dengan politik kampus UNS, yakni sistem organisasi mahasiswa sering kali tidak memiliki mekanisme *checks and balances* yang efektif, transparansi bersifat formalitas, bukan praktik substantif, dan kritik internal cenderung dilemahkan oleh solidaritas kelompok. Dengan demikian, masalah dalam politik kampus bukan sekadar "oknum", melainkan kegagalan sistemik dalam menjaga distribusi kekuasaan.

Bahasa Sebagai Instrumen Dominasi: Argumen Tentang

Manipulasi Wacana

Dalam *Animal Farm*, perubahan tujuh perintah mencerminkan manipulasi bahasa untuk kepentingan elite. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap wacana sama pentingnya dengan kontrol terhadap struktur kekuasaan. Argumen yang dapat diajukan dalam politik kampus UNS, dominasi tidak selalu dilakukan melalui tindakan represif, tetapi melalui penguasaan narasi. Contohnya terdapat program kerja dikemas secara simbolik tanpa evaluasi kritis, kegagalan dalam organisasi ditutupi melalui *framing* positif, serta kritik dianggap sebagai ancaman, bukan bagian dari demokrasi. Dengan kata lain, mahasiswa tidak hanya "dipimpin", tetapi juga "dibentuk cara berpikirnya" melalui wacana yang dikontrol.

Kritik Terhadap Apatisme Mahasiswa

Tokoh Boxer dalam novel melambangkan kelas yang loyal tetapi tidak reflektif. Ia bekerja keras, tetapi tidak pernah mempertanyakan sistem yang mengeksploitasinya. Di sinilah terdapat argumen penting yang perlu ditegaskan, yaitu adanya dinamika politik kampus tidak hanya terletak pada elite organisasi, tetapi juga pada kultur mahasiswa yang cenderung apatis. Adapun hal yang biasanya disepelekan, yakni rendahnya partisipasi dalam pemilu organisasi, minimnya budaya diskusi kritis, dan adanya kecenderungan menerima kebijakan tanpa evaluasi. Dalam perspektif ini, apatisme bukan sekadar sikap pasif, melainkan faktor yang secara aktif memungkinkan reproduksi kekuasaan yang tidak sehat.

Oligarki Mahasiswa Sebagai Reproduksi Struktur Kekuasaan

Dalam *Animal Farm,* kekuasaan akhirnya terkonsentrasi pada kelompok babi. Fenomena serupa dapat diamati dalam politik kampus UNS melalui terbentuknya jaringan kekuasaan yang relatif tertutup. Politik kampus cenderung mengalami oligarkisasi karena adanya reproduksi elite yang tidak berbasis meritokrasi sepenuhnya. Hal ini terlihat dari adanya dominasi kelompok tertentu dalam kepemimpinan organisasi, pola kaderisasi yang eksklusif, dan terbatasnya akses bagi mahasiswa di luar lingkaran inti. Akibatnya, demokrasi kampus menjadi prosedural, tetapi tidak substantif.

Refleksi Normatif: Kampus sebagai Ruang Emansipasi atau Reproduksi Kekuasaan?

Secara ideal, kampus harus menjadi ruang emansipasi intelektual yang mendorong kebebasan berpikir, kritik terhadap kekuasaan, dan partisipasi aktif bagi mahasiswa. Namun, jika dilihat melalui paradigma buku *Animal Farm*, terdapat kecenderungan bahwa kampus justru menjadi ruang reproduksi praktik kekuasaan yang sama dengan masyarakat luas. Dengan demikian, argumen utama tulisan ini dapat ditegaskan kembali. Tanpa kesadaran kritis kolektif, politik kampus akan terus mengulang pola yang sama, dari idealisme menuju dominasi, dari demokrasi menuju oligarki.

Kesimpulan

Animal Farm tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap rezim tertentu, tetapi juga sebagai peringatan universal tentang sifat kekuasaan. Dalam konteks politik kampus di UNS, novel ini menunjukkan bahwa adanya kekuasaan cenderung menyimpang tanpa kontrol, bahasa dapat digunakan sebagai alat legitimasi dominasi, apatisme mahasiswa memperkuat ketimpangan kekuasaan, dan struktur organisasi berpotensi melahirkan oligarki. Secara argumentatif, dapat disimpulkan bahwa perbaikan politik kampus tidak cukup dilakukan melalui pergantian pemimpin, tetapi memerlukan transformasi budaya politik mahasiswa secara menyeluruh, terutama dalam membangun sikap kritis, transparansi, dan partisipasi aktif.

MOSI TIDAK PERCAYA: DENTUMAN AMARAH MELAWAN POLITIK BERMASALAH

Penulis: Jazzika Andini

Lirik

Ini masalah kuasa
Alibimu berharga
Kalau kami tak percaya
Lantas kau mau apa
Kamu tak berubah
Selalu mencari celah
Lalu semakin parah
Tak ada jalan tengah
Jelas kalau kami marah
Kamu dipercaya susah
Pantas kalau kami resah
Sebab argumenmu payah
Kamu tak berubah
Selalu mencari celah
Lalu semakin parah
Tak ada jalan tengah
Kamu ciderai janji
Luka belum terobati
Janjimu pelan-pelan akan menelanmu
Janjimu pelan-pelan akan menelanmu
Janjimu pelan-pelan akan menelanmu
Janjimu pelan-pelan akan menelanmu
Kamu ciderai janji
Luka belum terobati
Kami tak mau dibeli
Kami tak bisa dibeli
Ini mosi tidak percaya jangan anggap kami tak berdaya
Ini mosi tidak percaya kami tak mau lagi diperdaya
Ini mosi tidak percaya jangan anggap kami tak berdaya
Ini mosi tidak percaya kami tak mau lagi diperdaya
Ini mosi tidak percaya jangan anggap kami tak berdaya
Ini mosi tidak percaya kami tak mau lagi diperdaya
Ini mosi tidak percaya jangan anggap kami tak berdaya
Ini mosi tidak percaya kami tak mau lagi diperdaya

Identitas Karya
Judul: Mosi Tidak Percaya
Artis: Efek Rumah Kaca
Tahun Rilis: 2008
Album: Kamar Gelap
Genre: Indie Rock/Alternatif, Pop-Rock

Lagu *Mosi Tidak Percaya* karya *band* Efek Rumah Kaca lahir sebagai bentuk kegelisahan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan politik. Lagu yang dirilis tahun 2008 ini, menyampaikan pesan kritik terhadap pemimpin yang dianggap tidak mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Melalui lagu ini, masyarakat diajak untuk turut mempertanyakan kebijakan dan tindakan pemimpin yang tidak lagi berpihak pada kepentingan publik. Lagu ini memiliki tema utama tentang ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang ingkar janji. Dengan berbagai topeng manipulatif, masyarakat tidak ingin lagi dibohongi oleh janji manis para pejabat. Lagu ini lahir sebagai jembatan atas kekecewaan publik yang menegaskan posisinya sebagai kritik terhadap praktik politik yang menyimpang dari kepentingan publik.

Di kehidupan kampus, suara-suara mahasiswa dalam dinamika politik kampus kerap muncul sebagai bentuk sikap kritis terhadap kepemimpinan organisasi yang dinilai bermasalah. Dalam proses pemilihan maupun pelaksanaan program kerja, tidak jarang muncul janji-janji yang kemudian sulit direalisasikan. Aspirasi yang disuarakan mahasiswa bukan sekadar angin lalang, melainkan bentuk penuntutan agar kebijakan organisasi lebih terbuka terhadap evaluasi dan perubahan. Namun, ketika respons yang diberikan justru berputar-putar dan menjauh dari persoalan utama, kritik mahasiswa semakin menggema.

Kondisi tersebut sejalan dengan pesan yang disampaikan dalam lagu *Mosi Tidak Percaya* karya Efek Rumah Kaca, yang menggambarkan keberanian masyarakat untuk menyuarakan ketidakpercayaan terhadap pemimpin yang dianggap tidak menjalankan amanah kekuasaannya. Sejak dentuman pembuka yang tegas dan lugas, Efek Rumah Kaca seakan langsung menghantam dengan gaya kritik perlawanannya melalui lirik,*"Ini masalah kuasa, alibimu berharga. Kalau kami tak percaya, lantas kau mau apa."* Lirik ini secara langsung merefleksikan dinamika politik kampus, khususnya dalam relasi antara pengurus organisasi dan mahasiswa. Kepemimpinan di kampus seringkali cenderung untuk mencari kebenaran citra atas tindakannya, daripada menanggapi kritik mahasiswa secara terbuka. Lalu ketika kepercayaan mahasiswa mulai memudar, muncul pertanyaan *"lantas kau mau apa?"* sebagai bentuk desakan agar pemimpin bertanggung jawab atas kebijakannya, bukan sekadar mempertahankan citra.

Melalui alunan musikal yang semakin mendalam, lirik *"Kamu ciderai janji, luka belum terobati / Kami tak mau dibeli, kami tak bisa dibeli"* menjadi cermin realitas politik

kampus yang kerap diwarnai janji yang tak terealisasi. Lirik tersebut dapat menggambarkan adanya pemimpin yang cenderung mengabaikan janji kepada mahasiswa, sekaligus memberikan luka kekecewaan yang terus membekas. Penegasan sikap untuk tidak "dibeli" memperlihatkan adanya penolakan terhadap praktik politik transaksional, termasuk tekanan kepada mahasiswa untuk mendukung kandidat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa berupaya menjaga integritas dan bersikap kritis dalam menentukan pilihan, tanpa terpengaruh kepentingan pihak tertentu.

Ini mosi tidak percaya jangan anggap kami tak berdaya
Ini mosi tidak percaya kami tak mau lagi diperdaya

Pengulangan frasa tersebut menyiratkan bahwa sikap tidak percaya yang disuarakan bukan hanya emosi sesaat, tetapi bentuk keputusan kolektif yang nyata. Dalam konteks politik kampus, hal ini mencerminkan kesadaran mahasiswa yang tidak lagi pasif terhadap kepemimpinan yang bermasalah. Pernyataan *"Jangan anggap kami tak berdaya"* menunjukkan mahasiswa memiliki posisi dan suara yang kuat dalam mengawal jalannya organisasi kampus, sementara *"Kami tak mau lagi diperdaya"* menandakan adanya kesadaran mahasiswa untuk menolak janji tanpa bukti. Pengulangan ini memperkuat pesan perlawanan mahasiswa dalam menuntut kepemimpinan lebih transparan dan bertanggung jawab.

Dengan dentuman penuh gugatan, *Mosi Tidak Percaya* bukan hanya sekadar lagu, melainkan cermin penting bagi mahasiswa dalam menghadapi dinamika politik kampus. Mahasiswa diajak untuk tidak pasif dan berani menyuarakan kritik jika terjadi penyimpangan, juga tetap menjaga integritas agar suara mereka tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. Karya ini bukan sekadar kritik sosial biasa, melainkan sebuah dorongan agar mahasiswa tetap berani berpikir kritis dan menyatakan mosi tidak percaya jika diperlukan. Melalui sikap kritis dan keberanian bersuara, mahasiswa tetap menjadi kekuatan utama yang merawat tegaknya demokrasi di kampus.

REKTOR UNS: POLITIK KAMPUS SAMA DENGAN POLITIK NEGARA

Penulis: Usna Ullysabin Rahmadhani, Irawati Febby Ardyanti
Foto: Muhammad Adirama Putra

1. Bagaimana Rektor memaknai politik kampus di Universitas Sebelas Maret (UNS)?

"Politik kampus ini kita maknai istilahnya sebagai suatu serangkaian aktivitas, kegiatan, kemudian juga advokasi di kampus yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pemahaman atau dengan tujuan belajar mengelola kekuasaan. Belajar untuk bagaimana mahasiswa itu berorganisasi, menyampaikan aspirasi, kemudian juga bagaimana mahasiswa memperjuangkan kepentingannya, sama sebenarnya dengan politik negara itu kan sebenarnya mengelola kekuasaannya untuk tujuan tertentu."

2. Apakah politik kampus ini dipandang sebagai bagian dari pendidikan demokrasi mahasiswa atau justru sebagai potensi gangguan stabilitas kampus?

"Sama dengan ketika bernegara, masyarakatnya wajib berpartisipasi aktif dalam perpolitikan kenegaraan, di kampus juga. Bagi saya, bagi kami terutama adalah itu proses pendidikan. Tidak hanya pendidikan berdemokrasi sebenarnya, jadi ini bisa juga digunakan untuk meraih kompetensi yang tidak mudah dibangku kuliah, ketika Anda belajar itu sebenarnya yang dituntut adalah kompetensi, knowledge, psikomotor, keterampilan, dan soft skill. Soft skill Itu kemampuan berkomunikasi, memimpin, manajemen, dan mengelola konflik itu namanya soft skill."

"Ini agak susah diberikan di bangku kuliah, soft skill itu. Kami mencoba mengembangkan di Fakultas Kedokteran itu sejak 2007 hingga 2011. Kita eksekusi pembelajaran tutorial, artinya pemberian materi kuliah kemudian belajar keterampilan yang di dalamnya itu ada skill lab, kita itu sebenarnya juga ingin melatih soft skill tetapi belum bisa maksimal. Soft skill itu istilahnya untuk mencapai kompetensi tadi ya, salah satu wahana yang menurut kami itu sangat tepat di lingkungan kampus adalah organisasi kemahasiswaan. Bicara organisasi kemahasiswaan, kita kan bicara politik kampus. Jadi, tidak hanya belajar dalam hal berdemokrasi saja sebenarnya, tetapi untuk melatih atau mencapai kompetensi yang penting yakni soft skill karena keberhasilan ke depan Anda itu tidak hanya kompetensi, knowledge dan psikomotor tapi banyak aspek soft skillnya, sehingga kami memandang itu sebagai bagian penting dari proses pembelajaran di kampus."

3. Apakah wewenang dan tugas dari organ-organ *student government* seperti BEM, DEMA, MWA sudah baik dan efektif?

"Ormawa (organisasi mahasiswa) yang sekarang sudah ada jumlahnya kan banyak. Ada BEM juga DEMA, baik itu yang ada di universitas dan fakultas. Itu sebenarnya hanya sebagian dari organisasi kemahasiswaan yang ada dan masih banyak yang lainnya. Ada mapala, pramuka dan sebagainya, itu adalah sebenarnya wahana bernama organisasi kemahasiswaan. Kalau dari sisi apakah sudah mencukupi

ya pandangan kami insyaAllah mencukupi meskipun masih ada peluang untuk membuka ormawa-ormawa baru sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Apakah sesuai dengan peran dan fungsinya, menurut saya sudah cukup ideal, jadi ada eksekutor eksekutifnya, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan ada semacam kayak legislatifnya seperti Dewan Mahasiswa (DEMA), kemudian ada organisasi-organisasi kemahasiswaan yang teknis seperti Voca Erudita, Mapala, dan Pramuka. Nah, tinggal bagaimana mahasiswa itu bisa memanfaatkan itu, bisa memanfaatkan keberadaan organisasi-organisasi yang sudah ada."

4. Sejauh mana independensi *student government* UNS dari intervensi birokrasi kampus?

"Mengenai intervensi, karena ini bagian dari proses pendidikan, maka sebenarnya bahasanya bukan intervensi, tapi pembinaan, pendampingan. Kalau tidak ada pendampingan dan tidak ada pembinaan maka proses pendidikan jadi tidak bisa akan maksimal. Supaya ini bisa berjalan dengan optimal, kami seriusi ini, salah satunya dengan mengembalikan fungsi wakil rektor. Dahulu, bidang kemahasiswaan itu kan menjadi satu dengan akademik padahal bidang akademik sudah berat pekerjaannya sehingga kurang maksimal, maka kami kembalikan wakil rektor, bidang kemahasiswaan sendiri, ada direktur kemahasiswaan, ada subdirektorat juga agar bisa memfasilitasi kemudian melakukan pendampingan dan pembinaan. InsyaAllah kita tidak akan terlalu intervensi. Contoh ketika melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari yang sifatnya itu insidental, misalnya menyelenggarakan pentas musik atau yang terprogram, bahkan menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi, kita akan memberikan fasilitas untuk itu. Misalnya pentas musik, kita memberikan pengarahan seperti mencari sponsor. Sepanjang bisa berjalan sendiri, kita berikan kesempatan. Semakin mandiri semakin bagus, tapi ketika mentok betul dananya kurang, kita sebagai orang tua, guru, itu kita coba bantu fasilitasi. Banyak aspek ke fasilitator kemudian melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, mendorong motivasi, dan sebagainya."

5. Bagaimana rektorat memandang ekosistem BEM UNS yang sering dianggap sebagai panggung personal, seremonial, atau sebatas pembuat *event*?

"Kalau memang dipandang seperti itu berarti memang perlu ditingkatkan, ya, tapi kurang tahu ya apakah ini karena memang ada peraturan yang mengatur. Masa kerja organisasi kemahasiswaan yang satu tahun ini barangkali perlu dievaluasi karena terlalu singkat. Ibaratnya itu baru adaptasi, baru menyusun program, satu-dua program dilaksanakan sudah selesai tugasnya. Sementara nanti begitu terpilih pengurus baru, dia pasti bikin program baru, nggak mungkin meneruskannya jarang sekali seperti itu. Seingat saya zaman dahulu itu dua tahun. Ketika saya mahasiswa saya pernah jadi BPM itu Badan Perwakilan Mahasiswa, sekarang DEMA. Saya juga pernah jadi Ketua Senat, sekarang namanya Presiden BEM. Dua tahun itu ada semacam

proses magang, misal calon atau kandidat Presiden BEM yang akan datang itu ya sekarang jadi wakil terlebih dahulu sehingga nanti betul-betul program itu terstruktur kemudian juga betul-betul untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa disamping juga ada beberapa program yang mengusung tridarma seperti pengabdian masyarakat, riset, dan sebagainya. Jadi perlu dievaluasi kemudian juga memang perlu ditingkatkan, karena satu kepengurusan kemarin ibaratnya baru harmonisasi tahu-tahu sudah pamit, sudah tergantikan. Tetapi, saya menilai dinamikanya kalau dari sisi organisasinya ya sudah cukup baik. Memang kepedulian mahasiswa terhadap organisasi kemahasiswaan atau politik kampus ini perlu dibangkitkan."

6. Terkait evaluasi kepengurusan organisasi mahasiswa, Rektor sempat menyinggung bahwa periode dua tahun dapat lebih efektif dibanding satu tahun yang saat ini mayoritas diterapkan. Dalam praktiknya, terdapat pula individu yang melanjutkan ke periode berikutnya dengan posisi yang lebih tinggi. Bagaimana pandangan Rektor terhadap fenomena adanya individu yang melanjutkan ke posisi lebih tinggi di periode berikutnya, tetapi kurang untuk melakukan evaluasi dari tahun sebelumnya?

"Itu ego dan tidak hanya di BEM, di luar kampus pun seperti itu. Seperti rektor dulu 4 sampai 5 tahun, sekarang ditambah 5 tahun. Kepala desa itu 5 sampai 8 tahun, sekarang diusulkan untuk seumur hidup. Artinya, ini memang perlu dipikirkan mengenai perpanjangan masa, kecuali memang ada aturan yang mengikat karena hampir sebagian besar BEM dan DEMA perguruan tinggi itu setahun, saya belum lihat yang lebih dari setahun. Kalau tidak memungkinkan memang ya harus dilakukan upaya-upaya. Terkait person, ini biasanya juga terkait dengan prosesnya. proses ini yang sekali lagi perlu sama dengan kenegaraan, partisipasi masyarakat pentingnya di situ. Partisipasi mahasiswa dalam proses pemilu Raya itu kan yang ikut nyoblos itu hanya sekitar 2000 dari 40.000 lebih mahasiswa. Kalau pengin proses demokrasi baik sehingga menghasilkan pemimpin yang maksimal prosesnya harus diperbaiki, jangan menyalahkan person atau pemimpinnya."

7. Partisipan Pemilu UNS 2025 hanya sebanyak 2.406 mahasiswa. Menurun dari tahun 2024 yang berjumlah sebanyak 4.867 partisipan. Menurut Rektor, rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pemilu raya mencerminkan apatisme atau justru krisis kepercayaan terhadap sistem yang ada di politik kampus?

"Kalau saya melihatnya yang positif saja, mungkin banyak ketidaktahuan tentang manfaat politik kampus atau berorganisasi. Sebenarnya, mahasiswa itu kadang terjebak. Begitu masuk di dalam benaknya itu, yang namanya prestasi itu indeks prestasi tinggi, fokusnya dikejar di situ, konsentrasinya ke sana sehingga dianggap yang lainnya nggak penting." "Kami para pimpinan terutama saya punya pemikiran yang agak beda, Bagi saya karena saya mengalami sedikit proses dan

juga saya melihat teman-teman lainnya. Keberhasilan nanti Anda di dunia kerja itu 60% bahkan mungkin lebih ditentukan oleh soft skill Anda. Kemampuan kita berkomunikasi, bekerja sama, berkoalisi, mengelola konflik, kepemimpinan, segala macamnya sehingga jangan heran kalau ketika kuliah akademiknya biasa-biasa saja, begitu terjun ke dunia kerja prestasinya jadi luar biasa, itu karena soft skills ketika keluar dari kampus."

8. Apakah rektorat mempunyai rencana konkret untuk mereformasi sistem Pemilu UNS agar lebih partisipatif dan inklusif?

"Saya mendorong, setiap kesempatan selalu saya sampaikan terkait upaya-upaya tersebut. Dari kami sedang memikirkan, bersama Presbem tahun lalu, Faiz Zuhdi. Sewaktu saya masih jadi dekan pernah mencoba memasukkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai persyaratan wisuda untuk setengah memaksa mahasiswa berorganisasi. Akan tetapi, masalahnya di tingkat universitas masih belum bisa diterima. Syarat wisuda selama ini kan bebas perpustakaan, lulus mata seluruh mata kuliah, yudisium, dan segala macam, tambah satu misalnya skor organisasinya, skor kegiatan ekstrakurikulernya, jadi setiap kegiatan ekstrakurikuler ada bobotnya mulai dari ketua pelaksana sampai beberapa pengurus di tingkat fakultas maupun universitas. Misalnya melakukan kegiatan wawancara seperti ini, ada surat tugas dari dewan redaksinya, surat tugas itu juga ada skornya. jadi nanti ketika skor organisasi memenuhi persyaratan, baru boleh wisuda. Maka dari itu, mahasiswa akan beramai-ramai mencari wahana atau organisasi yang tersedia. Mahasiswa akan berbondong-bondong mengaktualisasi diri di situ. Memang kalau ini tidak dibuat terobosan ya susah karena ketika Anda pun nanti habis semesteran pulang ke rumah yang ditanya Bapak Ibu kan nilai IPK. Memang menggambarkan betapa lingkungan kita masih memandang ketika belajar di kampus itu academic oriented padahal ada kompetensi lain yang harus dicapai dan menentukan keberhasilan."

9. Bagaimana tanggapan Rektor terkait fenomena gerakan kotak kosong yang masif pada Pemilu UNS 2025?

"Itu berarti adalah pekerjaan rumah bersama. Kotak kosong itu manifestasi dari dua hal, yaitu perasaan apatis, artinya apatis itu tidak mau tahu atau mereka ingin berkontribusi, tetapi tersumbat yang akhirnya bermanifestasi ke sana (kotak kosong), itu kan seperti golput (golongan putih). Sebenarnya kita bisa mengadopsi yang dilakukan Indonesia itu kan termasuk golputnya itu kan rendah, bandingkan dengan Amerika, negara yang katanya itu demokrasinya yang luar biasa itu tingkat negara saja mereka partisipannya kurang dari 60%. Karena tadi apatis atau mereka merasa tersumbat sehingga menjadi bagian dari manifestasi protes. Menurut saya, memang perlu evaluasi dari ormawa dalam hal ini adalah BEM, lalu dari pihak universitas, dan juga

pihak mahasiswa. Harus ada sosialisasi yang kuat terkait organisasi kemahasiswaan termasuk juga aturan mainnya. Jadi mulai dari AD/ART (Anggaran Dana dan Anggaran Rumah Tangga) sampai petunjuk pelaksanaan di lapangan. Kemudian ada juga mekanisme sehingga ada dorongan kuat atau ada setengah 'dipaksa' agar mahasiswa peduli terhadap organisasi tadi, tapi organisasi juga membuka diri untuk proses demokrasi yang sehat."

10. Bagaimana sikap resmi rektorat terhadap organisasi mahasiswa eksternal kampus (ormek)?

"Kalau kita ya memfasilitasi organisasi kemahasiswaan (ormawa) yang dinaungi oleh peraturan yang ada di internal kita, keberadaannya mengacu pada SK rektor. Jadi, istilahnya kita fasilitasi, dampingi, dan carikan solusi ketika ada permasalahan. Kami tidak melarang ormek. Misalnya, ada mahasiswa yang mengikuti organisasi eksternal A, tapi di luar kampus. Jadi, kami tidak mengizinkan ormek A untuk mendirikan sekretariat di UNS. Namun, kalau mau aktivitas di luar sebagai organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi ke ormas tertentu kami tidak melarang. Itu juga bagian dari mengasah soft skill juga sebenernya karena wahana beda tantangannya juga beda, tetapi jangan sampai yang namanya ekstra kampus itu dibawa ke dalam kampus secara resmi. Kalau ingin demokrasi semakin sehat, maka sentimen primordial itu akan semakin menipis karena ketika kita bicara politik kekuasaan, orang kadang-kadang menggunakan instrumen dalam memobilisasi massa, seperti bendera. Maka, di situ Anda belajar mengelola itu kan saya tidak mungkin intervensi resmi, melarang jangan membawa nama ormek A, B, C, itu mestinya sudah disadari masing-masing. Sepanjang masih membawa primordial, maka tidak akan ada orang terbaik yang terpilih. Jadi, memang harus betul-betul melepas sentimen primordial sehingga yang akan dipikirkan adalah kompetensi, orang yang memang kita harapkan. Setiap orang kan memiliki idealisme mengenai kriteria pemimpin, seharusnya seperti itu. Maka dari itu, bagaimana mahasiswa di perguruan tinggi bisa menjadi role model bagi masyarakat yang lebih rasional dalam bersikap dan berdemokrasi. Jadi, sah-sah saja sepanjang tidak mendirikan lembaga resmi di dalam lingkup kampus."

11. Apakah Rektor melihat dominasi organisasi mahasiswa eksternal kampus (ormek) tertentu saat ini di lingkungan kampus?

"Belum begitu melihat."

12. Bagaimana sikap Rektor untuk menjaga agar ormek tidak mengkooptasi lembaga representatif mahasiswa?

"Pendidikan politik. Ada semacam pelatihan kepemimpinan setelah pelantikan ormawa. Berbicara dari hati ke hati tidak terlalu formal."

13. Untuk kampus hari ini, apakah

kampus mengelola mahasiswa sebagai subjek kritis atau objek administratif?

"Saya memandang bahwa mahasiswa tidak hanya objek administrasi, tetapi juga kita dorong agar supaya bisa mengembangkan soft skill dengan organisasi sebagai salah satu media. Kami tidak mengekang kalau mereka itu kritis, sudut pandang kami agak berbeda barangkali. Kami menganggap mahasiswa itu sebagai hubungan orang tua-anak, guru-murid, juga mitra. Tugas kami memang mendampingi Anda untuk mencapai kompetensi."

14. Di antara ormawa, yang memiliki kewenangan lebih adalah BEM UNS karena memiliki massa yang banyak, anggotanya juga banyak. Bagaimana evaluasi, terkhusus untuk BEM UNS mengenai kemunculan gerakan kotak kosong, pendidikan politik, dan pengembangan *soft skill*?

"Harus bisa merangkul banyak pihak, termasuk pihak pengelola universitas, pimpinan universitas. Mulai dari wakil rektor, direktorat, direktur, subdirektorat, dan tingkat fakultas agar cara pandang seperti yang saya utarakan tadi dipikirkan bersama di setiap kesempatan. Cuman memang kita menyadari belum semua memiliki cara pandang yang sama, tetapi kita harus terus berusaha sehingga harapan kami, seluruh mahasiswa UNS memiliki cara pandang yang sama. Memandang bahwa ormawa merupakan wahana penting untuk capaian kompetensi soft skill karena agak susah memasukkan soft skill ke ruang kuliah. Seperti halnya wawancara tidak bisa hanya diajarkan tetapi butuh praktek langsung. Belum tadi mengelola konflik supaya kondusif dan tidak menimbulkan efek samping termasuk kotak kosong dan sebagainya. Itu seni dan butuh jam terbang. Jadi, jangan pesimis, buat itu sebagai tantangan untuk mengasah soft skill kita. Ya, gerakan kotak kosong adalah pemantik yang harus diselesaikan. BEM harus memikirkan dibantu ormawa yang lain, kami juga akan memikirkan cara-cara agar supaya ke depan tidak dipermasalahkan lagi untuk proses Pemilu UNS."

15. Bagaimana efektivitas regulasi Undang-Undang yang dibentuk mahasiswa sendiri dalam menjalankan ormawa seperti UU KBM UNS atau AD/ART?

"Melihat pemaparan sebelumnya, berarti memang masih ada PR. mungkin PR itu bisa juga kebijakan di regulasinya atau SOP-nya. Kalau saya masih berkeyakinan dari sisi regulasi semestinya sudah digodok dan diperbaiki dari tahun ke tahun. Mungkin dari SOP dan implementasinya saja yang perlu ditingkatkan lagi."

KOMANDO KETUA KAMMI UNS 2025 DALAM POLITIK KAMPUS UNS

Penulis: Muhammad Raydi Fathi, Reva Marantika

Politik kampus kerap direduksi maknanya, seolah hanya berkutat pada aksi massa dan organisasi mahasiswa. Padahal, realitanya jauh lebih kompleks. Sejarah panjang gerakan mahasiswa menunjukkan bahwa "sumbu-sumbu politik kampus" tidak pernah lahir secara spontan, melainkan hasil dari strategi yang terstruktur, rencana yang terukur, dan intervensi kekuasaan.

Relasi antara organisasi intra kampus dan ekstra kampus membentuk ekosistem politik mahasiswa yang sarat kepentingan. Di dalam ekosistem ini, kaderisasi menjadi instrumen utama melalui proses sistematis yang melahirkan kader dengan ideologi, jaringan, dan kapasitas kepemimpinan. Mesin kaderisasi inilah yang memastikan keberlanjutan pengaruh, sekaligus menjadi faktor dari siapa yang berhak mengisi posisi strategis. Panggung kampus pun menjelma sebagai miniatur politik nasional. Perebutan posisi bukan sekadar soal popularitas, melainkan hasil dari diskusi, reaksi, dan pengaruh kekuatan yang lebih besar. Kemenangan kursi politik kampus, tidak hanya ditentukan oleh dinamika internal mahasiswa, tetapi juga oleh keberhasilan proses kaderisasi dalam menyiapkan figur yang mampu merespons dan memanfaatkan arus kekuasaan yang melingkupinya.

Dalam lanskap politik kampus yang sarat kepentingan inilah, Muhammad Syafnat Fu'aini hadir sebagai Ketua KAMMI UNS 2025 yang memiliki kewenangan strategis untuk mengarahkan gerak mahasiswa. Kepemimpinannya bukan sekadar simbol organisasi, melainkan instrumen politik kampus yang menentukan arah wacana dan distribusi pengaruh. Sosoknya merepresentasikan lebih dari sekadar individu. Ia adalah aktor yang melenting dari proses kaderisasi yang panjang, sekaligus aktor yang kini berada dalam pusaran distribusi pengaruh di kampus. Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret angkatan 2021 ini sejak awal perkuliahan telah aktif di berbagai organisasi.

Motivasi Syafnat sejak awal berorganisasi adalah memperluas relasi sekaligus memperoleh pengalaman di luar kelas. Baginya, ilmu akademik tidak cukup untuk menghadapi kehidupan kampus dan masyarakat. "Dari dulu, aku memang mengejar relasi, untuk mencari rekan dan ilmu. Menurutku pribadi, ilmu di kelas itu kurang karena ilmu untuk bekerja seperti berbicara dan bernegosiasi itu aku cari di organisasi," ujar Syafnat (4/3/2026). Pandangan ini menegaskan bahwa keterampilan praktis seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen organisasi menjadi kebutuhan yang harus terus diasah.

Sejak semester dua, ia mulai aktif di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (HMP) Kabinet Ganesha, Sentra Kegiatan Islam (SKI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Jama'ah Nurul Huda Unit Kegiatan Mahasiswa Islam (JNUK-MI), serta BEM FKIP untuk organisasi intranya. Pada saat yang sama,
ia juga

Ilustrasi: *Nurul Dyah Anggar Lestari*

masuk ke organisasi ekstra melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UNS. Pada tahun berikutnya, keterlibatannya meluas ke BEM UNS dan Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat (BKMWA). Rangkaian pengalaman ini mempertemukannya dengan beragam kultur organisasi dan dinamika politik mahasiswa. Pengalaman ini tidak hanya memperluas jejaringnya, tetapi juga membentuk pemahamannya tentang bagaimana kekuasaan bekerja di dalam kampus.

Pertemuan awalnya dengan KAMMI terjadi dalam momentum keterlibatannya sebagai staf penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilu) UNS pada masa pandemi. Dalam proses itu, ia banyak berdiskusi dengan kakak tingkat mengenai peta organisasi mahasiswa di kampus. Ia menceritakan bahwa awalnya sebagai mahasiswa baru ia belum mengenal berbagai organisasi, sehingga banyak bertanya kepada senior tentang pilihan yang ada mulai dari HMI, GMNI, hingga KAMMI. “Kita banyak *sharing*. Oh, ada ormek ini, ormek itu. Tadinya kan nggak tahu karena maba (mahasiswa baru), tapi terus aku tanya ke kating (kakak tingkat),” ucapnya (4/3/2026). Dari pengenalan tersebut, Syafnat menilai bahwa nilai dan tujuan KAMMI paling sesuai dengan pandangan serta ketertarikannya, sebuah keyakinan yang semakin kuat berkat rekomendasi kakak tingkat. Pertimbangan itu akhirnya mengarahkan langkahnya untuk bergabung dengan KAMMI sebagai staf kader, membuka jalan bagi keterlibatan yang lebih mendalam dalam proses kaderisasi dan kepemimpinan organisasi.

Keterlibatan Syafnat dalam kaderisasi KAMMI berkembang seiring aktivitas organisasinya, hingga akhirnya ia dipercaya memimpin KAMMI UNS periode 2025. Dalam kepemimpinannya, ia menekankan prinsip musyawarah *(syura)* dalam setiap pengambilan keputusan, menolak pola satu komando, dan membuka ruang dialog intens dengan anggota. “Contoh kalau ada keputusan A, kami nggak langsung menerima begitu saja, tapi kita syura. Kita rapatkan dan analisis bersama. Ada masukan, lalu kita konkretkan menjadi keputusan hasil musyawarah,” jelas Syafnat.

Proses terpilihnya sebagai Ketua KAMMI berlangsung melalui musyawarah komisariat pada akhir tahun. Sejumlah kandidat dikumpulkan untuk membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hingga pemilihan calon ketua. Tahapan dilakukan secara sistematis, yakni dengan calon dikumpulkan, diuji visi-misi dan gagasan, lalu disaring berdasarkan kriteria komisariat, sehingga musyawarah tetap berada dalam kerangka seleksi yang ketat. Meski demikian, partisipasi musyawarah berlangsung terbatas, misalnya hanya laki-laki yang hadir karena adanya aturan jam malam bagi perempuan.

Di bawah kepemimpinannya, KAMMI UNS mengusung tiga fokus utama, yaitu pembinaan kader, mentoring personal, dan pergerakan mahasiswa. Pembinaan dilakukan melalui Madrasah KAMMI (MK) Klasikal, seminar, dan *workshop* dengan menghadirkan para ahli. Mentoring menekankan keseimbangan akademik, spiritual, dan sosial; sementara pergerakan diwujudkan dalam aksi, kajian, dan dialog di tingkat universitas atau nasional. Selain itu, terdapat bonding dan penguatan spiritual seperti *ruhiyah* dan pengawasan amal harian. Pendekatan ini menunjukkan upaya membangun kader secara holistik, tidak hanya dalam kapasitas intelektual, tetapi juga spiritual. Namun, sekaligus menegaskan bahwa kaderisasi bukan sekadar proses pendidikan, melainkan juga mekanisme pembentukan identitas dan loyalitas yang berkelanjutan.

Keberhasilan kader KAMMI menduduki posisi strategis di organisasi intra kampus, seperti BEM UNS, seringkali memicu pertanyaan mengenai adanya hak istimewa atau intervensi organisasi. Namun, Syafnat menegaskan bahwa profesionalisme tetap menjadi tolok

ukur utama melalui sistem meritokrasi. “Kalau aku pribadi melihat nggak terlalu, karena kami dalam hal BEM pasti ada yang namanya strukturalogi intra. Nah, di intra itu pasti berbasis dari meritokrasi. Siapa yang paling terbaik di situ, pasti ditaruh di situ. Jadi, kami nggak mungkin menaruh orang-orang yang nggak profesional di situ,” tegasnya. Ia juga mengakui bahwa kedekatan personal menjadi salah satu faktor dalam proses tersebut. “Walaupun dalam hal ini anak KAMMI itu lebih diunggulkan, nggak langsung serta-merta terpilih sehingga bukan faktor penentu. KAMMI itu tidak memperkuat, tapi pada dasarnya kami lebih kenal dia, lebih dipercaya, dan kami tahu keahliannya,” imbuhnya. Eksistensi kader KAMMI di BEM UNS, mulai dari era Agung (2024), Faiz (2025), hingga Kailani (2026), dipandangnya bukan sebagai dominasi kekuasaan, melainkan hasil kontestasi formal. “Oh, sebenarnya kalau dibilang mendominasi, nggak ya karena kita jalurnya, jalur formal. Jadi, kalau apakah ini termasuk dominasi kekuasaan, aku pribadi jawab tidak. Karena apa? Kami melalui jalur pemilu yang sah,” tuturnya.

Namun, Syafnat tidak menutup mata terhadap fenomena minim kontestasi yang terjadi belakangan ini. Dua periode terakhir yang hanya menyuguhkan kotak kosong di Pemilu UNS 2025 dianggapnya sebagai sebuah kemunduran. “Jujur, aku pribadi memang agak menyayangkan, ya. Apakah ini memang dari sistem atau bagaimana? Karena aku lihat banyak orang yang saat ini minat untuk berorganisasi turun,” ungkapnya.

Salah satu faktor yang ia soroti adalah hilangnya instrumen pendidikan politik di kampus. “Mungkin salah satu alasan kemunduran dari perpolitikan kampus, karena dihapuskannya partai mahasiswa. Jadi, kalau ormek terlalu masuk itu, ya tadi nggak boleh, tapi (malah) partai mahasiswa dihapus. Bagaimana mau mencerdaskan politik mahasiswa kalau semua organ itu dihapus?” ucapnya. Di tengah situasi itu, ia justru mengapresiasi kehadiran akun-akun anonim dan peran pers mahasiswa yang masih berani mengangkat isu politik. “Aku *respect* dengan *Kentingan Santuy*, respect dengan *UNS Bacot*. Itu kan akun anonim, tapi dia punya aware terkait politik kampus, walaupun memang diksinya agak kasar.”

Dalam memimpin KAMMI UNS, Syafnat sangat selektif mengenai siapa yang layak memegang tongkat komando, sebagaimana pula KAMMI UNS sebelum kepemimpinannya. Seorang ketua KAMMI UNS harus mencapai jenjang Anggota Biasa 2 (AB2) melalui proses seleksi

Muhammad Syafnat Fu’aini selaku Ketua KAMMI UNS 2025 (4/3/2026)

Foto: Editiawan Achmad Pambudi

yang ketat. “Kami selektif banget untuk menilai orang-orang yang mau naik tingkat, begitupun untuk ketua. Kalau ketua tuh harus AB2 dulu supaya teruji. Jadi kalau kami turun ke masyarakat nggak ada pandangan bahawa kader KAMMI nggak integritas atau nggak profesional.”

Mengenai prinsip kepemimpinan dan integritas, Syafnat memiliki pandangan yang sangat jernih saat dihadapkan pada pilihan antara kebenaran yang pahit atau loyalitas organisasi. Baginya, organisasi hanyalah sebuah wadah *(wajihah),* sementara nilai Islam adalah prinsip utama yang tidak bisa ditawar. “Mengenai loyalitas ke organisasi itu tergantung masing-masing pribadi memandang organisasi seperti apa. Kalau pada era aku, memandang organisasi itu bukan serta-merta akidah atau mungkin yang harus kami benar-benar jaga banget. Sebab yang kami harus jaga banget memang pasti agama ya pasti. Jadi, kalaupun KAMMI nggak ada, ya kami tetap Islam kan,” tuturnya. Prinsip ini membuatnya tetap berdiri tegak meski harus meninggalkan wadahnya jika sudah tidak sejalan.

“Seumpama jikalau KAMMI nanti tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, akan kami tinggalkan juga. Jadi, kami nggak serta-merta menjunjung tinggi KAMMI. Namun, yang kami junjung tinggi adalah agama Islam,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Ketua KAMMI UNS 2025 ini merefleksikan harapannya bagi masa depan Universitas Sebelas Maret sepuluh tahun ke depan. Ia memimpikan kampus yang bersih dan kembali pada hakikatnya sebagai pencetak intelektual yang berakhlak, di tengah tantangan realitas sosial yang ia sebut sebagai “sisi gelap” kampus. “Ya harapannya semoga UNS lebih baik lagi dalam banyak hal. Dalam segi keislaman, nilai-nilai kemahasiswaan yang mengakar, terus mungkin perilaku mahasiswa,” jelasnya.

Bagi Syafnat, visi akhirnya adalah menjaga marwah kampus agar tetap pada jalur yang ia anggap tidak menyimpang. “Jadi, bagi aku pribadi, memang mengharapkannya kalau UNS itu bersih dari hal-hal seperti itu, selayaknya seperti universitas pada umumnya. Universitas dapat mencetak para pelajar, ilmuwan, pemimpin, dan sebagainya.”

Namun, di tengah kompleksitas politik kampus hari ini, yakni relasi kuasa, kaderisasi, dan kontestasi saling berkelindan, harapan itu menyisakan pertanyaan yang lebih besar. Sejauh mana visi tentang “kampus ideal” dapat diwujudkan tanpa menutup ruang keberagaman dan dinamika kritis mahasiswa itu sendiri? Di titik inilah, kepemimpinan Syafnat tidak hanya akan diuji oleh kemampuannya mengelola organisasi, tetapi juga oleh bagaimana ia menavigasi batas antara nilai, kekuasaan, dan ruang kebebasan di dalam kampus.

LPM KENTINGAN | SALURAN SEBELAS
Detak Nurani Mahasiswa

Kirim Tulisanmu!

Punya unek-unek tapi bingung mau ditaruh di mana? Atau kamu udah nulis tapi belum nemu tempat yang dibaca banyak orang?

Daripada dipendam, mending **kirim tulisanmu ke**

saluransebelas.com

Bisa nulis apa aja?

- Opini (min. 5.000 karakter)
- Ngasal-Usul (min. 1.000 karakter)
- Surat Pembaca (bebas)
- Resensi (musik, film, buku ±5.000 karakter)
- Puisi & Cerpen (bebas)

Terus kirimnya gimana?
Gampang banget!
Klik: ***uns.id/KirimTulisanmuKeRedaksi***

9 771410 466007

Sponsor

AYAM PENYET
BLESS GLASSES
EL'S SWEETS
MUTIARA REBILIAN
Larissa